



LAPORAN AKTUALISASI

Optimalisasi Pembuatan Judul dan Klasifikasi *Playlist* pada *Youtube* DPR RI

Disusun oleh:

Nama : Riski As Swarra Saputra

NIP : 199301132025061001

Unit Kerja : Biro Pemberitaan Parlemen

Jabatan : Pengendali Konten Internet

**PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XVII
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN 2025**

**LEMBAR PENGESAHAN
EVALUASI AKTUALISASI**

**Optimalisasi Pembuatan Judul dan Klasifikasi *Playlist*
pada *Youtube* DPR RI**

Nama : Riski As Swarra Saputra, S.I.Kom
NIP : 199301132025061001
Unit Kerja : Biro Pemberitaan Parlemen
Jabatan : Pengendali Konten Internet

Telah diseminarkan Evaluasi Aktualisasi pada
Tanggal 7 November 2025

Mengetahui,
Coach



Izzaty, S.T., M.E.

NIP. 197712052009122001

Menyetujui,
Mentor



Siti Nadiah

NIP. 198905022025212044

Mengetahui,
Penguji



Agus Supriyono, S.S., M.A.P.

NIP. 196902082003121003

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan aktualisasi dan habituasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang berjudul *“Optimalisasi Pembuatan Judul dan Klasifikasi Playlist pada Youtube DPR RI”*.

Laporan aktualisasi ini disusun sebagai salah satu persyaratan dalam mengikuti Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan XVII Tahun 2025, sekaligus sebagai bentuk penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, serta Kolaboratif (BerAKHLAK). Melalui kegiatan ini, penulis berusaha menerapkan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tugas, khususnya guna meningkatkan pengelolaan konten media sosial di lingkungan sub bagian media sosial DPR RI.

Dalam proses penyusunan Laporan ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan penyelesaiannya tidak lepas dari dukungan, arahan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Muhammad Taufiq, DEA serta jajarannya yang telah menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Dasar CPNS
2. Sekretariat Jenderal DPR RI DR. Ir. Indra Iskandar. M.Si., M.I. Kom. dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi pegawai dan mengabdikan diri di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI
3. Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si. Dan seluruh jajaran fasilitator Pelatihan Dasar CPNS yang senantiasa memberikan ilmu, bimbingan, dan motivasi
4. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Bapak Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si., dan jajarannya khususnya di lingkungan sub bagian Media Sosial, yang telah memberikan dukungan dan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan aktualisasi
5. Izzaty, S.T., M.E. Selaku *coach* yang telah memberikan pemaparan materi, bimbingan dan waktu kepada penulis sehingga laporan aktualisasi ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.
6. Siti Nadiyah, selaku mentor yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis sehingga laporan aktualisasi ini dapat terselesaikan dengan sangat baik.

7. Agus Supriyono, S.S., M.A.P. Sebagai penguji yang memberikan saran dan masukan perbaikan untuk penyempurnaan laporan aktualisasi ini, sehingga nantinya dapat diterapkan dengan baik.
8. Keluarga yang telah mendukung dan mendoakan serta memberikan bantuan sehingga semua rangkaian kegiatan pelatihan dasar CPNS dapat terselesaikan dengan baik.
9. Rekan-rekan kerja dan seluruh pihak yang turut membantu serta memberikan masukan dalam penyusunan laporan ini.

Penulis berharap laporan aktualisasi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi berbagai pihak serta menjadi contoh penerapan nilai-nilai BerAKHLAK, prinsip manajemen ASN, dan konsep SMART ASN di lingkungan kerja Sekretariat Jenderal DPR RI.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan di masa yang akan datang. Harapannya, laporan aktualisasi ini dapat memberikan nilai manfaat, tidak hanya bagi penulis sendiri, tetapi juga bagi institusi tempat penulis mengabdikan, serta turut mendukung peningkatan kualitas media sosial DPR RI.

Jakarta, 16 September 2025



Riski As Swarra Saputra

Daftar Isi

Halaman Judul	
Halaman Lembar Pengesahan	
Kata Pengantar.....	I
Daftar Isi	III
Daftar Tabel	IV
Daftar Gambar	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan.....	3
D. Manfaat.....	4
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN.....	5
A. Visi dan Misi Unit Kerja.....	5
B. Struktur Organisasi	6
C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta.....	8
BAB III PENETAPAN ISU PRIORITAS	10
A. Identifikasi Isu	10
1. Isu Ke-1.....	12
2. Isu Ke-2.....	14
3. Isu Ke-3.....	17
B. Penetapan Isu Prioritas	20
1. Teknik Analisis Isu	21
2. Pemilihan Isu Prioritas	22
C. Penentuan Penyebab Terjadinya Isu.....	23
D. Gagasan Pemecahan Isu	24
BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI	27
A. Matrix Rancangan Aktualisasi.....	27
B. Jadwal Rencana Kegiatan.....	31
BAB V PELAKSANAAN AKTUALISASI.....	32
A. Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi.....	32
B. Penjelasan Tahapan Kegiatan	33
C. Stakeholder.....	65
D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala.....	65
E. Analisis Dampak.....	66
BAB VI PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
Daftar Pustaka	70
Lampiran	

Daftar Tabel

Tabel 1. Bagan Organisasi Biro Pemberitaan Parlemen.....	7
Tabel 2. Tabel Rumusan Isu.....	12
Tabel 3. Matriks Pemilihan Isu Prioritas.....	21
Tabel 4. Analisis Isu Menggunakan Alat Bantu <i>Fishbone</i>	24
Tabel 5. Matriks Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS.....	30
Tabel 6. Tabel Kendala dan Strategi Penyelesaian.....	31
Tabel 7. Matriks Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi.....	33
Tabel 8. Threshold hasil benchmarking.....	43
Tabel 9. Draf klasifikasi playlist.....	44
Tabel 10. Klasifikasi playlist final.....	46
Tabel 11. Evaluasi perbaikan playlist untuk masa mendatang.....	52
Tabel 12. Draf evaluasi.....	54
Tabel 13. Draf indikator evaluasi.....	54
Tabel 14. Daftar pertanyaan di kuesioner.....	55
Tabel 15. Hasil evaluasi.....	57
Tabel 16. Hasil analisis kuantitatif.....	60
Tabel 17. Kendala dan Strategi Penyelesaian.....	66

Daftar Gambar

Gambar 1. Tangkapan terkait waktu liputan yang berdekatan dan prioritas liputan.....	13
Gambar 2. Tangkapan layar pada kolom komentar Instagram DPR RI.....	15
Gambar 3. Tangkapan layar pada <i>Playlist Youtube</i> DPR RI.....	18
Gambar 4. Tangkapan layar data kanal <i>Youtube</i> DPR RI.....	18
Gambar 5. Tangkapan layar pada <i>update Playlist</i> terbaru <i>Youtube</i> DPR RI.....	19
Gambar 6. Foto saat penulis berdiskusi dengan mentor.....	33
Gambar 7. Tangkapan layar hasil diskusi dengan mentor.....	34
Gambar 8. Tangkapan layar catatan data sesuai hasil diskusi.....	36
Gambar 9. Foto penulis berdiskusi dengan redaktur tim media sosial.....	37
Gambar 10. Tangkapan layar data dan indikator playlist.....	37
Gambar 11. Data dan tautan video yang belum masuk dalam playlist.....	39
Gambar 12. Tangkapan layar hasil benchmarking dengan liputan 6.....	40
Gambar 13. Tangkapan layar hasil benchmarking dengan Kompas TV.....	40
Gambar 14. Tangkapan layar hasil benchmarking dengan kanal Youtube Kemenkeu.....	41
Gambar 15. Foto penulis berdiskusi dengan redaktur.....	44
Gambar 16. Foto penulis berdiskusi dengan mentor.....	45
Gambar 17. Foto penulis saat melakukan pembuatan playlist.....	47
Gambar 18. Tangkapan layar Playlist sebelum diperbaharui.....	48
Gambar 19. Tangkapan layar Playlist setelah diperbaharui.....	49
Gambar 20. Tangkapan layar Playlist setelah diperbaharui.....	49
Gambar 21. Tangkapan layar isi playlist Pimpinan DPR RI.....	50
Gambar 22. Tangkapan layar isi playlist Setjen DPR RI.....	50
Gambar 23. Tangkapan layar hasil diskusi dengan mentor.....	51
Gambar 24. Foto saat penulis berdiskusi dengan mentor.....	53
Gambar 25. Tangkapan layar kuesioner yang dibuat untuk evaluasi.....	56
Gambar 26. Tangkapan layar kuesioner yang dibuat untuk evaluasi.....	56
Gambar 27. Bagan penambahan jumlah playlist.....	57
Gambar 28. Chart penambahan jumlah views pada kanal Youtube DPR RI.....	58
Gambar 29. Bagan penambahan jumlah subscriber pada kanal Youtube DPR RI.....	58
Gambar 30. Tangkapan layar penamaan playlist yang lama.....	59
Gambar 31. Tangkapan layar penamaan playlist yang baru.....	59

Gambar 32. Tangkapan layar hasil survey mengenai penamaan dan kategori playlist.....	60
Gambar 33. Tangkapan layar hasil survey responden tentang tampilan playlist lama.....	61
Gambar 34. Tangkapan layar hasil survey responden tentang tampilan playlist terbaru.....	61
Gambar 35. Tangkapan layar hasil survey tentang kemudahan dalam mencari berita pada playlist lama.....	61
Gambar 36. Tangkapan layar hasil survey tentang kemudahan dalam mencari berita pada playlist terbaru.....	62
Gambar 37. Hasil survey tentang estimasi waktu untuk mencari video spesifik pada playlist lama.....	62
Gambar 38. Hasil survey tentang estimasi waktu untuk mencari video spesifik pada playlist terbaru.....	62
Gambar 39. Tangkapan layar mengenai 5 playlist teratas.....	63
Gambar 40. Tangkapan layar manfaat playlist terhadap rasio penayangan di kanal Youtube DPR RI.....	63
Gambar 41. Tangkapan layar manfaat playlist terhadap cara penonton menemukan video.....	64
Gambar 42. Hasil survey mengenai profesionalitas dalam pengelolaan kanal Youtube Lembaga.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan profesi strategis yang memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan, memberikan pelayanan publik, serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan bahwa ASN harus menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung tercapainya tujuan bernegara.

Dalam rangka membentuk ASN yang unggul, berdaya saing, dan berfokus pada pelayanan, dibutuhkan sistem pembinaan yang terencana serta berkesinambungan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur pentingnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem ini memastikan bahwa setiap ASN ditempatkan sesuai dengan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, sekaligus memperoleh kesempatan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan. Salah satu instrumen pembinaan kompetensi tersebut adalah Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS).

Sebagai wujud implementasi regulasi tersebut, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 581/K.1/PDP.07/2024 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS menegaskan bahwa Latsar CPNS merupakan program pengembangan kompetensi yang wajib diikuti oleh seluruh CPNS. Pelatihan ini bertujuan membentuk integritas, kejujuran, semangat kebangsaan, karakter unggul, serta memperkuat profesionalisme dalam mengemban amanah sebagai pelayan publik.

Selain itu, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 580/K.1/PDP.07/2024 tentang Kurikulum Pelatihan Dasar CPNS menekankan bahwa Latsar CPNS bertujuan menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BerAKHLAK). Melalui proses ini, diharapkan terbentuk ASN yang memiliki integritas

moral, kejujuran, jiwa nasionalisme, kepribadian unggul, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Rancangan Aktualisasi ini disusun untuk menjawab permasalahan yang ditemukan di unit kerja penulis, yakni Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan pengelolaan media sosial, khususnya pengelolaan hasil konten yang sudah diunggah, dengan isu “Belum optimalnya klasifikasi produk tayangan video pada *Playlist Youtube DPR RI*”. Judul *Playlist* idealnya berperan sebagai penanda klasifikasi topik berita yang mudah dipahami oleh masyarakat. Namun, saat ini pola klasifikasi yang digunakan masih belum optimal. Hal ini dapat menyulitkan publik dalam menangkap isi konten, sehingga menegaskan perlunya penerapan standar judul *Playlist* yang konsisten untuk memperkuat kualitas pemberitaan serta mendukung strategi komunikasi yang lebih efektif di era digital agar dapat diterima dengan baik oleh audiens.

Berdasarkan hal tersebut, penulis sebagai CPNS di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya pada unit kerja Sub bagian Media Sosial, berkewajiban untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN melalui rancangan aktualisasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja organisasi. Rancangan aktualisasi dengan judul “*Optimalisasi Pembuatan Judul dan Klasifikasi Playlist pada Youtube DPR RI*” disusun sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan mutu kualitas sosial media, khususnya *Youtube DPR RI*, sehingga penyampaian informasi parlemen kepada publik dapat lebih sistematis, efektif, dan mudah dipahami.

Dengan demikian, rancangan aktualisasi ini diharapkan tidak semata-mata menjadi pemenuhan kewajiban dalam pelaksanaan Latsar CPNS, tetapi juga berfungsi sebagai wadah untuk meningkatkan kapasitas individu maupun institusi dalam membentuk ASN yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik. Melalui proses ini, penulis tidak hanya belajar secara teoritis, tetapi juga mengasah kemampuan praktis dalam menghadapi tantangan nyata di lingkungan kerja. Pada akhirnya, aktualisasi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas kinerja organisasi.

B. Dasar Hukum

1. UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 2 Tahun 2025
5. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, No. 6 Tahun 2021
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 580/K.1/Pdp.07/2024 tentang Kurikulum Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS)
7. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 581/K.1/Pdp.07/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS)
8. Peraturan LAN No. 10 Tahun 2021 adalah Peraturan Lembaga Administrasi Negara (LAN) tentang Perubahan atas Peraturan LAN No. 1 Tahun 2021 mengenai Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS)

C. Tujuan

Aktualisasi berasal dari kata dasar "*aktual*" yang bermakna nyata, benar-benar terjadi, atau sesungguhnya ada. Berdasarkan pengertian tersebut, aktualisasi dipahami sebagai proses mengimplementasikan pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari substansi mata pelatihan menjadi tindakan nyata. Dengan demikian, tujuan dari aktualisasi adalah:

1. Membiasakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam menerapkan nilai-nilai dasar ASN serta memahami kedudukan dan peran ASN dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui proses ini, CPNS diharapkan terbiasa mengidentifikasi permasalahan dengan berlandaskan Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), sekaligus mampu melahirkan gagasan inovatif dari perspektif manajemen ASN.

2. Mengimplementasikan nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran ASN dalam melaksanakan aktualisasi yang relevan dengan tugas serta fungsi PNS sebagaimana telah ditetapkan.

D. Manfaat

1. Untuk Instansi
 - Dapat meningkatkan kredibilitas komunikasi publik DPR RI dengan konten yang lebih tertata dan mudah diakses sehingga memperkuat citra DPR RI sebagai lembaga negara yang transparan dan akuntabel
 - Mendukung strategi komunikasi digital DPR RI sejalan dengan tren keterbukaan informasi publik
2. Untuk Unit Kerja
 - Meningkatkan profesionalitas pengelolaan kanal *Youtube* resmi DPR dengan standar klasifikasi konten yang jelas, rapi, dan konsisten
 - Mengurangi redudansi dan inkonsistensi judul yang kurang relevan, sehingga mempermudah dalam melakukan pendistribusian konten
3. Untuk Peserta
 - Memberikan pengalaman nyata dalam melaksanakan tugas sebagai Pengendali Konten Internet untuk meningkatkan kualitas pengelolaan media sosial dan manajemen informasi
 - Menunjukkan inisiatif dan kontribusi nyata dalam mendukung modernisasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi informasi, sehingga menjadi bekal berharga bagi peserta
4. Untuk Masyarakat
 - Memudahkan pengguna sosial media untuk mengakses informasi mengenai kegiatan, fungsi, dan kinerja DPR RI karena konten sudah tertata tematis sesuai *Playlist*
 - Meningkatkan literasi politik dan parlemen dengan menghadirkan tayangan yang lebih mudah dipahami dan relevan dengan isu-isu yang sedang berkembang

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Organisasi

Sehubungan dengan Visi Misi DPR RI, Sekretariat Jenderal DPR RI mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Visi dan Misi DPR RI adalah sebagai berikut.

1. Visi DPR RI

Mewujudkan DPR RI sebagai pilar demokrasi yang substansial, modern, aspiratif, responsif, dan akuntabel menuju Indonesia Emas 2045.

2. Misi DPR RI

- a. Mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang efektif untuk mempercepat terwujudnya tujuan bernegara.
- b. Mewujudkan tata kelola kelembagaan DPR RI yang dinamis (*dynamic parliament governance*) untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi.

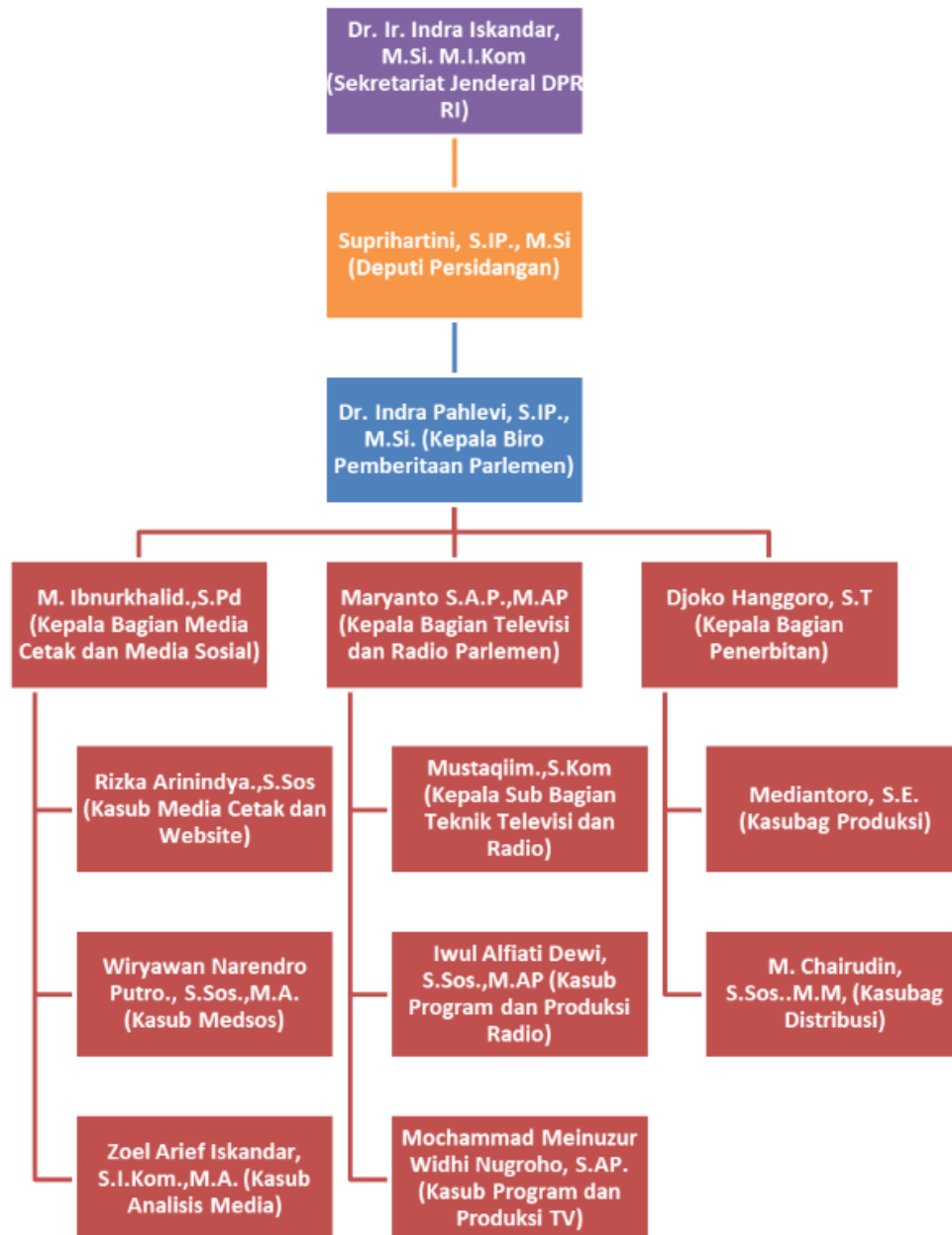
3. Sekretariat Jenderal DPR RI

Sebagai organisasi pendukung DPR RI, Setjen DPR RI dalam Renstra 2025-2029 menetapkan sasaran strategis “Terwujudnya tata kelola kelembagaan sistem pendukung DPR RI yang profesional, akuntabel, dan modern untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi.” Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, ditetapkanlah sasaran program sebagai berikut:

1. Terwujudnya layanan Setjen DPR RI yang profesional, akuntabel, dan modern untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang berkualitas melalui dukungan persidangan, administrasi, keahlian, dan pengawasan internal yang handal;
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI yang profesional, akuntabel, dan modern untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi

B. Struktur Unit Kerja

Dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI yang tertuang dalam Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen adalah salah satu unit eselon II yang berada di bawah Deputy Bidang Persidangan yang secara umum memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan dukungan pemberitaan di media cetak dan media sosial, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan, struktur organisasi Biro Pemberitaan Parlemen secara keseluruhan tertuang dalam gambar di bawah ini :



Tabel 1. Bagan Organisasi Biro Pemberitaan Parlemen

Bagian Media Cetak dan Media Sosial

Bagian Media Cetak dan Media Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pemberitaan di media cetak dan *website*, media sosial dan melaksanakan analisis media. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, Bagian Media Cetak dan Media Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Bagian Media Cetak dan Media Sosial;
- b) Penyusunan bahan kegiatan di bidang pemberitaan media cetak, *website*, media sosial, dan analisis media;
- c) Pelaksanaan dukungan pemberitaan di media cetak dan *website*;
- d) Pelaksanaan dukungan pemberitaan di media sosial;
- e) Pelaksanaan analisis media;
- f) Pelaksanaan tata usaha Bagian Media Cetak dan Media Sosial; dan
- g) Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pemberitaan Parlemen.

A. Tugas dan Fungsi Jabatan Pengendali Konten Internet

Menurut Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, jabatan Pengendali Konten Internet berada di bawah Sub bagian Analisis Media, Bagian Media Cetak dan Media Sosial, Biro Pemberitaan Parlemen.

Adapun tugas dari jabatan Pengendali Konten Internet memiliki adalah sebagai berikut:

1. Menyusun konsep kerangka acuan kerja terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan
2. Menyusun konsep pedoman atau aturan tentang pelaksanaan kegiatan pada unit kerja terkait
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan aplikasi/*database/output*/media elektronik unit kerja terkait
4. Melaksanakan dan menyusun laporan kegiatan

5. Mengumpulkan bahan penyusunan konsep laporan kinerja
6. Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan

Dalam pelaksanaan aktualisasi, penulis menjalankan tugas dan fungsi pengendali konten internet dengan cara menyusun konsep kerangka acuan kerja, merancang pedoman penataan *Playlist*, serta mengelola media elektronik melalui klasifikasi judul *Youtube* DPR RI agar lebih terstruktur dan mudah diakses publik. Selain itu, Gagasan kreatif ini tidak hanya sebatas penataan teknis, tetapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik DPR RI melalui kanal digital, sekaligus memperkuat profesionalisme unit kerja dalam menyajikan informasi yang transparan dan relevan bagi masyarakat.

BAB III

PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. Identifikasi Isu

1. Tabel Rumusan Isu

No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharap kan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance
1	Belum adanya penerapan sistem monitoring dan evaluasi hasil liputan tim Media sosial	Belum adanya penerapan sistem evaluasi dan monitoring hasil liputan terlihat pada saat masa sidang dan sering terjadi penumpukan jadwal liputan yang berdekatan dan tidak adanya panduan hasil liputan yang baik seperti jumlah anggota yang berhasil di minta keterangan, kualitas <i>statement</i> terhadap isu, himbauan pertanyaan yang berbobot terhadap isu.	Apabila isu ini tidak diselesaikan dampak yang terjadi adalah: 1. Kualitas Publikasi Berita Menurun : Informasi yang baik atas kinerja DPR harus tersampaikan dengan mendapatkan pernyataan anggota Dewan yang berbobot. 2. Menurunnya Kinerja Tim : Tim liputan menjadi kurang efisien dan adanya indikasi melewati isu-isu yang hangat di Masyarakat 3. Liputan hanya sekedar menjadi rutinitas dan urgensi untuk membuat konten	Kondisi yang diharapkan adalah Tim sosial media memiliki sistem evaluasi dan monitoring yang dapat menilai kualitas hasil liputan di lapangan.	Manajemen ASN: Penerapan Evaluasi dan Monitoring hasil Liputan di sub bagian media sosial tidak dapat tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip Manajemen ASN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 pasal 10 dan 11 terkait fungsi dan tugas ASN sebagai pelayan publik dan memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dalam hal ini sebagai ASN di Setjen sebagai <i>supporting sistem</i> DPR RI. Smart ASN: Dari aspek <i>digital culture</i>, budaya kerja berbasis kolaborasi dan transparansi juga tidak tumbuh. Konten hasil liputan hanya menjadi rutinitas, bukan hasil analisis bersama yang mendorong budaya berbagi pengetahuan dan

					pembelajaran kolektif sesuai nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
2	Belum adanya standarisasi acuan untuk membalas komentar di Instagram DPR RI	Dengan tidak adanya standarisasi tersebut menimbulkan Kesan bahwa IG DPR tidak interaktif walaupun memiliki volume interaksi yang tinggi.	Apabila isu ini tidak diselesaikan dampak yang terjadi adalah, tim admin kesulitan memilah mana komentar yang perlu dijawab, diabaikan, atau ditindaklanjuti serta berpotensi menimbulkan multi tafsir atau bias bagi <i>audiens</i> jika 1 isu yang sama dijawab dengan gaya dan cara yang berbeda	Kondisi yang diharapkan adalah pembuatan pedoman atau SOP untuk membalas komentar di IG DPR RI	Manajemen ASN Ketiadaan panduan untuk membalas komentar di Instagram DPR RI menghambat fungsi ASN sebagai pelayan publik sesuai Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2023, karena komunikasi digital menjadi tidak konsisten, tidak terukur, dan berisiko menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga. SMART ASN Dari sisi Digital Culture, ketiadaan pedoman membuat budaya kerja berbasis kolaborasi dan transparansi di ruang digital belum terbangun
3	Belum optimalnya klasifikasi produk tayangan video pada <i>Playlist Youtube</i> DPR RI	Salah satu isu yang saat ini dihadapi tim media sosial adalah kurangnya klasifikasi video yang diupload pada <i>Playlist</i> di <i>channel Youtube</i> DPR RI. Kekurangan klasifikasi tersebut terlihat pada <i>Playlist</i> kegiatan sidang seperti <i>Playlist</i> paripurna DPR RI yang hanya berisi 1 video, dan <i>Playlist</i> terakhir yang di perbarui adalah Berkah Ramadhan 2025 sekitar 5 bulan lalu. Sehingga diperlukan klasifikasi baru berdasarkan kegiatan AKD, Jenis video yang di unggah serta melakukan	Apabila isu ini tidak diselesaikan dampak yang terjadi adalah publik akan mengalami kesulitan dalam mengakses informasi karena tidak adanya pengelompokan video yang jelas, sehingga menurunkan minat dan interaksi masyarakat terhadap kanal resmi DPR RI. Hal ini juga dapat berdampak pada citra kelembagaan, di mana	Kondisi yang diharapkan adalah terdapat pengelompokan <i>Playlist</i> yang terstruktur dan penggunaan judul yang jelas membuat publik lebih mudah menelusuri tayangan sesuai kebutuhan.	Dari sisi Manajemen ASN, hal ini tidak sejalan dengan prinsip sistem merit dalam UU ASN No. 20 Tahun 2023, khususnya Pasal 51 yang menekankan pengelolaan ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kurang optimalnya penyusunan <i>Playlist</i> akan berdampak pada kurang efektifnya komunikasi publik DPR dalam aspek digital

		perbaikan dalam penataan dan penulisan judul <i>Playlist</i> .	ketidakrapian <i>Playlist</i> mencerminkan pengelolaan konten yang tidak profesional dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif mengenai komitmen DPR RI dalam menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses.		SMART ASN Budaya kerja digital yang kolaboratif, adaptif (Digital Culture) tidak terbentuk karena belum memberikan kemudahan informasi kepada publik.
--	--	--	--	--	---

Tabel 2. Tabel Rumusan Isu

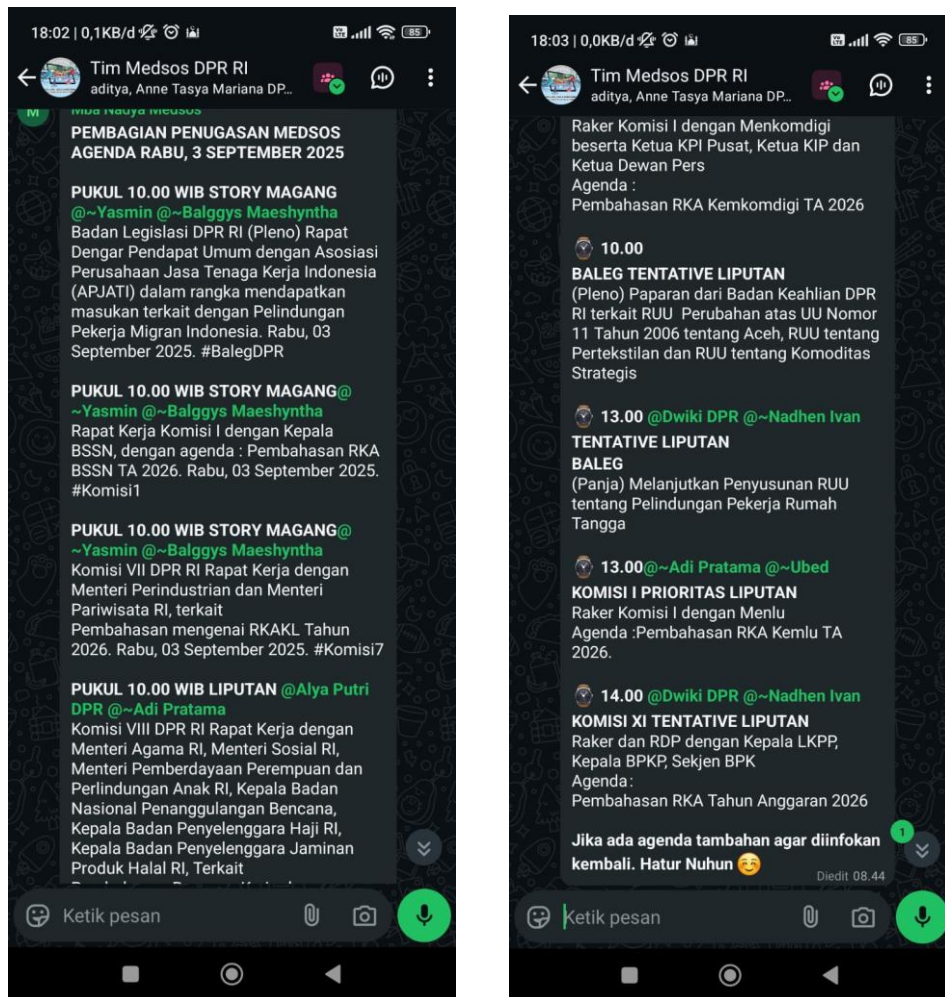
2. Deskripsi Isu

A. Belum optimalnya penerapan sistem monitoring dan evaluasi hasil liputan tim Media sosial

1) Kondisi Saat Ini dan Kondisi Yang Diharapkan

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa sistem monitoring dan evaluasi hasil liputan tim media sosial DPR RI belum berjalan optimal. Hal ini terlihat dari kurangnya mekanisme evaluasi yang terstruktur dalam menilai hasil liputan, terutama saat masa sidang ketika jadwal liputan sering menumpuk dan berdekatan. Ketiadaan panduan standar dalam menilai kualitas liputan, seperti jumlah anggota yang berhasil dimintai keterangan, relevansi dan kualitas pernyataan terhadap isu, serta bobot pertanyaan yang diajukan, membuat hasil liputan menjadi tidak konsisten dan sulit diukur.

Akibat dari kondisi tersebut, efektivitas liputan di lapangan menjadi berkurang dan potensi informasi strategis yang dapat disampaikan kepada publik tidak termanfaatkan secara maksimal. Tim media sosial juga berisiko menghadirkan konten yang tidak sesuai dengan kebutuhan informasi publik karena tidak adanya standar evaluasi yang dapat dijadikan acuan bersama. Hal ini pada akhirnya berpengaruh pada kredibilitas liputan serta kepercayaan publik terhadap kualitas informasi yang disampaikan oleh DPR RI melalui kanal digitalnya. Berikut bukti yang penulis dapatkan terkait koordinasi, pembagian dan prioritas liputan.



Gambar 1. Tangkapan terkait waktu liputan yang berdekatan dan prioritas liputan

Kondisi yang diharapkan adalah terbentuknya sistem evaluasi dan monitoring yang jelas, terukur, dan aplikatif bagi tim media sosial. Sistem ini mampu memberikan penilaian terhadap kualitas hasil liputan berdasarkan indikator yang relevan, seperti ketercapaian wawancara, substansi pernyataan, serta kualitas pertanyaan yang diajukan. Dengan adanya sistem yang baik, hasil liputan dapat lebih konsisten, akuntabel, serta mampu memperkuat citra DPR RI sebagai lembaga yang transparan dan responsif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

2) Dampak Apabila Isu tidak terselesaikan

Menurunnya kualitas publikasi berita DPR RI berdampak pada berkurangnya penyampaian informasi yang berbobot karena tidak didukung pernyataan anggota Dewan yang relevan. Hal ini turut mempengaruhi kinerja tim liputan yang menjadi kurang efisien dan berpotensi melewati isu-isu

penting yang sedang hangat di masyarakat. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menurunkan citra DPR RI di mata publik, karena kualitas publikasi kegiatan yang tidak optimal akan membentuk persepsi negatif terhadap kinerja lembaga.

3) Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance

Penerapan evaluasi dan monitoring hasil liputan di sub bagian media sosial Setjen DPR RI merupakan bagian penting dari prinsip Manajemen ASN sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023 Pasal 10 dan 11, yang menegaskan peran ASN sebagai pelayan publik yang profesional, bertanggung jawab, dan efektif. Hal ini juga selaras dengan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN untuk menjaga integritas dan kualitas kerja. Tanpa adanya monitoring, potensi kesalahan seperti typo, konten bias, atau penggunaan bahasa normatif tidak akan terkoreksi, sehingga berisiko melanggar etika pelayanan publik di ruang digital. Lebih jauh, ketiadaan evaluasi berbasis data menghambat peningkatan kecakapan digital ASN serta melemahkan budaya kerja kolaboratif, transparan, dan berbasis pembelajaran kolektif, padahal hal tersebut penting untuk membangun budaya digital yang sesuai dengan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

B. Belum terstandarisasi acuan untuk membalas komentar di Instagram DPR RI

1) Kondisi Saat Ini dan Kondisi Yang Diharapkan

Hingga saat ini, banyak sekali komentar maupun pertanyaan di kolom komentar yang tidak dijawab ataupun direspons, dan akan dibuatkan tim yang secara khusus ditugaskan untuk membalas hal tersebut, sehingga diperlukan panduan atau struktur kalimat balasan yang sesuai dengan pedoman.

Instagram DPR RI dengan lebih dari 1 juta pengikut memiliki volume interaksi yang sangat tinggi, dengan ribuan komentar publik setiap harinya di tiap unggahan. Namun, ketiadaan pedoman atau SOP khusus membuat tim admin kesulitan memilah komentar yang perlu dijawab, diabaikan, atau ditindaklanjuti.

Kondisi ini meningkatkan risiko krisis reputasi, karena tanpa etika komunikasi digital yang tepat, komentar dapat dengan mudah viral di platform lain dan memperburuk citra DPR. Selain itu, ketiadaan SOP engagement juga membuat tidak adanya standar gaya bahasa, tata cara membalas komentar, batas waktu respons, maupun kejelasan siapa yang berwenang merespons isu sensitif.



Gambar 2. Tangkapan layar sebagai bukti tidak adanya balasan untuk komentar di IG DPR RI

Kondisi yang diharapkan adalah tersusunnya pedoman atau SOP khusus untuk membalas komentar di Instagram DPR RI, sehingga tim admin memiliki acuan yang jelas dalam melakukan engagement dengan publik. Dengan adanya SOP, setiap komentar dapat ditangani secara konsisten, terukur, dan sesuai dengan etika komunikasi digital. SOP ini juga akan mengatur gaya bahasa, batas waktu respons, serta kewenangan dalam merespons isu sensitif, sehingga interaksi di media sosial tidak hanya responsif tetapi juga mampu memperkuat citra DPR RI sebagai lembaga yang profesional, transparan, dan dekat dengan masyarakat.

2) Dampak yang terjadi jika isu tidak diselesaikan

Tanpa adanya pedoman yang jelas, interaksi di Instagram DPR RI berisiko menurunkan kepercayaan publik karena masyarakat dapat menganggap DPR tidak responsif dan mengabaikan komentar yang serius, sehingga aspirasi publik terasa tidak didengar. Kondisi ini juga menimbulkan respon yang tidak konsisten terhadap isu yang sama serta membuka potensi krisis reputasi ketika komentar sensitif atau negatif tidak ditangani dengan tepat dan akhirnya viral. Dampaknya dirasakan langsung oleh Biro Pemberitaan DPR RI yang kinerjanya dinilai kurang efektif, Anggota DPR RI yang liputannya dapat tertutup komentar kritis, serta masyarakat yang merasa diabaikan akibat komunikasi yang cenderung satu arah.

3) Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance

Terkait isu belum terstandarisasi acuan untuk membalas komentar di Instagram DPR RI juga berkaitan langsung dengan prinsip manajemen ASN dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam Pasal 10, ditegaskan bahwa ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa . Tanpa panduan yang sinergi, fungsi ASN sebagai pelayan publik tidak terlaksana dengan baik karena komunikasi dengan masyarakat di ruang digital menjadi tidak konsisten, tidak terukur, bahkan berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga. Hal ini sekaligus menghambat terwujudnya citra ASN sebagai pelayan publik yang profesional dan akuntabel.

Lebih lanjut, dari aspek *Digital Skill*, ASN yang bertugas di media sosial seharusnya memiliki kecakapan dalam mengelola interaksi publik secara profesional. Namun, tanpa adanya panduan engagement, keterampilan ini tidak dapat terarah dengan baik sehingga respons cenderung improvisatif dan tidak konsisten. Dari sisi *Digital Culture*, ketiadaan pedoman membuat budaya kerja berbasis kolaborasi dan transparansi di ruang digital belum terbangun. Padahal, SMART ASN menuntut ASN untuk mampu menumbuhkan budaya komunikasi publik termasuk dalam ruang komentar yang menjadi wadah aspirasi masyarakat.

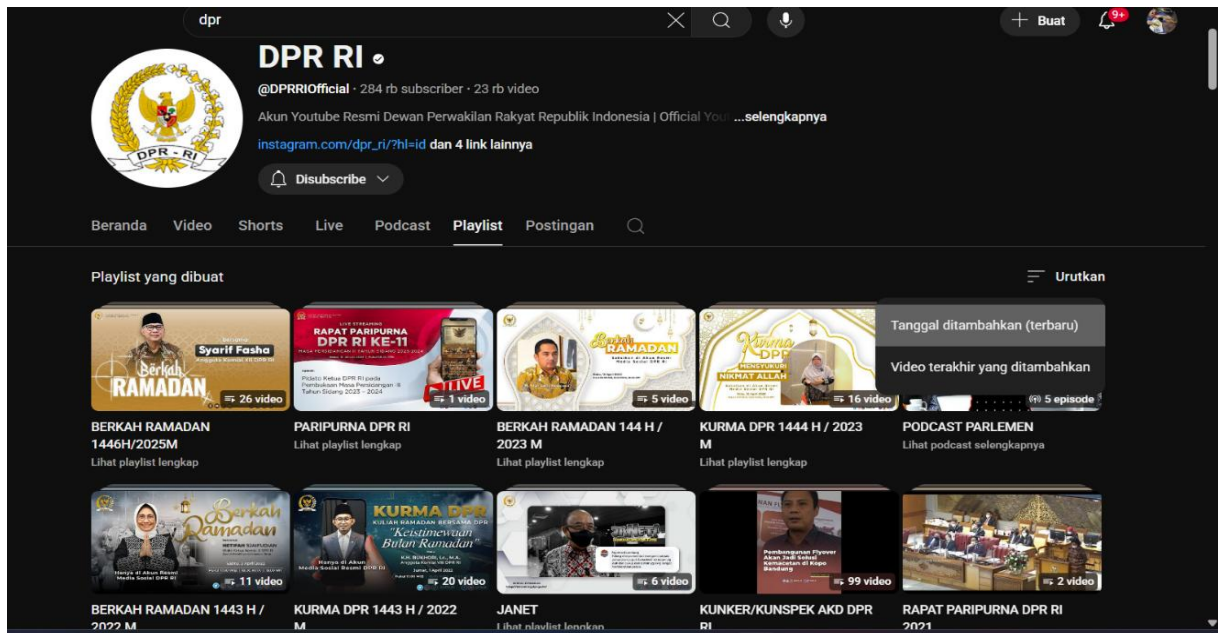
C. Belum optimalnya klasifikasi produk tayangan video pada *Playlist Youtube DPR RI*.

1) Kondisi Saat Ini dan Kondisi Yang Diharapkan

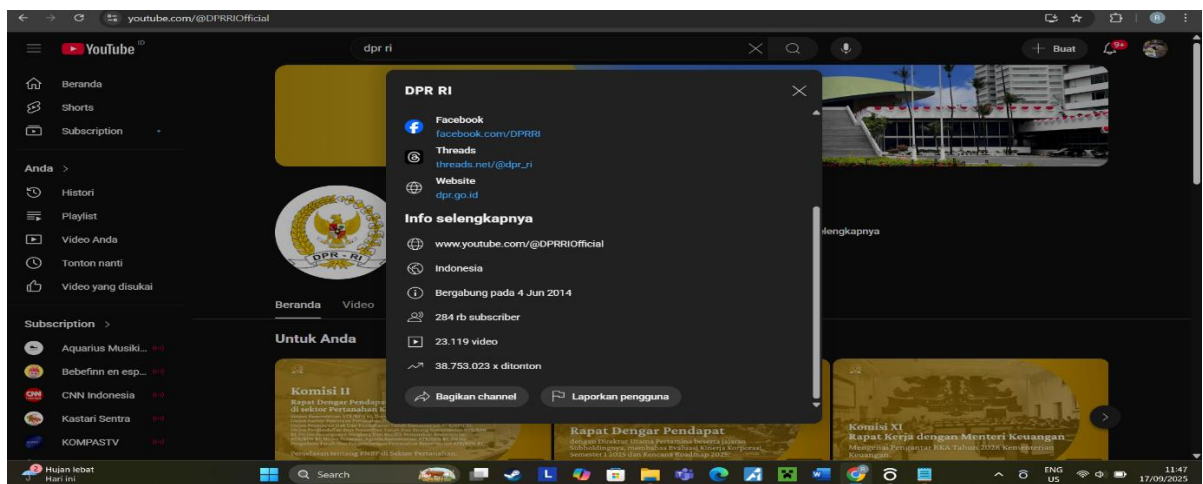
Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kanal *Youtube DPR RI* memiliki 284 ribu subscriber dengan total video yang sudah diunggah sebanyak 23ribu video. Saat ini sudah terdapat beberapa *Playlist* yang dibuat seperti Berkah Ramadhan, Paripurna DPR RI, Podcast Parlemen, Suara Dapil dan lain lain. Namun *Playlist* terakhir yang dibuat adalah 5 bulan lalu, sehingga tidak ada pembaharuan terhadap *Playlist* terkini, padahal video konten tetap rutin diunggah. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada 6 September 2025, saat ini terdapat lebih dari 162 *Playlist* di kanal resmi *Youtube DPR RI* serta belum adanya *Playlist* terbaru mengenai kegiatan rapat atau sidang AKD sejak tahun 2021.

Situasi ini terjadi akibat kurang optimalnya proses kurasi dalam menyusun *Playlist*, baik dari pemilihan judul yang jelas dan relevan maupun dari pengelompokan isi tayangan sesuai tema atau kategori. Dampaknya, sejumlah *Playlist* yang tersedia tidak tersusun rapi sehingga menyulitkan masyarakat dalam menemukan informasi atau berita yang mereka butuhkan.

Dampak dari kondisi tersebut adalah terhambatnya pemenuhan kebutuhan informasi yang aktual, kredibel, dan sesuai dengan momentum isu yang berkembang bagi Masyarakat atau public. Serta berpotensi menyebabkan tayangan penting bisa tenggelam di antara konten lain dan pesan strategis lembaga tidak tersampaikan dengan maksimal. Kondisi tersebut dapat menghambat partisipasi publik, sebab audiens yang kesulitan menemukan konten relevan cenderung beralih ke sumber informasi lain.



Gambar 3. bukti pendukung isu belum optimalnya klasifikasi produk tayangan video pada *Playlist* Youtube DPR RI



Gambar 4. bukti pendukung terkait data-data di kanal Youtube DPR RI



Gambar 5. bukti pendukung isu sesuai update *Playlist* terbaru

Dengan demikian, kondisi ideal yang diharapkan adalah adanya klasifikasi yang terstruktur dan konsisten terhadap produk tayangan, termasuk penyusunan *Playlist* yang lebih fokus, tematis, serta sesuai dengan kebutuhan audiens. Hal ini akan menjadikan kanal *Youtube* DPR sebagai sumber informasi yang kredibel dan mudah diakses, sekaligus memudahkan publik menemukan tayangan yang relevan serta berpotensi meningkatkan jumlah penayangan dan tingkat keterlibatan masyarakat.

2) Dampak yang terjadi jika isu tidak diselesaikan

Apabila isu ini tidak segera diselesaikan, dampak yang muncul adalah kualitas penyampaian informasi kepada publik akan menurun. *Playlist* yang tidak terorganisir dengan baik akan mempersulit audiens dalam menemukan konten yang dibutuhkan, mengurangi ketertarikan untuk menonton, serta menurunkan kesan profesional dalam mengelola kanal *Youtube* DPR RI. Jika kondisi ini dibiarkan, citra DPR RI sebagai lembaga yang transparan dan terbuka juga dapat terpengaruh secara negatif karena publik menilai akses informasi tidak berjalan efektif. Selain itu, peluang pemanfaatan media digital sebagai sarana edukasi dan komunikasi publik menjadi tidak maksimal,

sehingga keberadaan *Youtube* DPR sebagai kanal resmi kurang memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat..

3) **Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance**

Isu belum optimalnya belum optimalnya klasifikasi produk tayangan video pada *Playlist Youtube* DPR RI menunjukkan lemahnya manajemen ASN dan tidak sejalan dengan prinsip sistem merit dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN Pasal 51, yang menekankan pengelolaan ASN berbasis kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Serta akan menghambat penilaian kinerja ASN di Biro Pemberitaan Parlemen, memperlambat arus informasi, serta menimbulkan ketergantungan pada jalur komunikasi lain sehingga ASN sulit menjalankan fungsi utamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 10, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa.

Dari perspektif *SMART* ASN, Budaya kerja digital yang kolaboratif dan adaptif (***Digital Culture***) belum sepenuhnya terbentuk karena pengelolaan informasi belum mampu memberikan kemudahan akses bagi publik. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung transparansi dan pelayanan informasi masih kurang optimal, sehingga publik mengalami hambatan dalam memperoleh konten yang relevan secara cepat dan tepat.

B. Penetapan Isu Prioritas

1. **Teknik Tapisan Isu**

Untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas permasalahan yang dihadapi, penulis menggunakan metode tapisan isu agar fokus penyelesaian dapat diarahkan pada tantangan utama. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah Teknik USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), yaitu metode penyaringan isu berdasarkan tingkat urgensi, tingkat keseriusan, serta potensi perkembangan atau eskalasi dampak dari suatu masalah. Masing-masing kriteria diberi skor dengan skala Likert 1 hingga 5, di mana nilai 1 menunjukkan tingkat terendah dan nilai 5 menunjukkan tingkat tertinggi. *Urgency* menggambarkan sejauh mana isu harus segera dibahas dan ditindaklanjuti, *Seriousness* menunjukkan tingkat keseriusan isu terkait konsekuensi yang dapat ditimbulkan, sedangkan *Growth* menjelaskan potensi memburuknya isu

apabila tidak segera diatasi. Penilaian terhadap tiap kriteria dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan, potensi risiko terhadap kelancaran kinerja organisasi, serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik.

2. Pemilihan Isu Prioritas

Dari hasil pemetaan serta identifikasi yang telah dilakukan, penulis menyusun analisis untuk menentukan isu-isu utama yang harus menjadi prioritas penyelesaian. Analisis tersebut digambarkan melalui tabel dengan menerapkan kerangka tapisan isu USG:

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1.	Belum optimalnya penerapan sistem monitoring dan evaluasi hasil liputan tim Media sosial	4	4	3	11
2.	Belum terstandarisasi acuan untuk membalas komentar di Instagram DPR RI	4	3	3	10
3.	Belum optimalnya klasifikasi produk tayangan video pada <i>Playlist Youtube DPR RI</i>	4	4	4	12

Tabel 3. Matrik Pemilihan Isu Prioritas

Berdasarkan hasil analisis USG, isu terkait belum optimalnya klasifikasi produk tayangan pada *Playlist Youtube DPR RI* ditetapkan sebagai prioritas utama karena memperoleh skor tertinggi. Pertimbangan tersebut didasarkan pada:

A. *Urgency (4)*: *Playlist Youtube* merupakan akses utama bagi publik. Tanpa klasifikasi yang terstruktur, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mencari informasi. Tingkat urgensinya tinggi karena berpengaruh langsung terhadap peran *Youtube DPR RI* sebagai sarana penyampaian informasi lembaga.

B. *Seriousness (4)*: Permasalahan ini berdampak pada citra profesional lembaga, kredibilitas informasi yang disampaikan, serta dapat menurunkan minat publik untuk mengakses konten.

C. *Growth (4)*: Jika permasalahan ini tidak segera ditangani, jumlah konten akan semakin menumpuk dan sulit dikelola, sehingga kompleksitas bertambah dan channel *Youtube DPR RI* menjadi semakin tidak teratur.

Di sisi lain, isu lain seperti belum adanya penerapan sistem monitoring dan evaluasi hasil liputan tim media sosial mendapatkan prioritas kedua, berdasarkan pada:

A. *Urgency* (4): Isu ini dinilai mendesak karena tanpa adanya sistem monitoring dan evaluasi, kualitas liputan tim media sosial tidak dapat terukur secara jelas. Hal ini berpotensi mengurangi efektivitas penyampaian informasi publik, serta melemahkan citra lembaga.

B. *Seriousness* (4): Dari sisi keseriusan, isu ini berdampak signifikan terhadap kualitas komunikasi publik lembaga. Tanpa evaluasi, tidak ada tolok ukur yang jelas untuk mengukur keberhasilan liputan,

C. *Growth* (3): Potensi perkembangan isu ini berada pada tingkat sedang, namun isu ini masih bisa diselesaikan melalui Langkah teknis jangka pendek dan penilaian dari koordinator liputan ataupun redaktur tim media sosial

Sedangkan untuk isu belum adanya standar acuan dalam merespons komentar di Instagram DPR RI mendapatkan prioritas ketiga walaupun tetap perlu mendapatkan perhatian, berdasarkan kepada:

A. *Urgency* (4): Tanpa adanya standar acuan dalam merespons komentar, tim media sosial berisiko memberikan jawaban yang tidak konsisten, terlalu lambat, atau bahkan menimbulkan kesalahpahaman public serta menurunkan nilai interaktivitas dengan public.

B. *Seriousness* (3): Dari sisi keseriusan, dampak isu ini cukup signifikan namun tidak kritis. Tanpa standar acuan, kualitas komunikasi publik menjadi tidak seragam dan berpotensi menimbulkan persepsi negatif, atau kesan tidak profesional.

C. *Growth* (3): Isu ini masih dalam kategori sedang, dan masih dalam proses inisiasi lebih lanjut untuk menentukan tim yang bertugas menjalankan tugas ini, namun jika tidak ditindaklanjuti, masalah bisa meluas seiring meningkatnya interaksi masyarakat di media sosial. Komentar yang semakin banyak tanpa standar respon dapat menimbulkan tumpang tindih cara menjawab, mengurangi efektivitas komunikasi, dan memicu opini publik yang sulit dikendalikan.

Oleh karena itu, penyusunan klasifikasi serta pembuatan judul *Playlist* pada *Youtube* DPR RI dipandang sebagai isu yang paling relevan untuk dijadikan fokus aktualisasi penulis karena lebih relevan dengan tugas dan fungsi jabatan penulis sebagai pengendali konten internet yaitu melakukan kegiatan pengelolaan aplikasi/database/output/media elektronik unit kerja terkait.

C. Analisis Isu

Pada bagian ini dijelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya isu yang dibahas. Untuk menganalisis penyebabnya, digunakan metode *fishbone diagram* yang menekankan pada hubungan sebab-akibat dan dikelompokkan ke dalam cabang atau aspek yang relevan dengan permasalahan. Dalam tulisan ini, penyebab masalah diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama, yaitu *lingkungan (surrounding)*, *keterampilan (skill)*, *sistem (sistem)*, serta *pemasok/sumber daya (supplier)*. Melalui teknik analisis tersebut, dapat diidentifikasi penyebab utama (core issue) sebagai berikut:

1. *Surroundings* (lingkungan)

- Tren publik lebih menyukai konten yang terorganisir tematis, menginginkan akses informasi yang cepat, sederhana, dan mudah dipahami
- Tingginya persaingan digital dengan kanal media lain yang sudah terstruktur dan rapi

2. *Suppliers* (pemasok/Sumber daya)

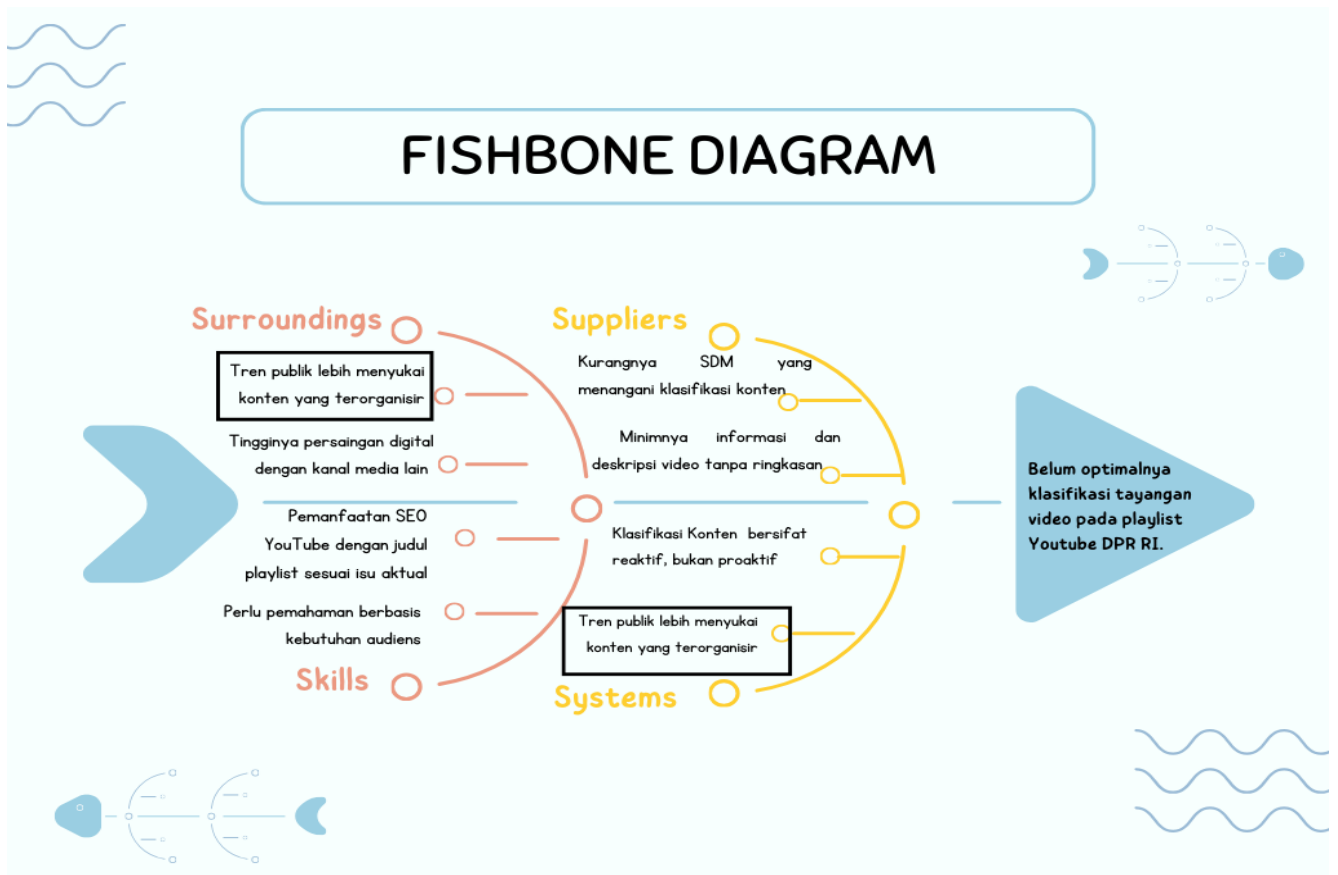
- Keterbatasan jumlah SDM khusus yang menangani kurasi konten digital
- Minimnya informasi dan deskripsi video tanpa ringkasan, sehingga ada kemungkinan konten yang serupa masuk ke *Playlist* berbeda

3. *Skills* (Keterampilan)

- Kurangnya pemahaman tentang strategi kurasi konten digital berbasis kebutuhan audiens
- Pemanfaatan SEO *Youtube* dengan judul *Playlist* sesuai isu aktual

4. *Sistems*

- Tren public yang lebih menyukai konten yang terorganisir tematis, menginginkan akses informasi yang cepat, sederhana, dan mudah dipahami
- Pengelolaan *Playlist* masih bersifat reaktif, bukan proaktif



Tabel 4. Analisis Isu Menggunakan Alat Bantu Fishbone

D. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan hasil analisis isu menggunakan teknik fishbone diagram, faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya klasifikasi produk tayangan pada *Playlist Youtube DPR RI* adalah karena kecenderungan publik lebih menyukai konten yang tersusun secara tematis dan terorganisir. Oleh karena itu, gagasan pemecahan isu yang diangkat dalam kegiatan latsar penulis adalah **Optimalisasi Pembuatan Judul dan Klasifikasi *Playlist* pada *Youtube DPR RI***.

Langkah awal yang dilakukan untuk menyelesaikan isu ini adalah melakukan identifikasi kebutuhan terkait mekanisme penamaan judul *Playlist* dan klasifikasi berdasarkan jenis video yang diunggah. Identifikasi dilakukan melalui diskusi internal atau *focus group discussion* (FGD) bersama mentor dan admin *Youtube DPR RI* saat ini, guna memahami hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses distribusi informasi. Selanjutnya, disusun format untuk judul *Playlist* berdasarkan kategori, jenis video yang dapat diklasifikasikan yang mencakup kategori konten dan waktu unggah

video untuk ditayangkan serta indikator lainnya yang akan disepakati bersama.

Setelah format tersebut disusun, dilakukan pemetaan video berdasarkan waktu upload dan akan dimulai dari video yang terbaru agar proses klasifikasi berjalan dengan maksimal. Proses selanjutnya adalah mulai melakukan klasifikasi video berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dan mulai melakukan distribusi video berdasarkan *Playlist* yang telah dibuat. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi secara berkala guna membandingkan dan melihat apakah klasifikasi tersebut sudah sesuai dengan gagasan utama pemecahan isu.

Selain itu, berdasarkan hasil pengamatan penulis, masih ada *playlist* yang tidak relevan seperti Paripurna DPR RI yang hanya berisi 1 video, sehingga tidak mencerminkan representasi kegiatan sebenarnya. Selain itu juga ada judul *playlist* yang bersifat periodikal seperti “Berkah Ramadhan”, sementara video-video yang rutin diunggah seperti video hasil liputan, justru belum masuk dalam klasifikasi.

Dan berdasarkan hasil seminar rancangan aktualisasi serta masukan dari penguji, rancangan ini mengadaptasi prinsip 3T yaitu, Terukur, Teruji dan Terbukti manfaat. Aspek terukur terlihat dari indikator peningkatan jumlah penonton & jumlah video dalam *playlist*, aspek teruji dapat dilihat dengan melalui evaluasi berkala setiap 3 bulan untuk melihat efektivitas klasifikasi, apakah ada peningkatan interaktifitas dan sentimen positif. Serta untuk aspek terbukti bermanfaat dapat dilihat dari indikator peningkatan *Subscriber* dan *SEO* melalui seberapa sering konten DPR RI direkomendasikan oleh *Youtube*.

Untuk menjaga konsistensi, penamaan *playlist* perlu mengikuti *ISO Document Naming Convention*, dengan format yang singkat dan jelas mencakup jenis kegiatan, tanggal/bulan/tahun, dan kode unik singkat, misalnya: *Paripurna_DPRRI_2025*, *Rapat_KomisilX_2025*. Selain itu, jumlah klasifikasi yang ideal ditetapkan pada 5-10 kategori, yaitu Sidang Paripurna, Rapat AKD, Kegiatan Reses & Suara Dapil, serta Berita Harian DPR RI. Jumlah ini dinilai cukup untuk mencakup seluruh kegiatan sekaligus tetap sederhana agar mudah dipahami audiens.

Melalui penerapan klasifikasi *Playlist* ini, diharapkan proses pengelolaan media sosial DPR RI khususnya pada kanal *Youtube* resmi DPR RI dapat lebih sistematis dan tersusun dengan rapi. Dan menghindari adanya tumpang tindih konten seperti video yang sama tapi masuk kedalam beberapa *Playlist*, hal ini diharapkan membantu menjaga konsistensi narasi kelembagaan DPR RI di ruang public, khususnya di ranah digital dan langkah ini diharapkan dapat memperkuat citra positif DPR RI, serta

memastikan pesan-pesan strategis tersampaikan dengan tepat sasaran kepada Masyarakat.

BAB IV

RANCANGAN AKTUALISASI

A. Matriks Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja : Biro Pemberitaan Parlemen

Identifikasi Isu : 1. Belum adanya penerapan sistem monitoring dan evaluasi hasil liputan tim media social
2. Belum adanya standarisasi acuan untuk membalas komentar di Instagram DPR RI
3. Belum optimalnya klasifikasi produk tayangan video pada *Playlist Youtube* DPR RI

Isu yang Diangkat : Belum optimalnya klasifikasi produk tayangan video pada *Playlist Youtube* DPR RI
Gagasan Pemecahan Isu : Membuat Penyusunan Klasifikasi dan Penetapan Judul *Playlist* pada *Youtube* DPR RI

Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output / Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-nilai Dasar ASN BerAkhlak	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Persiapan awal untuk merumuskan rencana kegiatan.	1.Diskusi dengan mentor terkait isu terpilih.	Notulensi hasil diskusi dengan mentor.	Kolaboratif : bekerja sama dengan mentor untuk menentukan isu yang relevan. Harmonis : koordinasi yang dilakukan bersama dengan mentor menunjukkan keharmonisan tim	Integritas bersikap benar, menyusun perencanaan sesuai kompetensi.	Mendukung <i>Misi DPR RI</i> melalui perencanaan yang sistematis sebagai bagian dari tata kelola kelembagaan yang dinamis.

		2.Menyusun hasil diskusi dengan mentor terkait isu yang dipilih.	Dokumen ringkasan hasil diskusi.	Akuntabel: menyusun hasil diskusi secara tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan.	Integritas mendokumentasikan hasil diskusi secara benar dan kompeten.	Kontribusi pada <i>Visi DPR RI</i> dengan memastikan perencanaan kegiatan lebih akuntabel.
		3.Mempelajari dan mencatat data yang relevan dengan isu hasil diskusi.	Notulensi Hasil Diskusi.	Kompeten: meningkatkan pengetahuan dengan mengkaji data yang relevan.	IT & Multilingual, Berwawasan Global menggunakan teknologi untuk pengumpulan data dan memahami isu dari perspektif luas.	Mendukung <i>Misi DPR RI</i> dengan menyiapkan dasar informasi agar fungsi publikasi DPR RI berjalan lebih efektif.
2.	Identifikasi kebutuhan klasifikasi Pembuatan <i>Playlist</i>	1.Diskusi dengan admin <i>Youtube</i> DPR terkait list program dan jenis video	Notulen list daftar program <i>Youtube</i> DPR RI	Kolaboratif: bekerja sama dengan tim.	Jejaring Luas membangun jejaring profesional.	Mendukung <i>Misi DPR RI</i> dengan membangun tata kelola kelembagaan yang kolaboratif dan dinamis.
		2.Mengumpulkan data dan indikator <i>Playlist</i>	Daftar temuan masalah pada <i>Playlist</i> .	Kompeten: melakukan analisis detail.	IT & Multilingual, Berwawasan Global menggunakan teknologi, memahami perkembangan konten global.	Mendukung <i>Misi DPR RI</i> melalui penyediaan data yang akurat untuk mendukung kedaulatan rakyat dalam memperoleh informasi.
		3.Diskusi bersama mentor untuk menentukan kebutuhan perbaikan klasifikasi.	Dokumen kebutuhan klasifikasi.	Adaptif: menyesuaikan dengan kebutuhan publik Kolaboratif: bekerja sama dengan tim.	Integritas & Profesional menentukan kebutuhan dengan benar sesuai kompeten.	Mendukung <i>Visi DPR RI</i> dengan menyusun sistem publikasi yang modern dan responsif terhadap kebutuhan publik.
3.	Penyusunan Klasifikasi Pembuatan Judul <i>Playlist</i>	1.Benchmarking dengan media/channel eksternal.	Notulen Threshold hasil benchmarking.	Kompeten: belajar dari praktik terbaik pihak eksternal.	Berwawasan Global & Jejaring Luas belajar dari praktik terbaik dan memperluas jejaring profesional.	Mendukung <i>Visi DPR RI</i> agar menjadi lembaga modern dan aspiratif dengan mengadopsi praktik terbaik.
		2.Membuat draft standar klasifikasi.	Draft standar klasifikasi <i>Playlist</i> .	Kompeten: menyusun konsep klasifikasi baru.	Profesional & Entrepreneurship	Kontribusi pada <i>Misi DPR RI</i> dengan

					menyusun standar yang sistematis dan melihat peluang perbaikan.	menciptakan tata kelola konten yang lebih dinamis.
		3.Diskusi bersama mentor terkait draft standar.	Notulen perbaikan klasifikasi.	Kolaboratif: berkoordinasi dengan mentor dalam penyempurnaan.	Profesional & jejaring luas berdiskusi dan menyempurnakan kompetensi.	Mendukung <i>Visi DPR RI</i> dengan menjaga agar klasifikasi tetap akuntabel dan responsif.
		4.Menyusun standar final klasifikasi <i>Playlist</i> .	Dokumen Standar Final Klasifikasi.	Akuntabel: menyusun standar yang dapat dipertanggungjawabkan.	Integritas & Profesional menetapkan standar yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.	Mendukung <i>Misi DPR RI</i> dengan menghasilkan pedoman resmi yang memperkuat tata kelola kelembagaan.
4.	Implementasi Klasifikasi <i>Playlist Youtube</i>	1.Membuat <i>Playlist-Playlist</i> terbaru.	<i>Playlist</i> baru yang sesuai standar.	Berorientasi Pelayanan: menghadirkan <i>Playlist</i> yang memudahkan publik.	Profesional & Entrepreneurship menghasilkan <i>Playlist</i> baru dengan kompetensi dan inovasi perbaikan.	Mendukung <i>Misi DPR RI</i> dengan menyajikan informasi yang efektif, aspiratif, dan mudah diakses rakyat.
		2.:Pengelompokan video berdasarkan jenis <i>Playlist</i> .	Video yang dikelompokkan sesuai klasifikasi.	Kompeten: teliti dalam pengelompokan konten. Loyal: komitmen untuk menjaga citra lembaga melalui pengelolaan konten publik yang profesional dan bertanggung jawab	IT & Multilingual, Profesional menggunakan teknologi digital, menyusun <i>Playlist</i> sesuai standar kompetensi.	Mendukung <i>Visi DPR RI</i> dengan penyajian informasi yang lebih substansial dan modern.
		3.Diskusi bersama mentor terkait perbaikan klasifikasi.	Notulen hasil diskusi implementasi.	Kolaboratif: terbuka pada masukan perbaikan.	Integritas berdiskusi dengan ramah, menerima masukan.	Mendukung <i>Misi DPR RI</i> dengan memperkuat tata kelola organisasi yang adaptif.
		4.Memperbaiki klasifikasi pada <i>Playlist</i> .	Perbaikan Klasifikasi <i>Playlist</i> .	Akuntabel: hasil implementasi diperbaiki secara bertanggung jawab. Adaptif: terbuka untuk setiap perubahan yang mungkin terjadi	Entrepreneurship, Profesional melihat peluang perbaikan dan menyelesaikan sesuai kompetensi.	Mendukung <i>Visi DPR RI</i> dengan menghadirkan publikasi yang lebih responsif dan akuntabel.

5	Evaluasi Hasil Penyusunan Klasifikasi Pembuatan Judul <i>Playlist</i>	1.Evaluasi bersama mentor terkait hasil implementasi.	Notulen hasil Evaluasi.	Akuntabel: mengevaluasi hasil kerja dengan jujur.	Integritas, Profesional, objektif, sesuai kompetensi.	Mendukung <i>Misi DPR RI</i> dengan melakukan evaluasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang dinamis.
		2.Menyiapkan draft format evaluasi.	Draft format lembar evaluasi.	Kompeten: menyusun draft evaluasi yang sesuai.	Profesional membuat instrumen evaluasi secara kompeten.	Mendukung <i>Visi DPR RI</i> dengan menyediakan instrumen akuntabel untuk menilai efektivitas publikasi.
		3.Menyusun hasil evaluasi penyusunan klasifikasi pembuatan judul <i>Playlist</i> .	Laporan evaluasi hasil penyusunan klasifikasi pembuatan judul <i>Playlist</i> .	Akuntabel: laporan evaluasi tertulis dan resmi. Kompeten: menyusun laporan berdasarkan dengan data.	Integritas, Profesional laporan evaluasi disusun secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan	Mendukung <i>Misi DPR RI</i> dengan menghasilkan laporan yang memperkuat fungsi DPR RI serta tata kelola kelembagaan yang transparan.

Tabel 5. Matriks Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

B. Jadwal Rencana Kegiatan

Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	SEPTEMBER				OKTOBER			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Persiapan Awal								
a) Diskusi dengan mentor terkait isu terpilih								
b) Menyusun hasil diskusi dengan mentor terkait isu yang dipilih								
c) Mempelajari dan mencatat data yang relevan dengan isu hasil diskusi								
Identifikasi kebutuhan klasifikasi								
a) Diskusi dengan admin <i>Youtube</i> DPR terkait list program dan jenis video								
b) Mengumpulkan data dan indikator <i>Playlist</i>								
c) Diskusi bersama mentor untuk menentukan kebutuhan perbaikan klasifikasi								
Penyusunan Klasifikasi Pembuatan Judul <i>Playlist</i>								
a) Benchmarking dengan media mainstream								
b) Membuat draft standar klasifikasi dan diskusi bersama mentor terkait draft standar								
c) Menyusun standar final klasifikasi <i>Playlist</i>								
Implementasi Klasifikasi <i>Playlist Youtube</i>								
a) Membuat <i>Playlist-Playlist</i> terbaru								
b) Pengelompokan video berdasarkan jenis <i>Playlist</i>								
c) Diskusi bersama mentor terkait perbaikan klasifikasi								
d) Memperbaiki klasifikasi pada <i>Playlist</i>								
Evaluasi Hasil Penyusunan Klasifikasi Pembuatan Judul								
a) Evaluasi bersama mentor terkait hasil implementasi								
b) Menyiapkan draft format evaluasi								
c) Menyusun hasil evaluasi penyusunan klasifikasi pembuatan judul <i>Playlist</i>								

Tabel 6. Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

BAB V

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

Pelaksanaan kegiatan aktualisasi berjudul **“Optimalisasi Pembuatan Judul dan Klasifikasi Playlist pada YouTube DPR RI”** berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan selama masa habituasi, dengan durasi sekitar satu bulan. Seluruh tahapan kegiatan mulai dari tahap persiapan, identifikasi kebutuhan klasifikasi, penyusunan sistem penamaan playlist, implementasi pembuatan playlist, hingga evaluasi akhir — terlaksana dengan baik sesuai rencana dan mendapat dukungan penuh dari mentor serta rekan kerja di Subbagian Media Sosial.

Secara keseluruhan, kegiatan aktualisasi ini berhasil dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target yang diharapkan. Hal ini dikarenakan pelaksanaannya telah mengikuti arahan mentor dan redaktur, yaitu dengan fokus pada pengelompokan video-video baru yang belum memiliki playlist tanpa perlu melakukan perubahan terhadap data playlist yang sudah tersedia.

Matrik Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	SEPTEMBER				OKTOBER			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Persiapan Awal								
a) Diskusi dengan mentor terkait isu terpilih								
b) Menyusun hasil diskusi dengan mentor terkait isu yang dipilih								
c) Mempelajari dan mencatat data yang relevan dengan isu hasil diskusi								
Identifikasi kebutuhan klasifikasi								
a) Diskusi dengan admin <i>Youtube</i> DPR terkait list program dan jenis video								
b) Mengumpulkan data dan indikator <i>Playlist</i>								
c) Diskusi bersama mentor untuk menentukan kebutuhan perbaikan klasifikasi								
Penyusunan Klasifikasi Pembuatan Judul <i>Playlist</i>								
a) Benchmarking dengan media mainstream								
b) Membuat draft standar klasifikasi dan diskusi bersama mentor terkait draft standar								
c) Menyusun standar final klasifikasi <i>Playlist</i>								
Implementasi Klasifikasi <i>Playlist Youtube</i>								

a) Membuat <i>Playlist-Playlist</i> terbaru								
b) Pengelompokan video berdasarkan jenis <i>Playlist</i>								
c) Diskusi bersama mentor terkait perbaikan klasifikasi								
d) Memperbaiki klasifikasi pada <i>Playlist</i>								
Evaluasi Hasil Penyusunan Klasifikasi Pembuatan Judul								
a) Evaluasi bersama mentor terkait hasil implementasi								
b) Menyiapkan draft format evaluasi								
c) Menyusun hasil evaluasi penyusunan klasifikasi pembuatan judul <i>Playlist</i>								

Tabel 7. Matrik Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aktualisasi

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Bagian ini, penulis menjabarkan secara sistematis proses pelaksanaan kegiatan aktualisasi mulai dari tahap persiapan awal, identifikasi, penyusunan klasifikasi, implementasi pembuatan playlist hingga evaluasi akhir. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan kegiatan berjalan terencana, terukur, dan berorientasi hasil. Tahap persiapan difokuskan pada perencanaan dan koordinasi teknis untuk menjamin kesiapan secara waktu dan menentukan skala prioritas. Tahap identifikasi digunakan untuk mengumpulkan data-data video yang diklasifikasikan. Tahap penyusunan klasifikasi bertujuan untuk menentukan aspek penamaan playlist terbaru yang sudah dibuat. Lalu tahap pelaksanaan berisi implementasi pembuatan playlist dan klasifikasi video dari tahapan sebelumnya yang telah ditetapkan dan yang terakhir tahap evaluasi berfungsi menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak kegiatan sebagai dasar penyusunan rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

Dengan adanya penjabaran tahapan kegiatan ini, proses aktualisasi dapat terdokumentasi dengan jelas dan dapat menjadi acuan dalam pengelolaan konten media sosial berikutnya.

1. Persiapan awal untuk merumuskan rencana kegiatan

a) Diskusi dengan mentor terkait isu terpilih



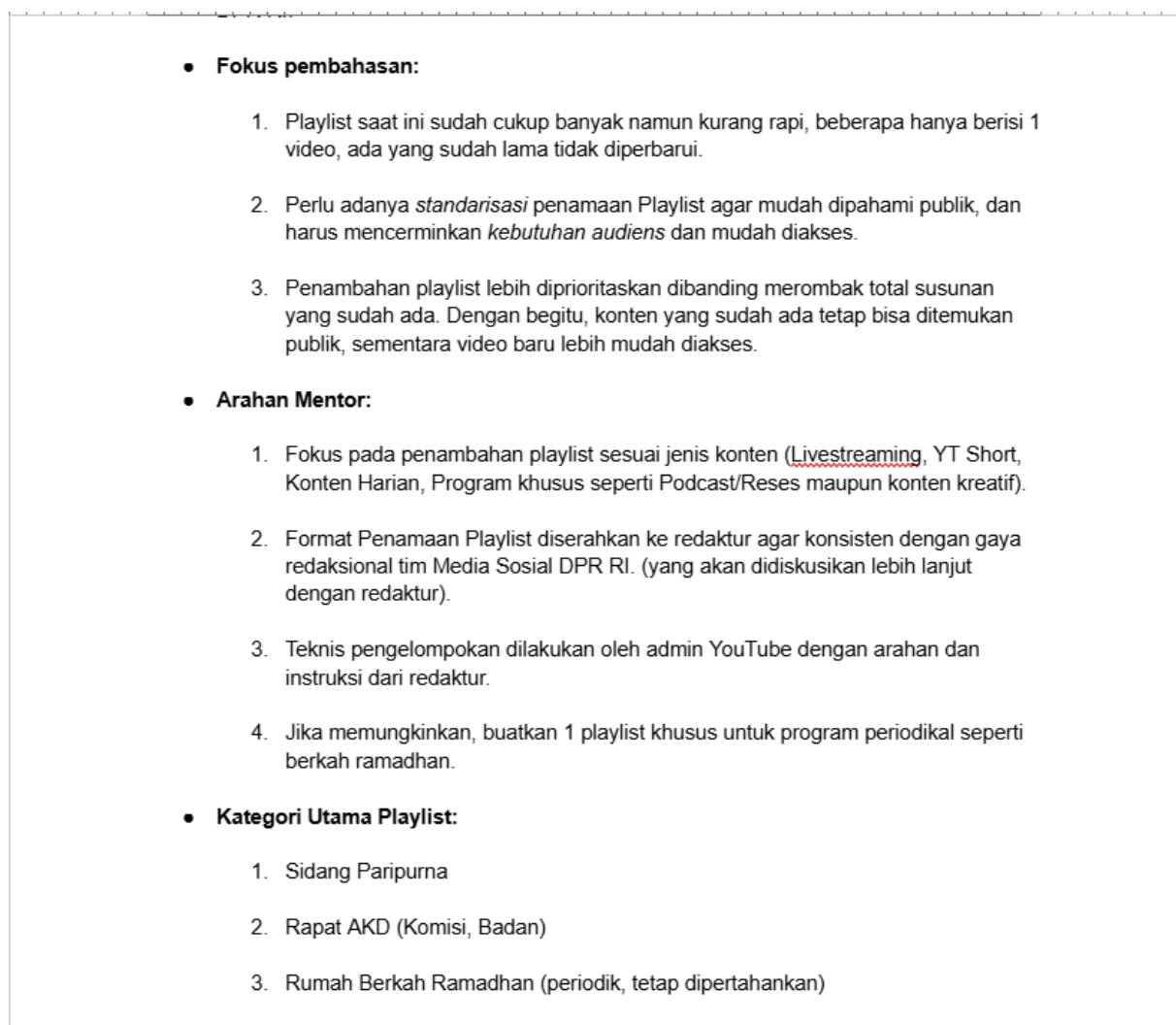
Gambar 6. Foto saat penulis berdiskusi dengan mentor

Setelah melakukan seminar rancangan aktualisasi, penulis bertemu dengan mentor agar mendapatkan arahan mengenai proses pelaksanaan aktualisasi, kegiatan ini merupakan langkah awal dalam proses aktualisasi yang bertujuan untuk memastikan adanya struktur kerja yang jelas dan terarah dalam proses penyusunan dan pembuatan playlist.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, penulis menerapkan nilai **kolaboratif** dengan berkoordinasi secara aktif bersama mentor untuk memastikan setiap langkah penyusunan playlist berjalan efektif dan terarah. Nilai **harmonis** juga tercermin melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghargai, sehingga tercipta kerja sama yang solid dan suasana kerja yang mendukung keberhasilan kegiatan aktualisasi.

Pada kegiatan ini menunjukkan penerapan prinsip Smart ASN melalui aspek **integritas** sebagai ASN yang jujur, bertanggung jawab, dan konsisten antara pikiran, perkataan, serta tindakan. Dalam proses perencanaan, peserta menggunakan kemampuan berpikir analitis dan strategis untuk menyusun rencana kegiatan yang relevan dengan tugas jabatan dan kebutuhan instansi, serta melibatkan koordinasi dengan mentor dan pihak terkait secara terbuka dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen ASN dalam fungsi **perencanaan kinerja (planning)** yang menekankan perumusan kegiatan secara terukur, realistis, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga setiap langkah yang diambil memiliki dasar etika dan profesionalisme yang kuat.

b) Menyusun hasil diskusi dengan mentor terkait isu yang dipilih



Gambar 7. Tangkapan layar hasil diskusi dengan mentor

Lalu penulis juga menyusun hasil diskusi tersebut dan sudah dilaporkan pada kegiatan minggu ke-1, dan keadaan saat ini playlist kurang terstruktur dan menyulitkan audiens dalam menemukan konten yang relevan. Dari temuan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa diperlukan adanya

standarisasi penamaan playlist agar lebih mudah dipahami publik serta mencerminkan kebutuhan audiens yang beragam. Playlist yang terstruktur dengan baik diharapkan dapat meningkatkan kemudahan akses informasi dan profesionalitas tampilan kanal.

Mentor juga memberikan arahan agar fokus utama diarahkan pada **penambahan playlist baru** berdasarkan jenis konten yang telah tersedia, tanpa harus merombak total susunan playlist lama. Hal ini bertujuan agar video yang sudah terklasifikasi tetap dapat ditemukan publik, sementara video baru dapat ditata secara lebih efektif.

Untuk menjaga konsistensi redaksional, format penamaan playlist harus didiskusikan terlebih dahulu ke redaktur tim media sosial DPR RI, sedangkan teknis pengelompokan konten dilaksanakan oleh admin kanal YouTube berdasarkan pedoman dan arahan yang telah disepakati dan diarahkan untuk menyusun draft klasifikasi playlist yang berisi standar format penamaan dan pengelompokan video berdasarkan kategori konten.

Kegiatan ini masuk dalam aspek **akuntabel**, penulis menunjukkan tanggung jawab yang jelas terhadap hasil diskusi dan tindak lanjut kegiatan dengan menyusun laporan pelaksanaan pada minggu pertama sebagai bentuk dokumentasi yang transparan.

Kegiatan ini menerapkan prinsip Smart ASN melalui kemampuan berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif untuk menghasilkan kesepahaman terhadap isu aktual yang akan dijadikan dasar kegiatan aktualisasi. Nilai **integritas** tercermin dari sikap jujur, objektif, dan bertanggung jawab dalam mendokumentasikan hasil diskusi secara benar. Kegiatan ini juga menunjukkan aspek **kompetensi**, di mana peserta mampu mengelola informasi, menyusun notulensi, serta menafsirkan hasil diskusi secara sistematis dan profesional. Proses ini sejalan dengan prinsip manajemen ASN dalam hal pengambilan keputusan berbasis data dan akuntabilitas, sehingga hasil diskusi dapat menjadi dasar perencanaan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

c) Mempelajari dan mencatat data yang relevan dengan isu hasil diskusi

- **Tugas Teknis:**
 1. Redaktur: Menentukan format penamaan playlist.
 2. Admin: Melaksanakan pengelompokan konten sesuai pedoman.
- **Rencana Tindak Lanjut:**
 1. Menyusun draft pedoman klasifikasi playlist.
 2. Melakukan uji coba pada sebagian video terbaru.

3. Mempelajari dan Mencatat Data Relevan

Data YouTube DPR RI (per September 2025):

- Subscriber: ± 284 ribu.
- Total video: ± 23 ribu.
- Playlist tersedia: 162 (namun banyak yang tidak aktif diperbarui).
- Playlist terakhir diperbarui: ± 5 bulan lalu.
- Contoh playlist tidak optimal:
 - **Paripurna DPR RI**: hanya berisi 1 video.
 - Playlist **Berkah Ramadhan**: masih ada, tetapi konten periodikal.
- Jenis konten yang rutin diunggah:
 - Liputan harian (berita pendek).
 - Siaran langsung sidang.

Gambar 8. Tangkapan layar catatan data sesuai hasil diskusi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan terhadap kanal YouTube DPR RI pada bulan September 2025, diperoleh gambaran bahwa kanal ini telah memiliki sekitar 284 ribu subscriber dengan total konten video mencapai lebih dari 23 ribu unggahan. Jumlah tersebut menunjukkan tingginya aktivitas publikasi yang dilakukan oleh tim media sosial DPR RI. Namun, dari total video yang ada, pengelompokan konten melalui playlist masih belum optimal. Saat ini tercatat terdapat 162 playlist aktif, tetapi sebagian besar di antaranya sudah lama tidak diperbarui, dengan pembaruan terakhir tercatat sekitar 6-7 bulan yang lalu. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kanal memiliki jumlah konten yang besar, sistem klasifikasi dan pembaruan playlist masih perlu diperkuat agar penyajian konten lebih terstruktur dan mudah diakses oleh masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan langkah optimalisasi berupa standarisasi penamaan playlist agar lebih mudah dipahami publik dan selaras dengan karakteristik konten yang diunggah. Misalnya dengan format nama seperti “Paripurna DPR 2025” atau “Komisi IX 2025” yang menampilkan identitas kegiatan secara jelas dan kronologis. Selain itu, fokus pengembangan diarahkan pada penambahan playlist untuk konten harian, dan shorts agar kanal terlihat lebih dinamis dan selalu diperbaharui. Langkah penting berikutnya adalah mengidentifikasi jumlah video yang belum tergabung dalam playlist mana pun, agar proses klasifikasi dapat dilakukan secara menyeluruh dan memastikan setiap konten memiliki wadah yang sesuai dalam sistem playlist yang baru.

Dalam kegiatan ini mencerminkan nilai BERAHLAK yaitu **kompeten**, penulis menunjukkan kemampuan analitis dan profesionalisme dalam mengidentifikasi permasalahan serta merumuskan solusi yang relevan terhadap pengelolaan kanal YouTube DPR RI. Melalui observasi mendalam terhadap data kanal, penulis mampu membaca pola aktivitas unggahan,

menilai efektivitas playlist yang ada, serta mengusulkan langkah konkret berupa standarisasi penamaan dan klasifikasi konten. Pendekatan ini menggambarkan penerapan pengetahuan dan keterampilan secara tepat guna untuk meningkatkan keteraturan sistem penyajian konten digital.

Selain itu, kegiatan ini juga menunjukkan penerapan nilai **Smart ASN** terutama dalam aspek IT & Multilingual serta berwawasan global. Peserta memanfaatkan teknologi informasi secara optimal untuk melakukan pengumpulan, pencatatan, dan analisis data yang berkaitan dengan isu yang telah disepakati bersama mentor. Dalam perspektif **manajemen ASN**, kegiatan mempelajari dan mencatat data yang relevan dengan isu hasil diskusi merupakan penerapan fungsi pengelolaan informasi dan perencanaan berbasis data (*evidence-based planning*). Melalui kegiatan ini, peserta Latsar menunjukkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis data sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang rasional dan terukur.

2. Identifikasi kebutuhan klasifikasi Pembuatan Playlist

- a) Diskusi dengan redaktur/admin Youtube DPR terkait list program dan jenis video



Gambar 9. Foto penulis berdiskusi dengan redaktur tim media sosial

Pada kegiatan minggu ke 2, penulis bertemu dan berdiskusi dengan Mas Singgih selaku redaktur tim medsos DPR RI dan admin youtube yang sudah membuat playlist lama sejak tahun 2000, untuk identifikasi kebutuhan penulis dalam melaksanakan aktualisasi ini dan disepakati bahwa penyusunan klasifikasi playlist terbaru pada kanal YouTube DPR RI tidak dilakukan dengan cara merombak playlist lama yang berjumlah 162. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa struktur playlist yang ada masih relevan dan cukup stabil, baik dari sisi format penamaan maupun alur unggahan. Perubahan besar justru berpotensi mengganggu keteraturan yang telah terbentuk, terutama dalam menjaga performa algoritma YouTube serta konsistensi tampilan kanal di mata publik. Karena itu, fokus diarahkan pada pembuatan playlist-playlist terbaru.

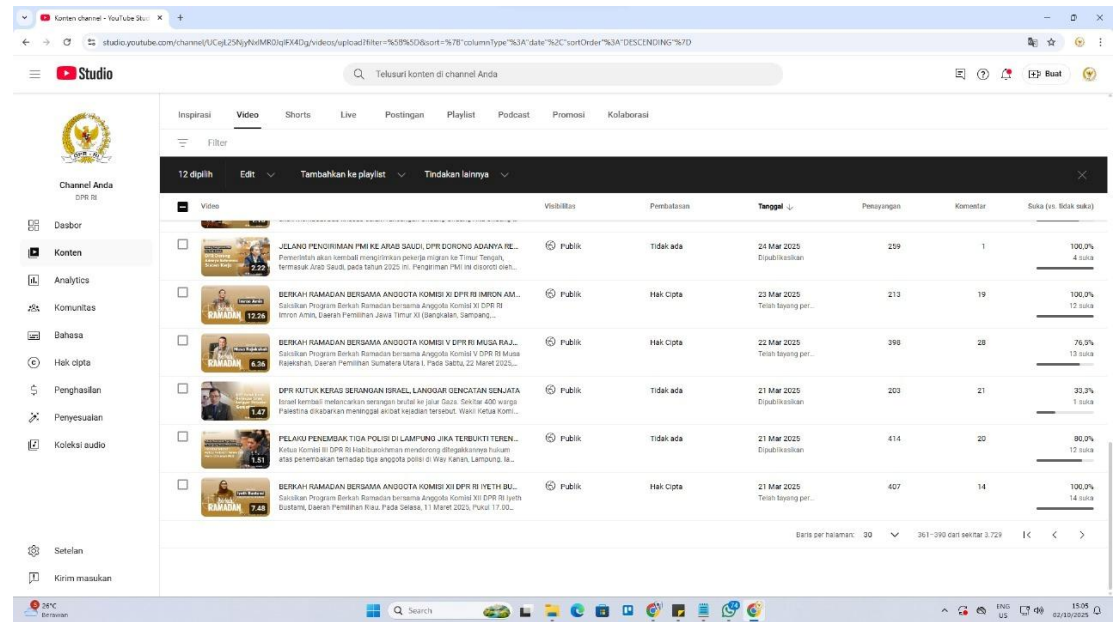
Dalam proses ini, nilai **Kolaboratif** menjadi landasan utama. Penulis bekerja sama secara aktif dengan mentor, redaktur/ admin kanal YouTube untuk menyepakati format serta arah pengembangan playlist. Melalui diskusi bersama, diputuskan format penamaan baru yang lebih sistematis menggunakan angka Romawi dan tahun, seperti “Komisi I 2025” atau “BKSAP 2025 DPR RI”. Pendekatan ini dihasilkan dari kolaborasi lintas peran, di mana setiap pihak berkontribusi sesuai tanggung jawabnya redaktur memastikan konsistensi gaya redaksional, sementara admin bertugas mengimplementasikan struktur yang telah disepakati.

Pada kegiatan ini, penulis menerapkan prinsip Smart ASN dalam aspek Jejaring Luas (Networking) dengan membangun komunikasi dan kolaborasi profesional lintas unit kerja. Melalui diskusi ini, peserta menunjukkan kemampuan menjalin hubungan kerja yang produktif, saling menghargai peran, dan terbuka terhadap masukan demi terciptanya kesepahaman mengenai klasifikasi serta pengelolaan konten video yang lebih efektif. Kegiatan ini juga mencerminkan penerapan prinsip manajemen ASN dalam hal koordinasi dan sinergi antarpegawai, di mana kolaborasi menjadi kunci untuk menghasilkan inovasi yang mendukung peningkatan kualitas layanan publik.

b) Mengumpulkan data dan indikator Playlist

Data Dan Indikator Playlist

Data	Jumlah
Jumlah Playlist saat ini	162
Total Video	434
Indikator	Kegiatan AKD, Konten Kreatif , Konten Liputan Harian, Youtube Short dan Kegiatan Formal Kenegaraan



Gambar 10. Tangkapan layar data dan indikator playlist

Data tersebut diambil berdasarkan pengamatan penulis melalui dashboard Youtube DPR RI sesuai dengan video terakhir yang masuk ke playlist pada Maret 2025, sehingga dapat dipastikan video yang diunggah melewati tanggal tersebut belum masuk ke playlist, sehingga harus dibuatkan playlist terbaru. Dan data-data tersebut sudah dijadikan acuan dalam kegiatan aktualisasi ini dalam pembuatan playlist terbaru sesuai hasil diskusi dengan mentor dan redaktur.

Dengan rincian sebagai berikut:

- Total Video lanscape: 434 video (data perminggu kedua)
- Video Short: 30 Video

Kegiatan ini mencerminkan nilai **Kompeten**, karena penulis mampu melakukan analisis secara detail melalui pengamatan langsung pada dashboard YouTube DPR RI. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa video terakhir yang masuk ke playlist tercatat pada Maret 2025, sehingga seluruh video yang diunggah setelahnya belum terklasifikasi dan perlu dibuatkan playlist baru agar pengelolaan konten tetap teratur dan mudah diakses.

Dan kegiatan ini juga mencerminkan prinsip **Smart ASN** dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mencari dan menganalisis data terkait playlist YouTube DPR RI. Peserta juga menunjukkan wawasan global dengan membandingkan perkembangan dan tren konten dari berbagai sumber agar hasil yang diperoleh lebih relevan dan berkualitas. Kegiatan ini mencerminkan penerapan **manajemen ASN berbasis data dan teknologi**, di mana setiap keputusan disusun secara objektif, efisien, dan mendukung peningkatan kualitas pengelolaan konten lembaga.

c) Diskusi bersama mentor untuk menentukan kebutuhan perbaikan klasifikasi

		KOMISI I	KOMISI II	KOMISI III	KOMISI IV	KOMISI V	KOMISI VI	KOMISI VII	KOMISI VIII	KOMISI IX
1	N									
2	1	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...
3	2	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...
4	3	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...
5	4	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...
6	5	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...
7	6	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...
8	7	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...
9	8	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...
10	9	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...
11	10	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...
12	11	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...
13	12	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...	https://www.youtube.com/watch?v=...

Gambar 11. data dan link video yang belum masuk dalam playlist

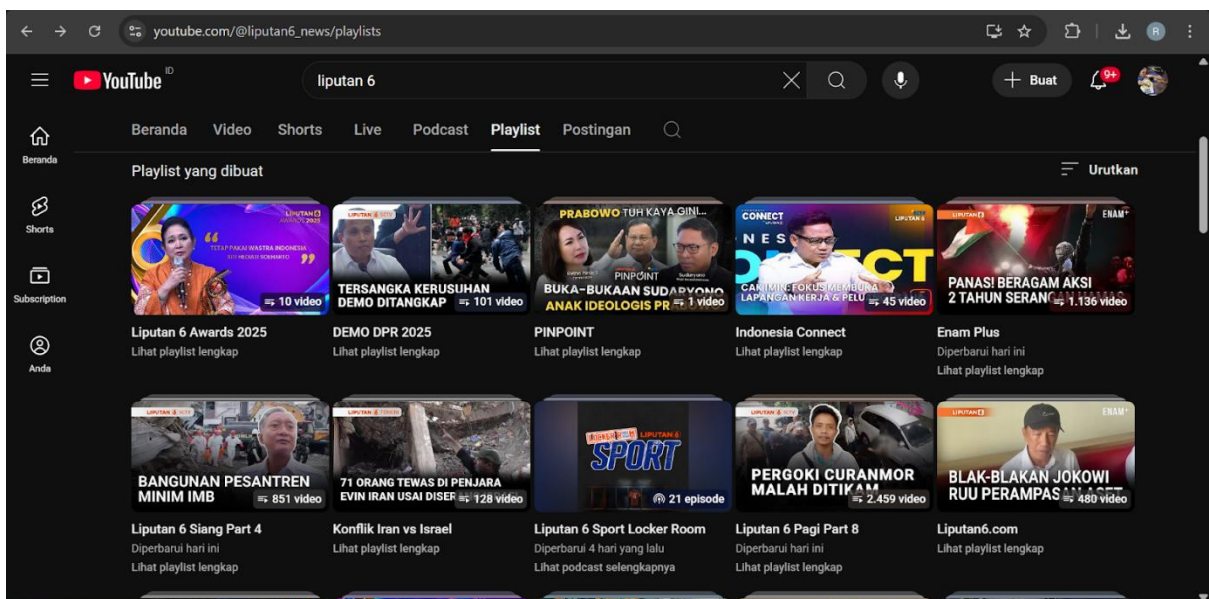
Setelah melakukan pertemuan dengan redaktur tim media sosial DPR RI, penulis melanjutkan diskusi dengan mentor untuk membahas hasil temuan serta data dan indikator dari kegiatan sebelumnya. Dari pembahasan tersebut, diperoleh kesepakatan bahwa perbaikan klasifikasi playlist YouTube DPR RI perlu difokuskan pada video-video yang belum masuk ke dalam playlist, dengan penamaan yang lebih jelas dan spesifik sesuai AKD serta tahun kegiatan agar memudahkan publik dalam menelusuri konten. Playlist yang sudah ada tidak perlu dirombak, melainkan diklasifikasi kembali khususnya untuk video yang belum memiliki playlist dan didasarkan pada nama-nama Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan jenis program atau konten video, termasuk konten kreatif yang terus berkembang.

Kegiatan ini mencerminkan nilai **Adaptif**, karena penulis mampu menyesuaikan konsep klasifikasi dengan kebutuhan publik yang beragam, serta nilai **Kolaboratif**, karena seluruh proses dilakukan melalui kerja sama aktif antara mentor, redaktur, dan admin kanal dalam menyusun

sistem klasifikasi yang lebih relevan dan responsif terhadap perkembangan konten. Dan prinsip **Smart ASN** melalui nilai **integritas, profesionalisme, dan kompetensi** dengan bersikap jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam menentukan langkah perbaikan yang sesuai kebutuhan. Peserta menggunakan kemampuan analitis dan komunikasi yang efektif untuk memastikan hasil diskusi sejalan dengan tujuan organisasi. Dari sisi **manajemen ASN**, kegiatan ini mencerminkan penerapan fungsi **evaluasi dan perencanaan pengembangan kinerja**, di mana setiap keputusan didasarkan pada data, masukan yang valid, serta prinsip akuntabilitas.

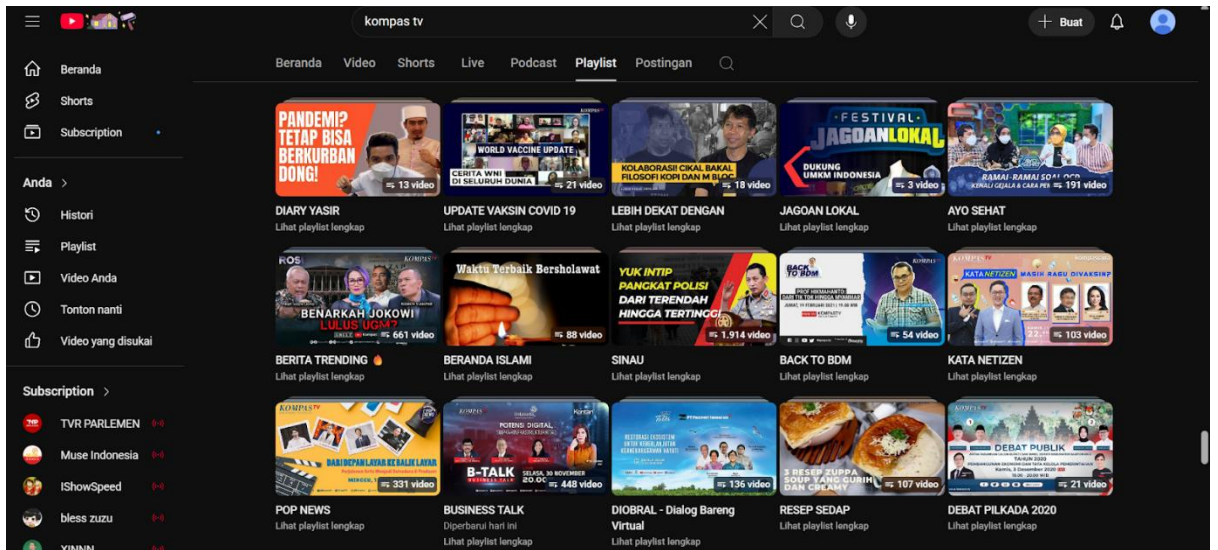
3. Penyusunan Klasifikasi Pembuatan Judul Playlist

a) Benchmarking dengan media/channel eksternal



Gambar 12. Tangkapan layar hasil benchmarking dengan liputan 6

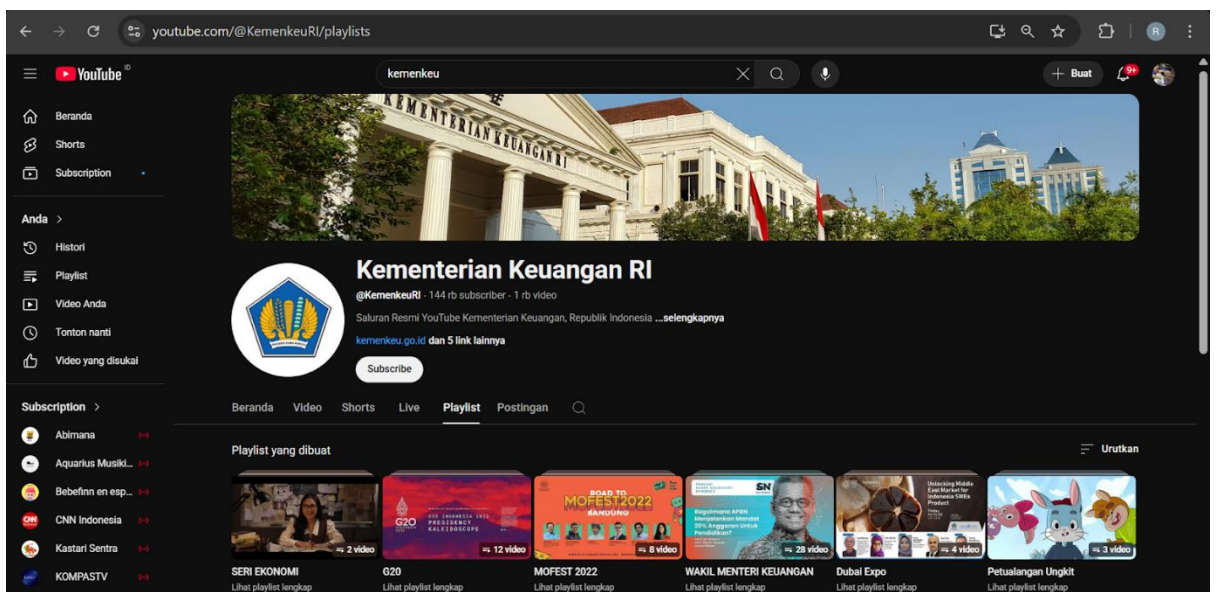
Pada kegiatan minggu ke-3, penulis melakukan benchmarking beberapa media eksternal dan kanal kementerian/lembaga lain, benchmarking pertama dengan melihat pada kanal Youtube Liputan 6 SCTV, berdasarkan hasil benchmarking yang diketahui bahwa pengelompokan playlist pada kanal tersebut dibagi berdasarkan jenis berita seperti olahraga, politik, kriminal, berita luar negeri, serta segmen program seperti Liputan 6 Siang dan Liputan 6 Pagi. Pola klasifikasi yang sistematis tersebut menjadi acuan dalam penyusunan strategi pengelolaan playlist pada kanal YouTube DPR RI. Dengan menerapkan pola serupa, playlist dapat dikategorikan berdasarkan masing-masing komisi, Alat Kelengkapan Dewan (AKD), maupun kegiatan Kesenjangan DPR RI. Melalui penerapan klasifikasi ini, kanal YouTube DPR RI diharapkan tersusun secara lebih informatif dan terstruktur, sehingga publik dapat mengakses informasi yang dibutuhkan dengan lebih mudah, cepat, dan sesuai konteks kegiatan lembaga.



Gambar 13. Tangkapan layar hasil benchmarking dengan Kompas TV

Hal serupa juga penulis temui saat melalui benchmarking ke kanal Youtube Kompas TV, menunjukkan bahwa kanal tersebut menyusun playlist berdasarkan tema program acara, seperti *Diary Yasir*, *Update Vaksin Covid-19*, *Ayo Sehat*, *Beranda Islami*, hingga *Debat Pilkada 2020*. Pola penyusunan playlist tematik ini menjadi salah satu referensi yang relevan bagi pengelolaan kanal YouTube DPR RI, karena mampu mengelompokkan konten secara lebih menarik dan mudah diakses oleh audiens sesuai minatnya.

Pendekatan serupa sebenarnya telah diterapkan pada kanal YouTube DPR RI melalui beberapa program seperti Podcast Parlemen, Parlemen Bicara, dan Suara Dapil. Namun, beberapa program tersebut kini sudah jarang diperbarui atau tidak lagi diproduksi secara rutin. Oleh karena itu, fokus pengembangan selanjutnya diarahkan pada penguatan playlist yang menonjolkan substansi kelembagaan dan kegiatan resmi DPR RI, agar kanal tetap relevan, informatif, dan mencerminkan fungsi serta peran institusi secara berkelanjutan.



Gambar 14. Tangkapan layar hasil benchmarking dengan kanal Youtube Kemenkeu

Benchmarking juga dilakukan terhadap kanal YouTube Kementerian Keuangan untuk menganalisis jumlah ideal video dalam setiap playlist serta variasi kategori yang digunakan.

Berdasarkan hasil pengamatan, diketahui bahwa kanal tersebut tidak memiliki acuan baku terkait jumlah video per playlist, meskipun total video yang diunggah mencapai lebih dari seribu. Menariknya, tidak semua video dimasukkan ke dalam playlist, melainkan dikurasi berdasarkan tema dan relevansi konten. Kanal ini juga menampilkan playlist kreatif yang mendukung narasi kelembagaan, seperti *Seri Ekonomi* yang membahas sejarah rupiah, *Film Pendek Karya Kemenkeu*, hingga video animasi *Petualangan Ungkit*. Di sisi lain, kanal tersebut tetap menampilkan konten formal seperti *Event Kegiatan Resmi Kemenkeu*, *Profil Wamenkeu*, dan dokumentasi transformasi kelembagaan.

Pendekatan ini dapat diterapkan pada kanal YouTube DPR RI dengan cara menonjolkan agenda resmi dan fungsi kelembagaan DPR dalam satu sistem playlist utama, tanpa mengesampingkan ruang bagi konten kreatif yang informatif dan edukatif. Dengan demikian, kanal DPR RI tidak hanya menjadi wadah penyebaran kegiatan formal lembaga, tetapi juga dapat menghadirkan konten yang lebih ringan, komunikatif, dan mampu menarik minat publik yang lebih luas, tanpa kehilangan nilai kelembagaannya.

Kegiatan ini mencerminkan nilai **Kompeten**, karena penulis berupaya untuk belajar dari praktik terbaik pihak eksternal guna memperkuat strategi pengelolaan kanal YouTube DPR RI. Melalui proses pembelajaran tersebut, penulis mampu mengidentifikasi pendekatan yang relevan untuk diterapkan, yakni dengan menonjolkan agenda resmi dan fungsi kelembagaan DPR dalam playlist utama tanpa mengesampingkan konten kreatif yang bersifat edukatif dan komunikatif.

Dan menerapkan prinsip **Smart ASN** dalam aspek **berwawasan global dan jejaring luas** dengan mempelajari praktik terbaik dari berbagai kanal profesional untuk meningkatkan kualitas pengelolaan konten di YouTube DPR RI. Melalui kegiatan ini, peserta menunjukkan keterbukaan terhadap inovasi dan tren global, serta kemampuan membangun jejaring profesional dengan pihak luar secara efektif dan etis. Dari sisi **manajemen ASN**, kegiatan ini mencerminkan upaya pengembangan kompetensi melalui pembelajaran berkelanjutan dan kolaborasi, yang menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja organisasi serta memperkuat peran ASN sebagai agen perubahan yang adaptif dan berdaya saing global.

Aspek Benchmarking	Temuan Media Mainstream	Adaptasi untuk Youtube DPR RI	Threshold Outcome /
Klasifikasi Berdasarkan Jenis Program/Konten (Liputan 6 & Kompas)	Playlist dibagi berdasarkan jenis berita dan segmen program . Kanal Liputan 6 mengelompokkan konten menjadi kategori seperti Berita Politik, Kriminal, Olahraga, Luar Negeri, serta segmen acara seperti Liputan 6 Siang dan Liputan 6 Pagi.	Playlist akun YouTube DPR dipisahkan berdasarkan Komisi I–XIII , AKD berdasarkan tahun dan agenda kegiatan lain	Playlist lebih informatif dan terstruktur , publik mudah mengakses informasi sesuai kebutuhan.
Fleksibilitas Jumlah Video dan Variasi Playlist (YT Kemenkeu)	Kemenkeu tidak menetapkan batas pasti untuk jumlah video per playlist. Beberapa playlist berisi hingga ratusan namun tidak semua video diunggah dimasukkan ke	Membuat playlist kreatif serupa, misalnya <i>konten kreatif</i> dan memasukkan video dengan nilai	Adanya integrasi antara konten formal dan konten kreatif.

	dalam playlist hanya yang relevan dan bernilai informatif tinggi.	informasi yang tinggi kedalam playlist.	
--	---	---	--

Tabel 8. Threshold hasil benchmarking

b) Membuat draft standar klasifikasi

No	Penamaan Playlist terbaru	Jumlah Video	Keterangan
1	Pimpinan DPR RI 2025	75	Berisi video dari Para Pimpinan DPR RI di tahun 2025 berdasarkan data berikut: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xj76QhRSneDRLZ1TA_edSfW-hkScQjdQwg5y0sRqduU/edit?gid=0#gid=0 Penamaan playlist haruslah huruf kapital
2	Tim Pengawas Haji 2025 DPR RI	23	Penamaan playlist dari huruf kapital dan sudah disetujui oleh mentor dan redaktur
3	Komisi I 2025	13	Penamaan playlist dari huruf kapital dan sudah disetujui oleh mentor dan redaktur
4	Komisi II 2025	31	Penamaan playlist dari huruf kapital dan sudah disetujui oleh mentor dan redaktur
5	Komisi III 2025	28	Penamaan playlist dari huruf kapital dan sudah disetujui oleh mentor dan redaktur
6	Komisi IV 2025	10	Penamaan playlist dari huruf kapital dan sudah disetujui oleh mentor dan redaktur
7	Komisi V 2025	21	Penamaan playlist dari huruf kapital dan sudah disetujui oleh mentor dan redaktur
8	Komisi VI 2025	22	Penamaan playlist dari huruf kapital dan sudah disetujui oleh mentor dan redaktur
9	Komisi VII 2025	7	Penamaan playlist dari huruf kapital dan sudah disetujui oleh mentor dan redaktur
10	Komisi VIII 2025	15	Penamaan playlist dari huruf kapital dan sudah disetujui oleh mentor dan redaktur
11	Komisi IX 2025	27	Penamaan playlist dari huruf kapital dan sudah disetujui oleh mentor dan redaktur
12	Komisi X 2025	15	Penamaan playlist dari huruf kapital dan sudah disetujui oleh mentor dan redaktur
13	Komisi XI 2025	10	Penamaan playlist dari huruf kapital dan sudah disetujui oleh mentor dan redaktur
14	Komisi XII 2025	4	Penamaan playlist dari huruf kapital dan sudah disetujui oleh mentor dan redaktur
15	Komisi XIII 2025	18	Penamaan playlist dari huruf kapital dan sudah disetujui oleh mentor dan redaktur
16	BKSAP 2025	30	Penamaan playlist dari huruf kapital dan sudah disetujui oleh mentor dan redaktur
17	Setjen DPR RI 2025	21	Penamaan playlist dari huruf kapital dan sudah disetujui oleh mentor dan redaktur
18	Konten Kreatif 2025	4	Revisi penamaan karena tidak memerlukan tahun
19	Baleg	11	Untuk AKD harus menambahkan kata "DPR RI"
20	BAKN	2	Untuk AKD harus menambahkan kata "DPR RI"
21	PSA	2	Playlist dihapus dan video akan dimasukkan ke komisi terkait
22	BAM	1	Untuk AKD harus menambahkan kata "DPR RI"
23	PUIC Ke-19 Tahun 2025	22	Revisi penamaan, terdapat penambahan kata "Konferensi" dan penghapusan Tahun
24	SIDANG TAHUNAN DAN	16	Penamaan playlist sudah disetujui

	SIDANG BERSAMA 2025		
25	BANGGAR	1	Untuk AKD harus menambahkan kata “DPR RI”
26	HUT RI-80	5	Playlist dihapus dan video akan dimasukkan ke playlist sidang tahunan

Tabel 9. Draf klasifikasi *playlist*

Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, direncanakan penambahan sebanyak 26 playlist baru pada akun YouTube DPR RI. Kegiatan ini diawali dengan penyusunan draft standar klasifikasi playlist yang bertujuan untuk menata seluruh konten video agar lebih sistematis, mudah diakses, dan mencerminkan fungsi kelembagaan DPR RI secara menyeluruh.

Proses penyusunan dilakukan melalui analisis mendalam terhadap karakteristik konten yang telah ada serta kebutuhan publik terhadap informasi parlemen. Penulis juga menerapkan nilai BerAKHLAK yaitu **Kompeten** dengan menyusun konsep klasifikasi baru yang mengacu pada praktik terbaik dari kanal lembaga lain, seperti Kompas TV dan Kementerian Keuangan. Hasil pembelajaran tersebut kemudian diadaptasikan dengan konteks kelembagaan DPR RI, sehingga menghasilkan rancangan klasifikasi yang relevan, terukur, dan aplikatif. Nilai **Akuntabel** juga tercermin dari cara penulis mendokumentasikan seluruh proses penyusunan dan dasar pertimbangan klasifikasi secara transparan.

Keterkaitan dengan agenda 3 adalah, nilai **profesionalisme dan jiwa entrepreneurship** dengan menyusun rancangan standar yang sistematis, terukur, dan sesuai kebutuhan organisasi. Peserta menunjukkan kemampuan berpikir inovatif dengan melihat peluang perbaikan dalam pengelolaan playlist agar lebih efektif dan mudah diterapkan. Kegiatan ini sejalan dengan prinsip **Smart ASN** yang menuntut ASN untuk adaptif, kreatif, dan berorientasi pada hasil, serta mencerminkan penerapan **manajemen ASN** dalam aspek **pengembangan kinerja dan inovasi berkelanjutan**, di mana setiap langkah perencanaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara profesional dan bernilai tambah.

c) Diskusi bersama mentor terkait draft standar



Gambar 15. Foto penulis berdiskusi dengan redaktur



Gambar 16. Foto penulis berdiskusi dengan mentor

Setelah melakukan benchmarking pada kanal Youtube Media dan Lembaga lain serta berdiskusi dengan mentor dan redaktur tim media sosial, penulis membuat draft playlist terbaru sesuai ketentuan yaitu format penamaan playlist harus sesuai standar playlist sebelumnya, berfokus kepada AKD dan Komisi di DPR serta tidak ada jumlah minimal video dalam 1 playlist. Sehingga dalam proses aktualisasi ini, sudah berfokus pada pedoman tersebut dan sudah dilakukan penambahan playlist sesuai kriteria-kriteria tersebut.

Salah satu masukan utama dari mentor adalah agar playlist yang berisi kegiatan komisi-komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) tetap dipertahankan berdasarkan pembagian tahun, bukan digantikan dengan kategori baru. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kesinambungan informasi publik, karena masyarakat sering kali menelusuri perkembangan pembahasan dan proses legislasi dari tahun ke tahun. Selain itu, struktur tahunan ini juga membantu audiens memahami dinamika kegiatan kedewanan secara kronologis dan transparan.

Selanjutnya, mentor menyarankan agar format penamaan playlist mengikuti pola yang sudah ada, yakni menggunakan huruf kapital disertai tahun, guna menjaga konsistensi visual dan identitas kanal. Beberapa playlist yang bersifat sementara seperti PSA dan HUT ke-80 RI juga direkomendasikan untuk digabungkan ke dalam playlist yang lebih relevan misalnya, PSA ke dalam playlist komisi terkait dan HUT ke-80 RI ke dalam Sidang Tahunan dan Sidang Bersama 2025. Dengan penerapan saran tersebut, struktur playlist menjadi lebih efisien, informatif, dan mampu mencerminkan fungsi serta kegiatan DPR RI secara berkelanjutan.

Kegiatan ini juga mencerminkan nilai **Kolaboratif**, karena penulis secara aktif berkoordinasi dengan mentor serta redaktur dalam proses analisis dan penyempurnaan hasil benchmarking agar relevan dengan kebutuhan kelembagaan DPR RI.

Kegiatan ini juga mencerminkan prinsip **Smart ASN** yaitu nilai profesionalisme dan jejaring luas yang menekankan kolaborasi dan pengembangan diri berkelanjutan, serta sejalan dengan **manajemen ASN** dalam hal peningkatan kapasitas.

d) Menyusun standar final klasifikasi Playlist

No	Penamaan Playlist terbaru	Jumlah Video
1	PIMPINAN DPR RI 2025	73
2	TIM PENGAWAS HAJI DPR 2025	23
3	KOMISI I 2025	13
4	KOMISI II 2025	31
5	KOMISI III 2025	28
6	KOMISI IV 2025	10
7	KOMISI V 2025	22
8	KOMISI VI 2025	22
9	KOMISI VII 2025	5
10	KOMISI VIII 2025	15
11	KOMISI IX 2025	28
12	KOMISI X 2025	15
13	KOMISI XI 2025	10
14	KOMISI XII 2025	4
15	KOMISI XIII 2025	18
16	BKSAP DPR RI 2025	29
17	SETJEN DPR RI 2025	24
18	KONTEN KREATIF	5
19	BALEG DPR RI 2025	11
20	BAKN DPR RI 2025	2
21	BAM DPR RI 2025	1
22	KONFERENSI PUIC Ke-19	23
23	SIDANG TAHUNAN DAN SIDANG BERSAMA 2025	20
24	BANGGAR DPR RI 2025	1

Tabel 10. klasifikasi *playlist* final

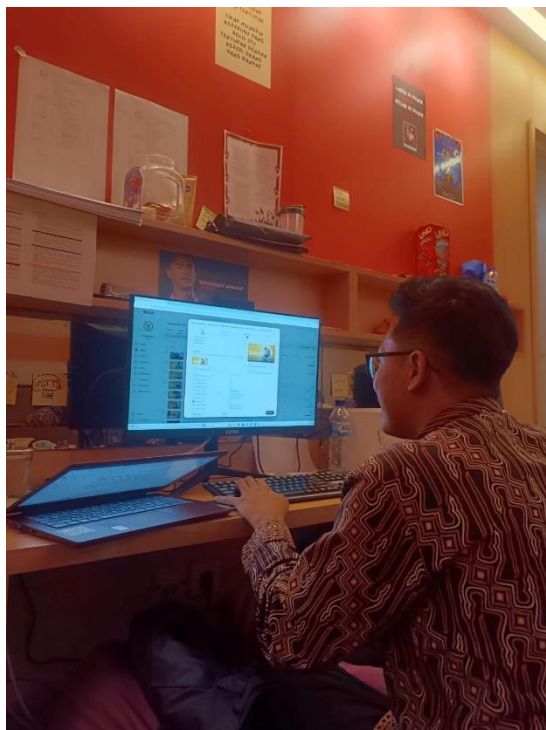
Saat menyusun final draft standar playlist, penulis melakukan perbaikan sesuai kriteria saat pembuatan draft dan mendapati jumlah playlist yang dibuat berkurang menjadi 24 playlist, karena adanya 2 playlist yang digabungkan ke playlist yang lain, yaitu *PSA* dan *Hut RI ke-80*. Sehingga total playlist yang ada sebanyak 186 playlist.

Meski perhitungan jumlah playlist berkurang dari hasil awal, namun hasil saat ini dinilai lebih terstruktur dengan baik dengan menempatkan playlist komisi tetap berdasarkan tahun upload kegiatan dan liputan pada komisi maupun AKD tersebut, dengan ini diharapkan para penonton Youtube DPR RI dapat lebih membedakan mengenai informasi kegiatan Komisi dan AKD berdasarkan tahun.

Selain itu, pengelompokan video juga didasarkan pada jenis kegiatan, konteks dari video dan tidak hanya berdasarkan Keyvisual yang dibuat, sehingga playlist jadi lebih terkelompok sesuai isi dan konteks video yang sudah diupload. Dimana video dalam playlist yang dibuat, tentunya semakin bertambah sesuai dengan konten video terbaru yang diupload sudah langsung dikelompokkan berdasarkan playlist terbaru ini. penulis menerapkan nilai **BerAKHLAK – Akuntabel** dengan memastikan setiap keputusan dan rancangan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan secara profesional dan kelembagaan. Dan menerapkan nilai **integritas dan profesionalisme** dengan menetapkan standar yang benar, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peserta menunjukkan sikap jujur, teliti, serta berkomitmen untuk menghasilkan pedoman klasifikasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan prinsip tata kelola yang baik. Kegiatan ini sejalan dengan semangat **Smart ASN** yang menekankan keandalan, akuntabilitas, dan kualitas hasil kerja, serta mencerminkan penerapan **manajemen ASN** dalam aspek **pengendalian dan penjaminan mutu kinerja**, di mana setiap keputusan didasarkan pada data, analisis yang tepat, dan prinsip tanggung jawab profesional.

4. Implementasi Klasifikasi Playlist Youtube

a) Membuat Playlist-Playlist terbaru

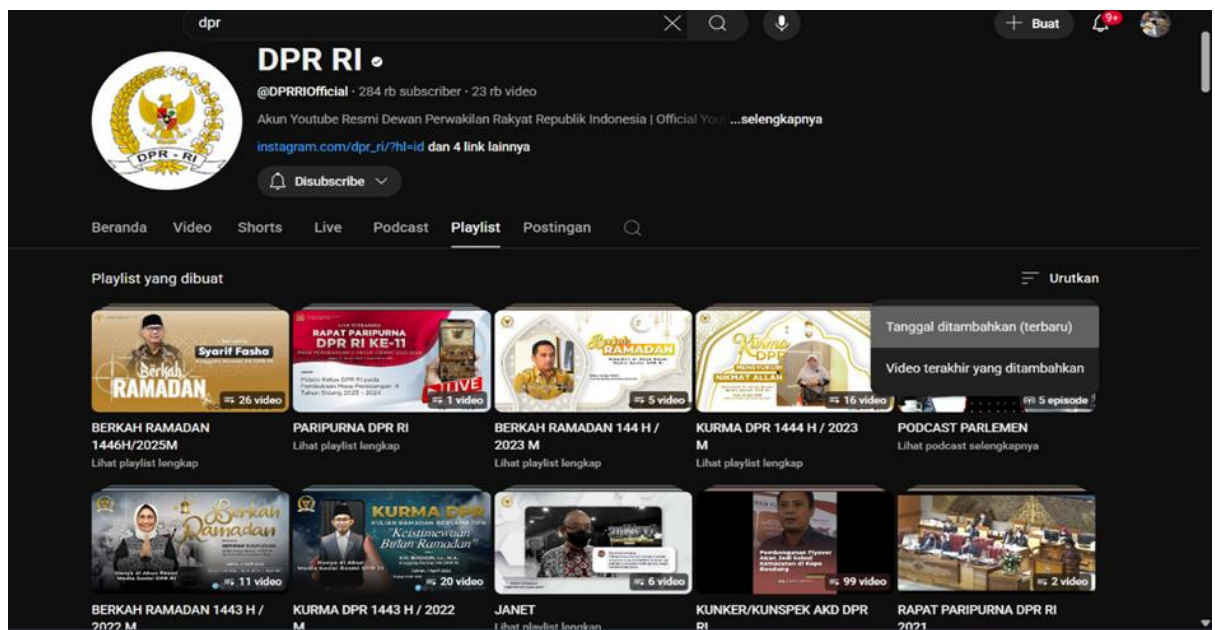


Gambar 17. Foto penulis saat melakukan pembuatan playlist

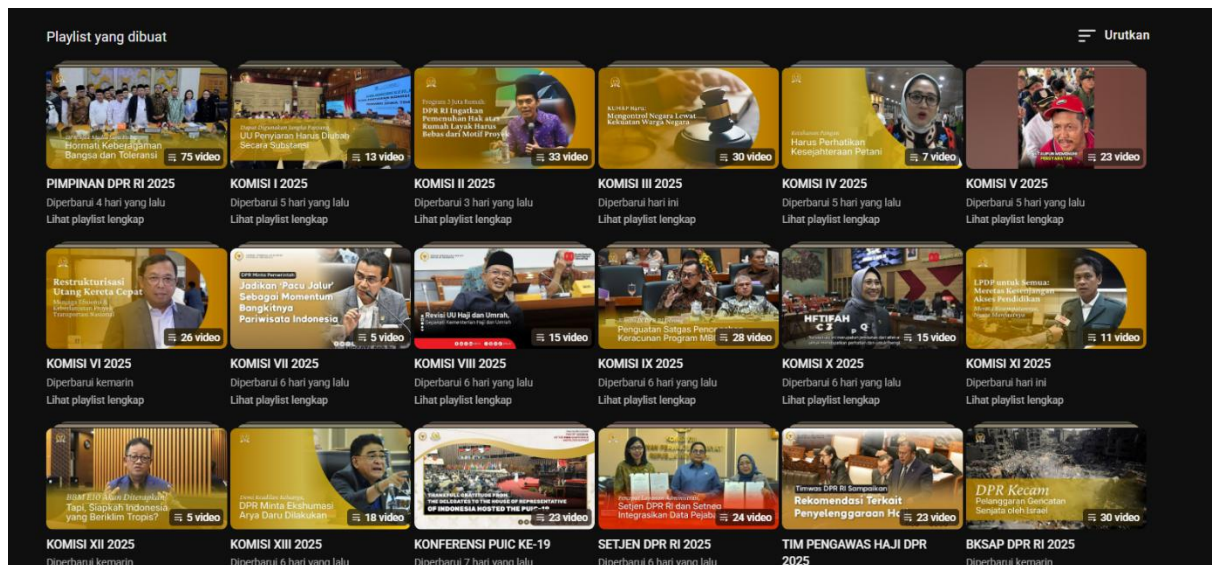
Penulis melakukan pembaruan dan penataan playlist pada kanal YouTube DPR RI untuk menciptakan tampilan yang lebih rapi, terstruktur, dan mudah diakses oleh publik. Sebelumnya, banyak video belum dikelompokkan secara jelas, sehingga informasi sulit ditemukan. Melalui kegiatan ini, penulis menyusun 24 playlist baru yang diklasifikasikan berdasarkan fungsi kelembagaan dan tema kegiatan, seperti Pimpinan DPR RI 2025, Komisi II–III 2025, BKSAP DPR RI 2025, serta playlist tematik seperti Sidang Tahunan dan Sidang Bersama 2025 dan Konten Kreatif.

Kegiatan ini mencerminkan nilai dasar ASN **Berorientasi Pelayanan**, karena berfokus pada peningkatan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Dengan struktur playlist yang jelas dan konsisten, publik kini dapat menemukan video sesuai topik dengan lebih cepat dan efisien. Upaya ini juga menunjukkan komitmen penulis dalam memberikan pelayanan informasi yang transparan, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan publik, sejalan dengan semangat pelayanan prima di instansi pemerintah.

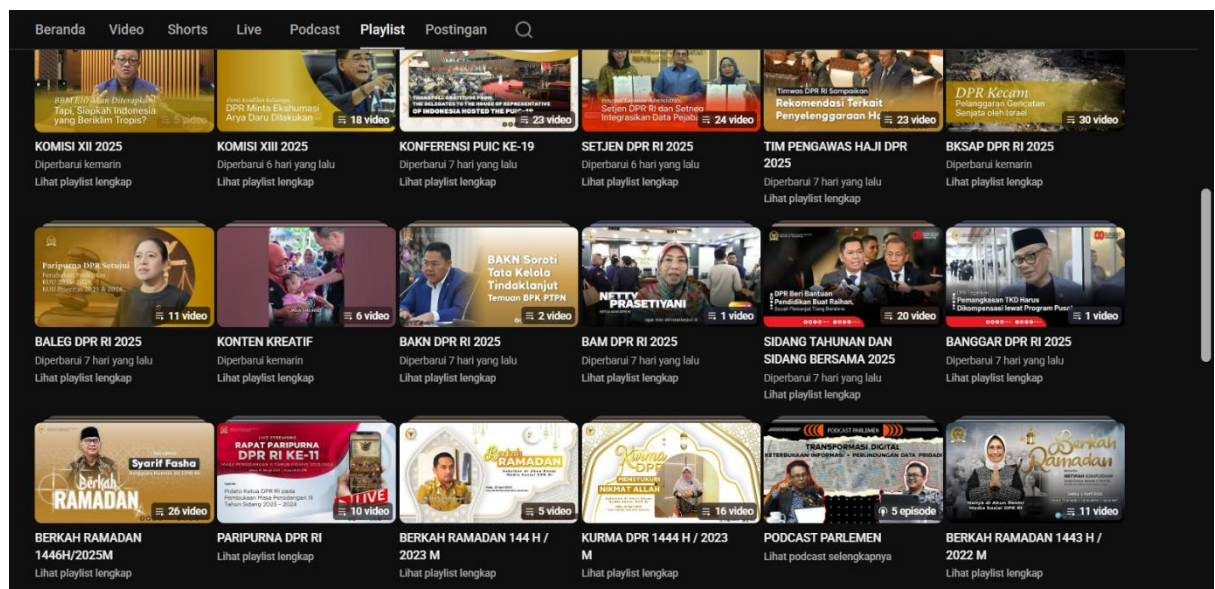
Dalam kegiatan ini menerapkan nilai **profesionalisme dan jiwa entrepreneurship** dengan memanfaatkan kompetensi yang dimiliki untuk menghasilkan inovasi dalam pengelolaan konten YouTube DPR RI dan sejalan dengan prinsip **Smart ASN** yang mendorong ASN untuk adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil, serta mendukung penerapan **manajemen ASN** dalam aspek **pengembangan kinerja dan inovasi pelayanan publik**, di mana setiap ide baru diarahkan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi lembaga dan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.



Gambar 18. Tangkapan layar Playlist sebelum diperbaharui



Gambar 19. Tangkapan layar Playlist setelah diperbaharui



Gambar 20. Tangkapan layar Playlist setelah diperbaharui

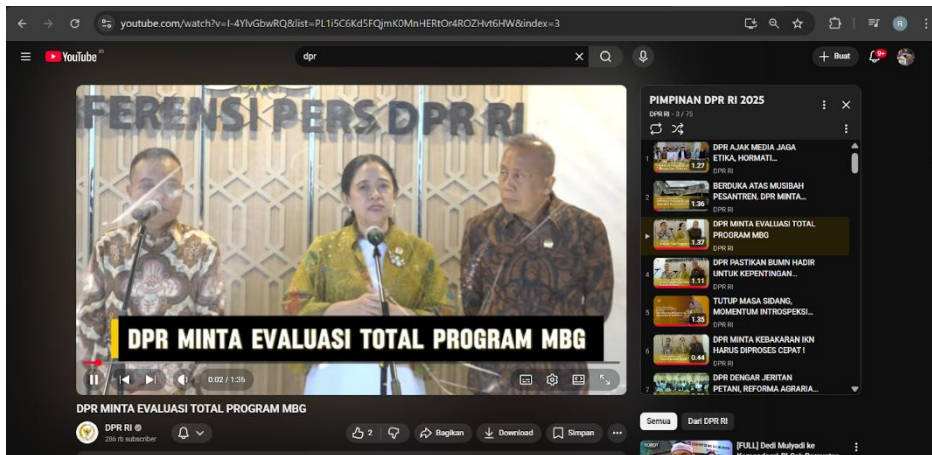
b) Pengelompokan video berdasarkan jenis Playlist

Setelah membuat daftar playlist, maka langkah selanjutnya yang dilakukan penulis adalah melakukan pengelompokan video ke masing-masing playlist sesuai dengan format penamaannya, dan juga berdasarkan pengumpulan data secara manual yang dilakukan oleh penulis sesuai dengan data pada tautan berikut [ini](#).

Penataan dilakukan dengan urutan sistematis dimulai dari playlist pimpinan, diikuti komisi dan badan agar tampilan kanal lebih rapi dan mudah diakses publik. Kegiatan ini mencerminkan nilai ASN **Kompeten**, karena dilakukan dengan ketelitian dan keakuratan dalam pengelompokan konten, sehingga kanal YouTube DPR RI menjadi lebih profesional, informatif, dan terstruktur.

Selanjutnya kegiatan ini sejalan dengan prinsip **Smart ASN** melalui aspek **IT & Multilingual** serta **profesionalisme** dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola dan menyusun playlist secara sistematis sesuai standar kompetensi. Peserta menunjukkan kemampuan teknis dalam penggunaan platform YouTube serta ketelitian dalam menyesuaikan setiap video

dengan kategori yang tepat agar informasi lebih mudah diakses publik. Kegiatan ini mencerminkan penerapan **manajemen ASN berbasis teknologi dan data**, di mana efisiensi, akurasi, dan profesionalitas menjadi dasar dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan konten dan transparansi informasi lembaga.

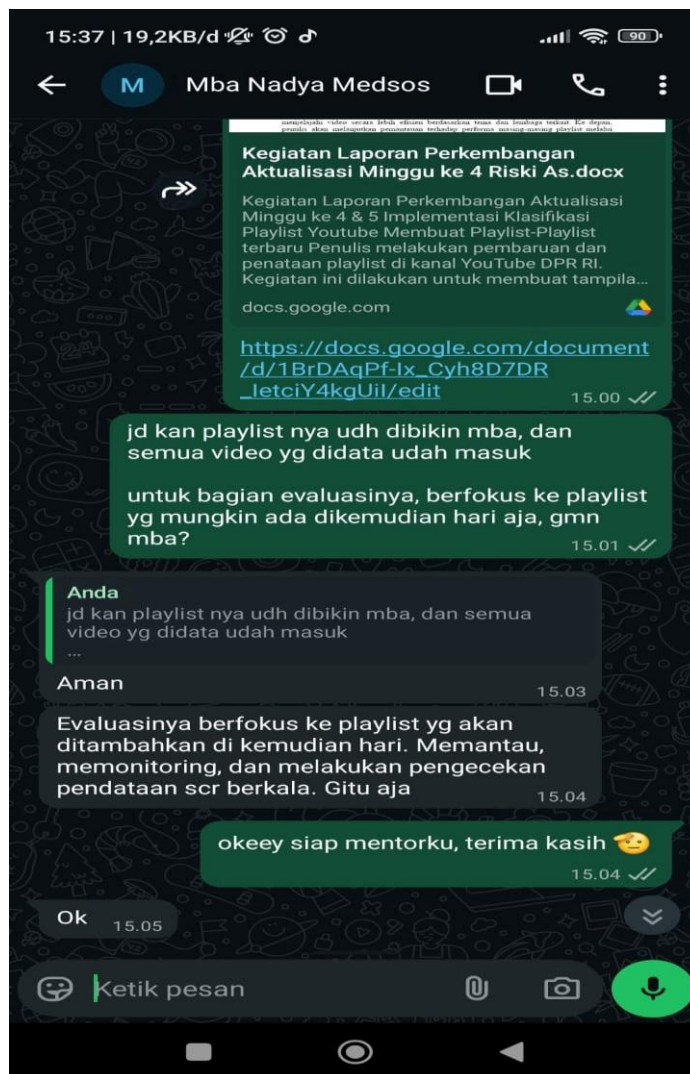


Gambar 21. Tangkapan layar isi playlist Pimpinan DPR RI



Gambar 22. Tangkapan layar isi playlist Setjen DPR RI

c) Diskusi bersama mentor terkait perbaikan klasifikasi



Gambar 23. Tangkapan layar hasil diskusi dengan mentor

Setelah menyusun playlist baru dan mengelompokkan video berdasarkan kategori, penulis melakukan diskusi dengan mentor untuk membahas hasil perbaikan klasifikasi playlist pada kanal YouTube DPR RI. Diskusi ini menjadi tahap evaluasi terhadap draft klasifikasi yang telah disusun sebelumnya, memastikan seluruh video termasuk yang sebelumnya belum memiliki playlist telah terakomodasi dengan baik. Dari hasil pembahasan, struktur playlist dinilai sudah komprehensif, konsisten, dan representatif terhadap seluruh kegiatan DPR RI, sehingga tidak diperlukan penambahan kategori baru dan harus berfokus pada playlist yang kemungkinan ada dikemudian hari.

Kegiatan ini mencerminkan nilai dasar ASN **Kolaboratif**, karena penulis terbuka terhadap masukan dan bekerja sama dengan mentor dalam menyempurnakan hasil kerja. Melalui kolaborasi tersebut, penulis dapat memastikan bahwa sistem klasifikasi playlist yang diterapkan benar-benar efektif, terstandar, dan sesuai dengan karakter kelembagaan DPR RI. Dan mencerminkan semangat **Smart ASN** yang menjunjung tinggi nilai moral dan akuntabilitas, serta sejalan dengan prinsip **manajemen ASN** dalam aspek **evaluasi dan pembinaan kinerja**, di mana keterbukaan terhadap umpan balik menjadi kunci peningkatan kompetensi dan kualitas hasil kerja.

d) Memperbaiki klasifikasi pada Playlist

Setelah berdiskusi dengan mentor, maka fokus perbaikan klasifikasi playlist akan berfokus kepada masa yang akan datang. Karena mungkin saja akan ada konten-konten baru dari AKD yang akan diunggah sampai dengan tahun 2025 berakhir, juga sebagai persiapan untuk momen-momen hari perayaan seperti Natal 2025, Tahun Baru 2026, hari sumpah pemuda, maupun playlist untuk ditahun yang akan datang yaitu 2026.

Berikut adalah tabel penambahan playlist yang mungkin akan dilakukan dikemudian hari namun masih bersifat **dinamis dan tentatif**, dapat disesuaikan dengan situasi nasional dan jadwal kegiatan DPR RI, serta ketersediaan konten yang diunggah.

NO	Rencana Nama Playlist	Tema/Momentum	Jenis Konten
1	Natal 2025	Perayaan Hari Raya Natal	Ucapan pimpinan maupun anggota DPR RI, kegiatan sosial keagamaan, refleksi akhir tahun
2	Tahun Baru 2026	Momentum pergantian tahun	Ucapan tahun baru, highlight kegiatan DPR selama 2025, rencana kerja 2026
3	Ramadan & Idul Fitri 2026	Bulan suci Ramadan & Idul Fitri	Pesan kebangsaan, kegiatan sosial, program Rumah Berkah Ramadhan
4	Sumpah Pemuda 2025	Peringatan Hari Sumpah Pemuda	Wawancara dari anggota Dewan yang termasuk tokoh muda, pesan kebangsaan, liputan kegiatan kepemudaan
5	Panitia Khusus DPR RI	Panitia Khusus DPR RI sesuai isu dan periode tertentu	Dokumentasi rapat kerja, hasil pembahasan, laporan kinerja sementara, konferensi pers
6	BURT 2025	Kegiatan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI	Video rapat BURT, pembahasan sarana prasarana, kesejahteraan anggota DPR, serta tata kelola fasilitas
7	MKD 2025	Kegiatan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)	Sidang MKD, konferensi pers terkait penegakan kode etik, sosialisasi etika anggota dewan
8	Bamus 2025	Rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan agenda penetapan jadwal DPR	Dokumentasi rapat Bamus, pengumuman jadwal masa sidang dan reses, cuplikan kegiatan koordinasi antar fraksi

Tabel 11. Evaluasi perbaikan playlist untuk masa mendatang

Kegiatan ini mencerminkan nilai dasar ASN **Akuntabel**, karena penulis melaksanakan evaluasi dan perbaikan hasil implementasi secara **bertanggung jawab dan adaptif** terhadap masukan yang diberikan. Sikap terbuka terhadap perubahan tersebut menunjukkan komitmen penulis dalam memastikan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan serta relevan dengan kebutuhan pengelolaan kanal YouTube DPR RI secara profesional.

Dan juga memiliki keterkaitan dengan agenda III yaitu menerapkan nilai **entrepreneurship** dan **profesionalisme** dengan melihat peluang perbaikan serta melakukan penyesuaian sesuai standar kompetensi yang dimiliki, sekaligus memastikan hasil perbaikan sesuai kebutuhan organisasi. Kegiatan ini sejalan dengan prinsip **Smart ASN** yang mendorong ASN untuk kreatif, adaptif, dan berorientasi pada hasil, serta mencerminkan penerapan **manajemen ASN** dalam aspek **pengembangan kinerja dan inovasi berkelanjutan**, di mana setiap pembaruan dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab untuk meningkatkan efektivitas kerja.

5. Evaluasi Hasil Penyusunan Klasifikasi Pembuatan Judul

a) Evaluasi bersama mentor terkait hasil implementasi



Gambar 24. Foto saat penulis berdiskusi dengan mentor

Selanjutnya penulis melaksanakan evaluasi bersama mentor untuk meninjau hasil implementasi pengelompokan dan perbaikan playlist pada kanal YouTube DPR RI. Evaluasi ini bertujuan menilai sejauh mana penataan 24 playlist yang telah dibuat mampu mendukung optimalisasi tampilan kanal dan meningkatkan kemudahan akses bagi publik. Mentor memberikan apresiasi atas konsistensi format penamaan serta efektivitas pengelompokan berdasarkan komisi, badan, dan tema kegiatan. Selain itu, mentor juga memberi masukan untuk memperkuat aspek visual melalui thumbnail, rutin memperbarui playlist dengan video baru, serta memanfaatkan data analitik dan umpan balik publik sebagai bahan evaluasi lanjutan.

Kegiatan ini mencerminkan nilai dasar ASN **Akuntabel** karena penulis secara jujur dan terbuka mengevaluasi hasil kerja, serta **Kolaboratif** karena dilakukan melalui kerja sama dan diskusi konstruktif dengan mentor untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Melalui evaluasi ini,

penulis menunjukkan komitmen untuk terus memperbaiki hasil implementasi secara bertanggung jawab dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

Proses evaluasi ini mencerminkan prinsip **Smart ASN** yaitu nilai **integritas dan profesionalisme** yang berorientasi pada akuntabilitas dan peningkatan kualitas kinerja, serta sejalan dengan **manajemen ASN** dalam fungsi **pengawasan dan penilaian kinerja**, di mana evaluasi dilakukan secara transparan, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perbaikan berkelanjutan.

b) Menyiapkan draft format evaluasi

Pada kegiatan selanjutnya, penulis membuat draft sebagai bahan evaluasi dan mengikuti prinsip 3T (Teruji, Terukur, & Terbukti Manfaat) dan membuat kuesioner sesuai arahan dari mentor guna mengetahui tanggapan, feedback dan saran dari publik.

Indikator	Sebelum	Sesudah	Jumlah Pertambahan
Jumlah Playlist			
Jumlah Video yang tidak ada di playlist			
Jumlah Views			
Jumlah Subscriber			

Tabel 12. Draf evaluasi

Indikator	Penjelasan
Kejelasan dan konsistensi penamaan playlist	Indikator ini menilai sejauh mana setiap playlist memiliki nama yang jelas, mudah dipahami, dan konsisten dengan tema konten DPR RI, termasuk dengan penamaan playlist sebelumnya
Kesesuaian isi playlist	Indikator ini menguji apakah setiap video di dalam playlist benar-benar relevan dengan judul dan tema playlist tersebut
Perbandingan visual dan manfaat playlist	Indikator ini berfokus pada aspek visual dan fungsional playlist dibandingkan dengan format sebelumnya. Playlist yang teruji seharusnya memiliki tampilan yang lebih rapi, gambar sampul (thumbnail) yang sesuai

Tabel 13. Draf indikator evaluasi

No	Pertanyaan	Skala
1	Sebelum adanya pembuatan playlist baru, bagaimana pendapat Anda tentang tampilan Playlist YouTube DPR RI ?	Likert
2	Seberapa Sering Anda Menonton kanal YouTube DPR RI ?	Likert
3	Setelah adanya pembuatan playlist baru, bagaimana pendapat Anda tentang tampilan Playlist YouTube DPR RI ?	Likert
4	Sebelum adanya pembuatan playlist terbaru, Apakah Anda merasa mudah dalam mencari berita seputar AKD/Komisi DPR atau Video kegiatan DPR lainnya	Likert
5	Setelah dilakukan pembuatan playlist terbaru, Apakah Anda merasa lebih mudah mencari berita seputar AKD/Komisi DPR atau Video Kegiatan DPR lainnya ?	Likert
6	Apakah menurut anda, penamaan dan kategori playlist saat ini sudah jelas dan mudah dipahami?	Likert
7	Menurut Anda, apakah pembuatan playlist terbaru ini dapat meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan kanal YouTube DPR RI?	Likert
8	Pada tatanan playlist lama Youtube DPR RI, berapa lama estimasi waktu yang anda butuhkan untuk mencari suatu video tertentu secara spesifik ?	Likert
9	Pada tatanan playlist terbaru Youtube DPR RI, berapa lama estimasi waktu yang anda butuhkan untuk mencari suatu video tertentu secara spesifik ?	Likert
10	Apakah Anda lebih tertarik menonton kanal Youtube DPR RI setelah adanya pembaruan playlist?	Pertanyaan tertutup

Tabel 14. Daftar pertanyaan di kuesioner

Kuesioner Evaluasi Pembuatan dan Klasifikasi Playlist dalam Penyajian dan Pengelolaan Pemberitaan pada Kanal YouTube DPR RI

Kuesioner ini merupakan bagian dari kegiatan aktualisasi Lentera CPNS yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kanal YouTube DPR RI melalui pembaruan dan pengoptimalan playlist.

Melalui survei ini, diharapkan responden dapat memberikan penilaian dan masukan terkait tampilan, kemudahan akses, serta manfaat dari pembaruan playlist yang telah dilakukan terdahulu untuk pengembangan di masa mendatang.

Hasil dari kuesioner ini akan menjadi dasar evaluasi dan penyesuaian strategi komunikasi digital agar kanal YouTube DPR RI semakin informatif, mudah diakses, menarik, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

nkikawenned@gmail.com [Switch account](#)

Not signed in

* Indicates required question

Peterson *

Your answer

Apakah anda merupakan subscriber dari kanal Youtube DPR RI ? *

☐ Ya

☐ Tidak

Seberapa Sering Anda Menonton kanal Youtube DPR RI ? *

☐ Tidak Pernah

☐ Sangat Jarang

☐ Jarang

☐ Sering

Gambar 25. Tangkapan layar kuesioner yang dibuat untuk evaluasi

Kuesioner Evaluasi Pembuatan dan Klasifikasi Playlist dalam Penyajian dan Pengelolaan Pemberitaan pada Kanal YouTube DPR RI

Kuesioner ini merupakan bagian dari kegiatan aktualisasi Lentera CPNS yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kanal YouTube DPR RI melalui pembaruan dan pengoptimalan playlist.

Melalui survei ini, diharapkan responden dapat memberikan penilaian dan masukan terkait tampilan, kemudahan akses, serta manfaat dari pembaruan playlist yang telah dilakukan terdahulu untuk pengembangan di masa mendatang.

Hasil dari kuesioner ini akan menjadi dasar evaluasi dan penyesuaian strategi komunikasi digital agar kanal YouTube DPR RI semakin informatif, mudah diakses, menarik, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

nkikawenned@gmail.com [Switch account](#)

Not signed in

* Indicates required question

Peterson *

Your answer

Apakah anda merupakan subscriber dari kanal Youtube DPR RI ? *

☐ Ya

☐ Tidak

Seberapa Sering Anda Menonton kanal Youtube DPR RI ? *

☐ Tidak Pernah

☐ Sangat Jarang

☐ Jarang

☐ Sering

1 2 3 4 5 Sangat Sulit Sangat Mudah

Demikian dilakukan pembaruan playlist terbaru, Apakah Anda merasa lebih mudah mencari berita sesuai ARD/Komisi DPR atau Video Kegiatan DPR lainnya ? *

1 2 3 4 5 Sangat Sulit Sangat Mudah

Apakah menurut anda, penamaan dan kategori playlist saat ini sudah jelas dan mudah dipahami? *

1 2 3 4 5 Kurang Jelas Sangat Jelas

Menurut Anda, apakah pembuatan playlist terbaru ini dapat meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan kanal Youtube DPR RI? *

1 2 3 4 5 Kurang Baik Sangat Baik

Pada tampilan playlist lama Youtube DPR RI, berapa lama estimasi waktu yang anda butuhkan untuk mencari suatu video tertentu secara spesifik ? *

☐ 1-5 Menit

☐ 5-10 Menit

☐ 10-15 Menit

☐ > 15 Menit

Pada tampilan playlist terbaru Youtube DPR RI, berapa lama estimasi waktu yang anda butuhkan untuk mencari suatu video tertentu secara spesifik ? *

Gambar 26. Tangkapan layar kuesioner yang dibuat untuk evaluasi

Kegiatan ini mencerminkan nilai dasar ASN **Kompeten**, karena penulis mampu menyusun draft evaluasi yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan organisasi. Ketelitian dalam merancang instrumen evaluasi menunjukkan kemampuan analitis dan profesionalisme penulis dalam memastikan hasil kerja dapat diukur, diperbaiki, dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Serta menjunjung nilai **Profesionalisme** sejalan dengan prinsip yang menekankan kompetensi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan kerja, serta mendukung penerapan **manajemen ASN** pada aspek perencanaan dan penilaian kinerja, di mana evaluasi disusun sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan secara profesional.

c) Menyusun hasil evaluasi penyusunan klasifikasi pembuatan judul Playlist

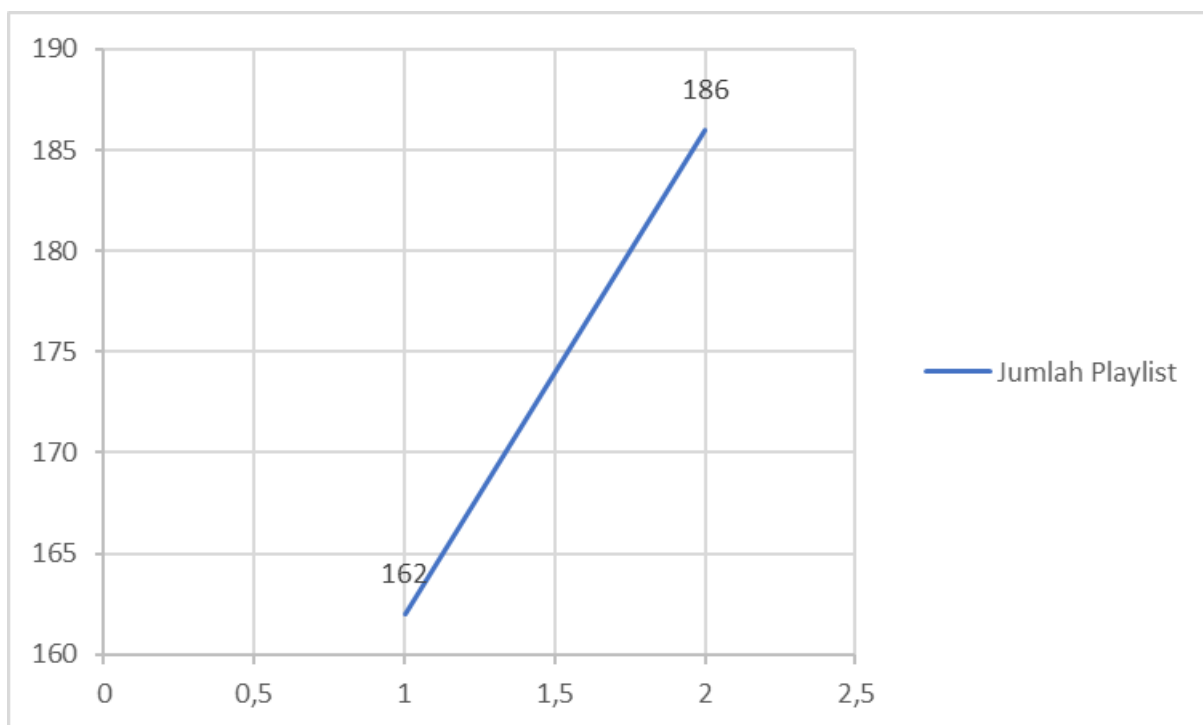
Pada tahap terakhir kegiatan aktualisasi, penulis melakukan penyusunan hasil evaluasi terhadap aktualisasi yang sudah dikerjakan dan berdasarkan aspek serta indikator yang sudah dibuat sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk merangkum seluruh temuan, masukan mentor, serta hasil implementasi lapangan guna memastikan bahwa setiap playlist yang telah dibuat tidak hanya tertata secara sistematis, tetapi juga relevan dan mudah diakses oleh publik. Melalui evaluasi

ini, penulis menilai kejelasan penamaan, kesesuaian isi playlist, serta dampak visual dan manfaat yang dihasilkan setelah penerapan klasifikasi baru. Berikut hasil evaluasi yang sudah penulis susun.

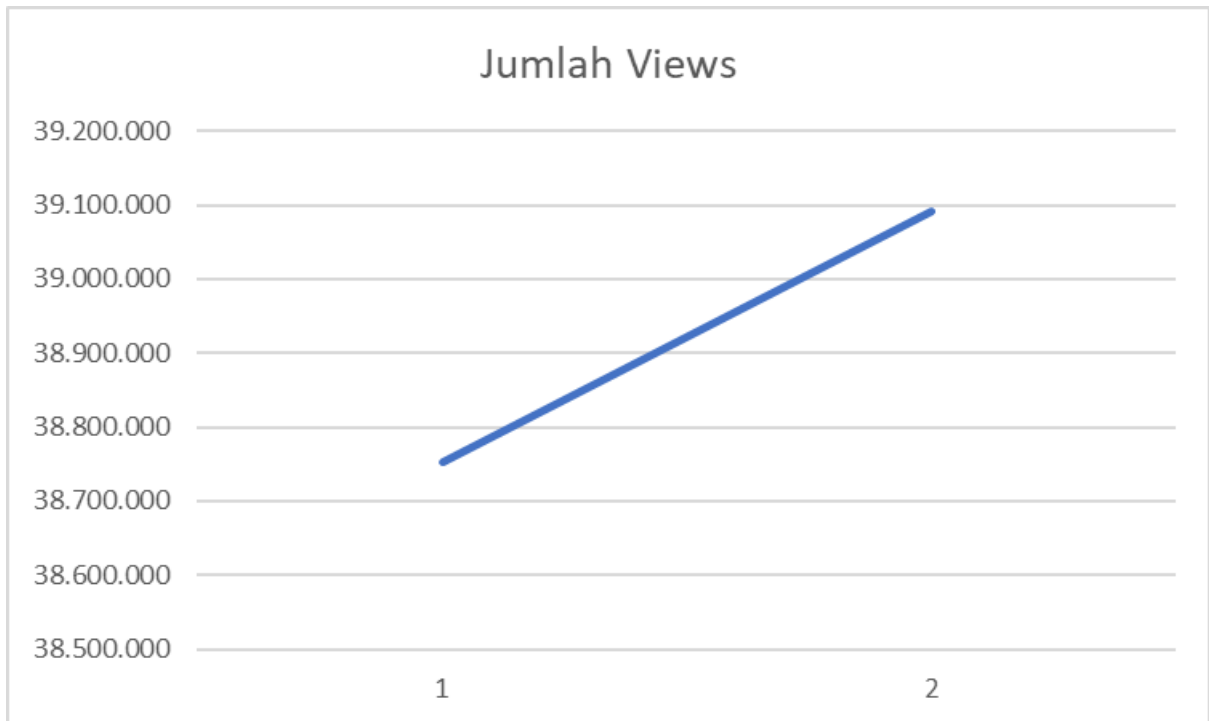
Aspek : Terukur, Teruji dan Terbukti Manfaat

Indikator	Sebelum	Sesudah	Jumlah Pertambahan
Jumlah Playlist	162	186	24
Jumlah Video yang tidak ada di playlist	472	0	472
Jumlah Views	38.753.023	39.091.263	338.240
Jumlah Subscriber	284.000	286.679	2.679

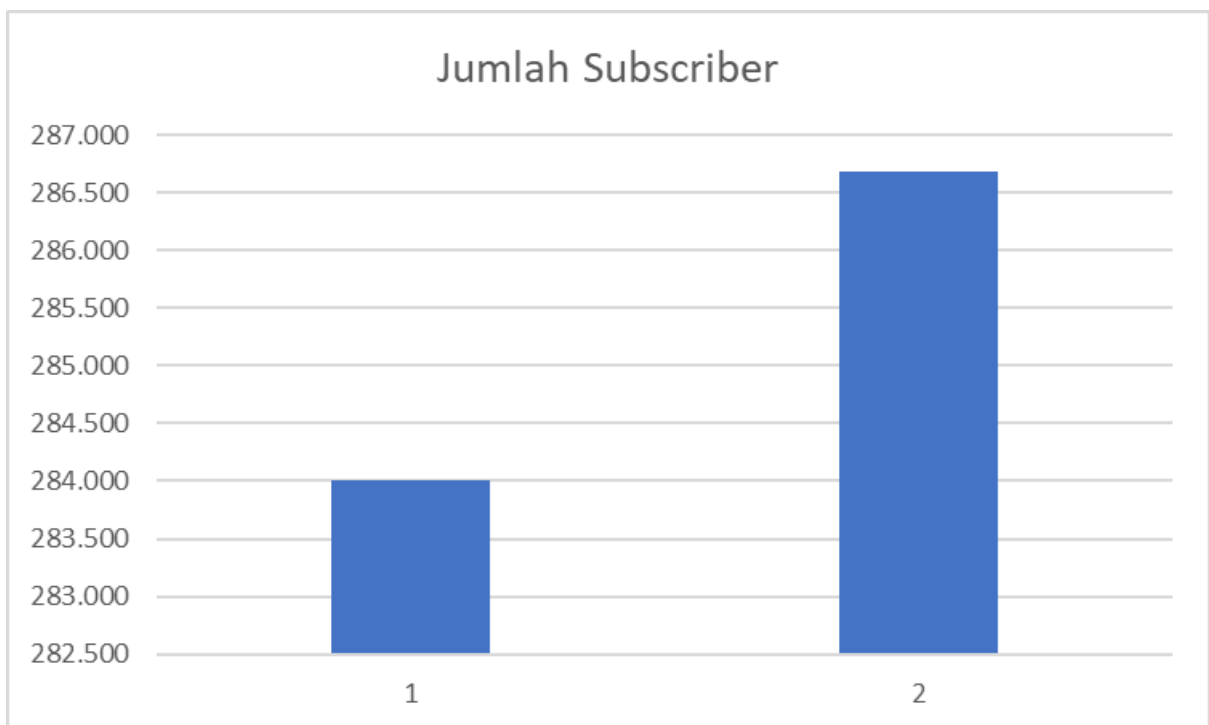
Tabel 15. Hasil evaluasi



Gambar 27. Bagan penambahan jumlah playlist



Gambar 28. Chart penambahan jumlah views pada kanal Youtube DPR RI



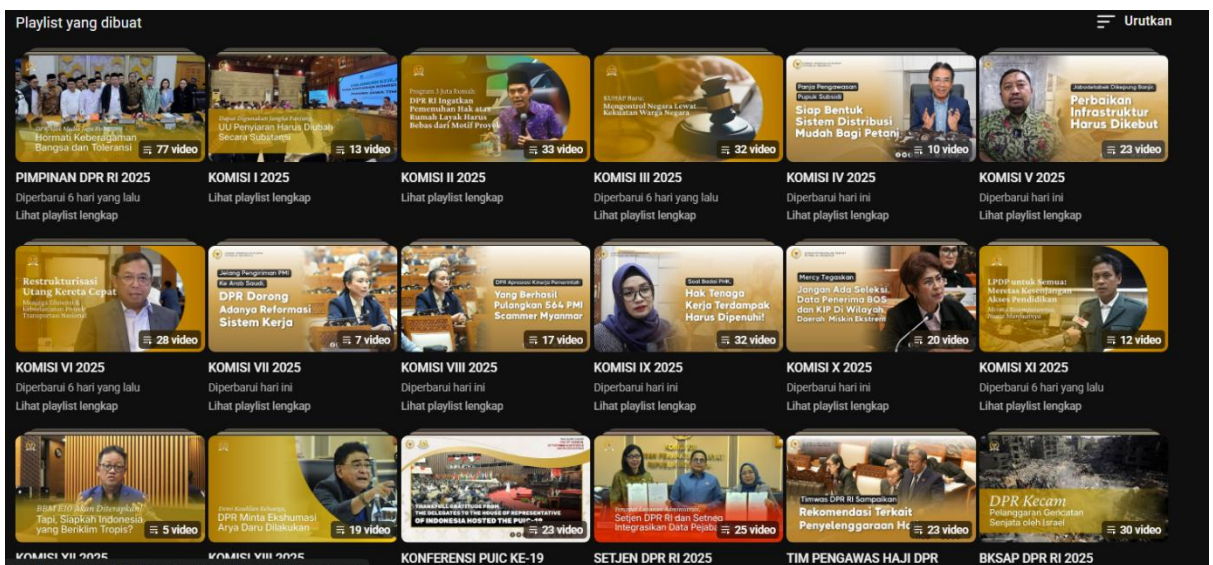
Gambar 29. Bagan penambahan jumlah subscriber pada kanal Youtube DPR RI

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan setelah optimalisasi playlist YouTube DPR RI. Jumlah playlist bertambah dari **162 menjadi 186**, menandakan penambahan **24 playlist baru** yang memperluas klasifikasi konten. Seluruh **472 video** yang sebelumnya tidak tergolong dalam playlist kini telah terorganisir sepenuhnya. Dari sisi performa kanal, terjadi peningkatan **views sebanyak 338.240** dan penambahan **subscriber sebesar 2.679**. Data ini menunjukkan dampak positif dari penataan ulang playlist dalam meningkatkan visibilitas dan keterjangkauan konten.

Selanjutnya, dalam aspek kejelasan dan konsistensi penamaan playlist sudah teruji, karena format penamaan playlist terbaru mengikuti format penamaan dari playlist yang lama yaitu menggunakan huruf kapital untuk setiap AKD maupun komisi ditambah tahun. Dan playlist baru yang dibuat sudah terdapat *thumbnail* pada setiap playlist, sehingga ada penambahan aspek visual dibandingkan dengan playlist lama. Dan diharapkan dapat meningkatkan minat menonton dari publik.



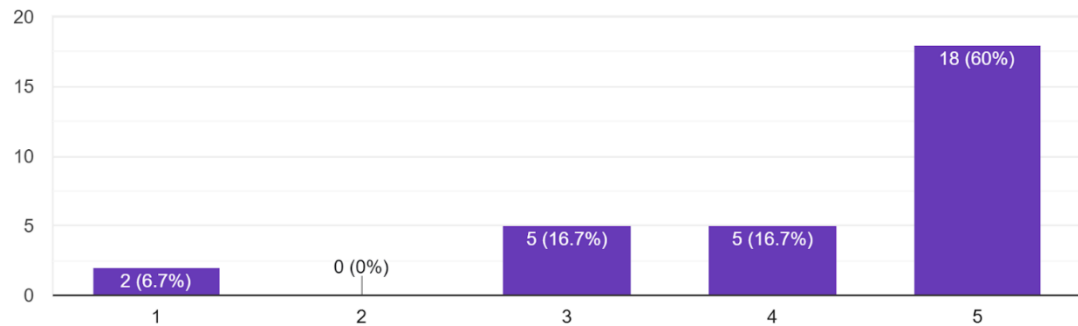
Gambar 30. Tangkapan layar penamaan playlist yang lama



Gambar 31. Tangkapan layar penamaan playlist yang baru

Apakah menurut anda, penamaan dan kategori playlist saat ini sudah jelas dan mudah dipahami?

30 responses



Gambar 32. Tangkapan layar hasil survey mengenai penamaan dan kategori playlist

Dan berdasarkan hasil survey, 60% responden menyatakan bahwa penamaan dan kategori playlist sudah jelas dan mudah dipahami dengan skor rata-rata 4,23 yang menunjukkan struktur yang mudah dipahami publik.

Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif dilakukan berdasarkan data dari kuesioner yang sudah penulis buat dan disebar kepada para responden, dan bertujuan untuk menilai efektivitas pembuatan dan klasifikasi playlist baru pada kanal YouTube DPR RI dalam meningkatkan kualitas penyajian dan kemudahan akses informasi bagi publik. Sebanyak 30 responden dari berbagai latar belakang, telah memberikan tanggapan terhadap sejumlah indikator yang menilai tampilan, kemudahan pencarian, serta profesionalitas kanal setelah adanya pembaruan playlist.

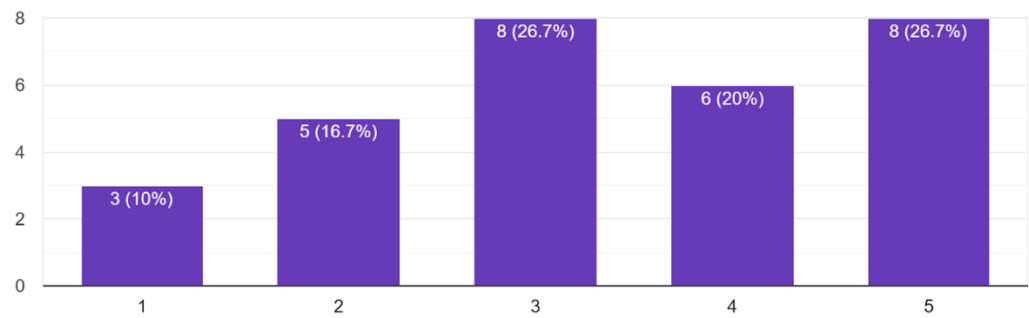
Analisis dilakukan dengan membandingkan persepsi responden sebelum dan sesudah penerapan playlist baru, menggunakan skala penilaian 1–5. Fokus utama analisis ini adalah untuk melihat sejauh mana perubahan sistem klasifikasi playlist berpengaruh terhadap pengalaman pengguna dalam menavigasi dan mengakses konten kanal YouTube DPR RI.

No	Indikator	Nilai Rata-Rata Sebelum	Nilai Rata-Rata Sesudah	Keterangan
1	Tampilan Playlist YouTube DPR RI	3,36	4,3	Naik Signifikan
2	Kemudahan dalam mencari video AKD/Komisi	3,33	4,46	Naik Signifikan
3	Efisiensi waktu pencarian terhadap video/konten spesifik	2,3	3,16	Naik Signifikan

Tabel 16. Hasil analisis kuantitatif

Sebelum adanya pembuatan playlist baru, bagaimana pendapat Anda tentang tampilan Playlist YouTube DPR RI ?

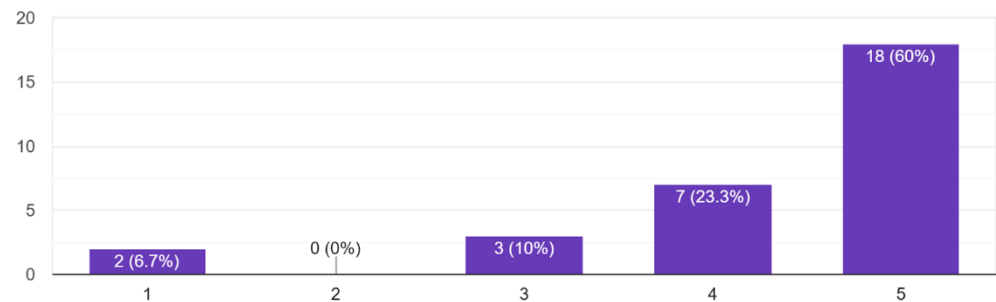
30 responses



Gambar 33. Tangkapan layar hasil survey responden tentang tampilan playlist lama

Setelah adanya pembuatan playlist baru, bagaimana pendapat Anda tentang tampilan Playlist YouTube DPR RI ?

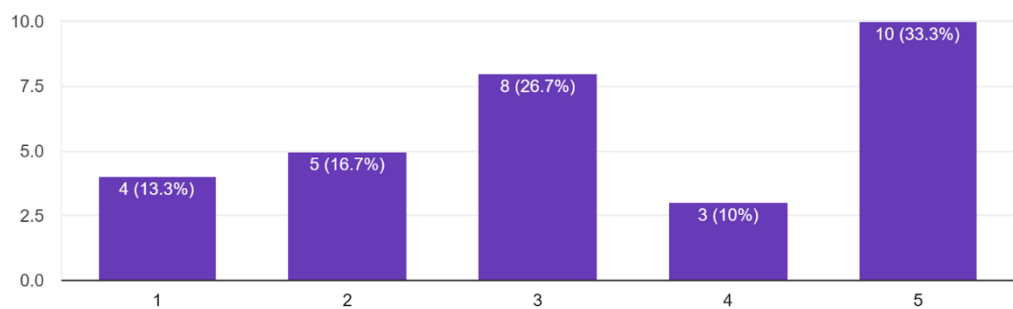
30 responses



Gambar 34. Tangkapan layar hasil survey responden tentang tampilan playlist terbaru

Sebelum adanya pembuatan playlist terbaru, Apakah Anda merasa mudah dalam mencari berita seputar AKD/Komisi DPR atau Video kegiatan DPR lainnya ?

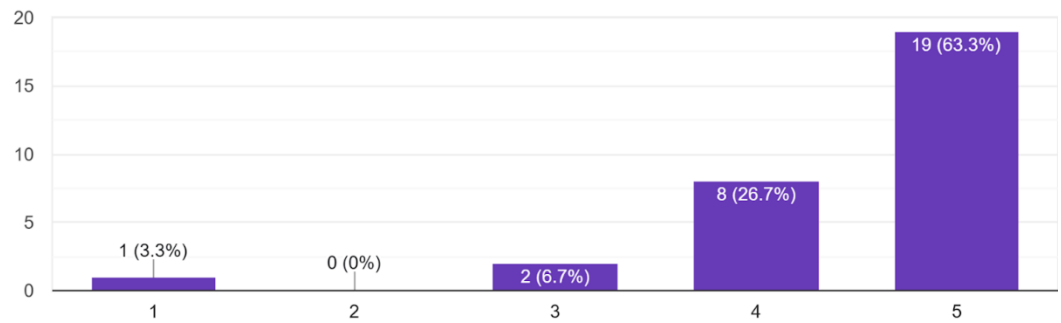
30 responses



Gambar 35. Tangkapan layar hasil survey tentang kemudahan dalam mencari berita pada playlist lama

Setelah dilakukan pembuatan playlist terbaru, Apakah Anda merasa lebih mudah mencari berita seputar AKD/Komisi DPR atau Video Kegiatan DPR lainnya ?

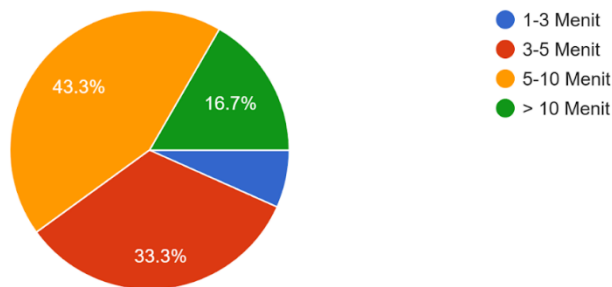
30 responses



Gambar 36. Tangkapan layar hasil survey tentang kemudahan dalam mencari berita pada playlist terbaru

Pada tatanan playlist lama Youtube DPR RI, berapa lama estimasi waktu yang anda butuhkan untuk mencari suatu video tertentu secara spesifik ?

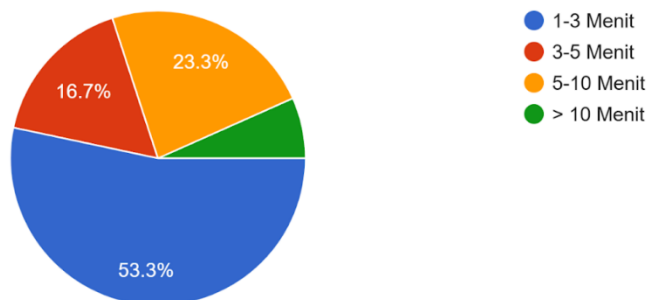
30 responses



Gambar 37. Tangkapan layar hasil survey tentang estimasi waktu untuk mencari video spesifik pada playlist lama

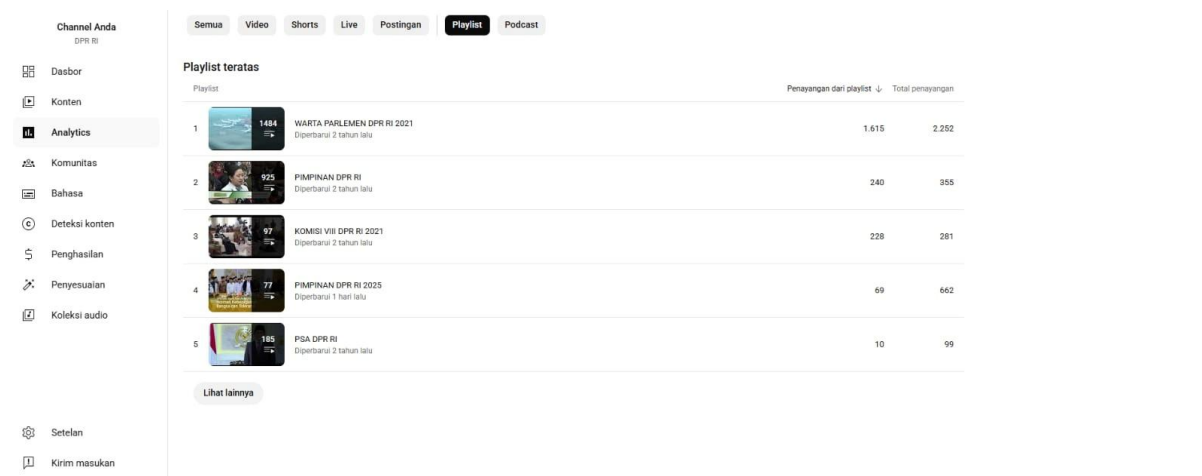
Pada tatanan playlist terbaru Youtube DPR RI, berapa lama estimasi waktu yang anda butuhkan untuk mencari suatu video tertentu secara spesifik ?

30 responses



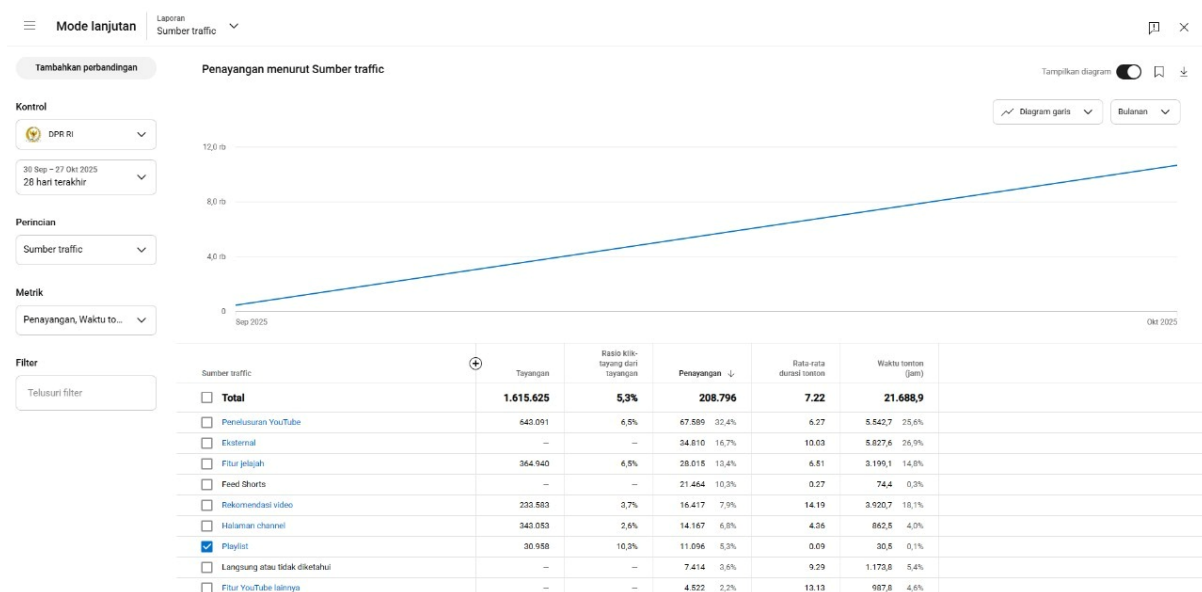
Gambar 38. Hasil survey tentang estimasi waktu untuk mencari video spesifik pada playlist terbaru

Selanjutnya berdasarkan data di dashboard akun Youtube DPR RI, playlist terbaru yang dibuat dengan judul “**PIMPINAN DPR RI 2025**” masuk kedalam 5 besar playlist teratas dengan total 69 penayangan dari playlist dan ditayangkan sebanyak 662 kali. Hal ini menunjukkan bahwa playlist yang dibuat sangat membantu audiens dalam menemukan video secara spesifik. Dan video terbanyak ditonton dalam playlist tersebut yaitu video dengan judul “**PERNYATAAN KETUA DPR RI PUAN MAHARANI, 29 AGUSTUS 2025**” yang sudah ditonton sebanyak lebih dari 45rb kali.



Gambar 39. Tangkapan layar mengenai 5 playlist teratas

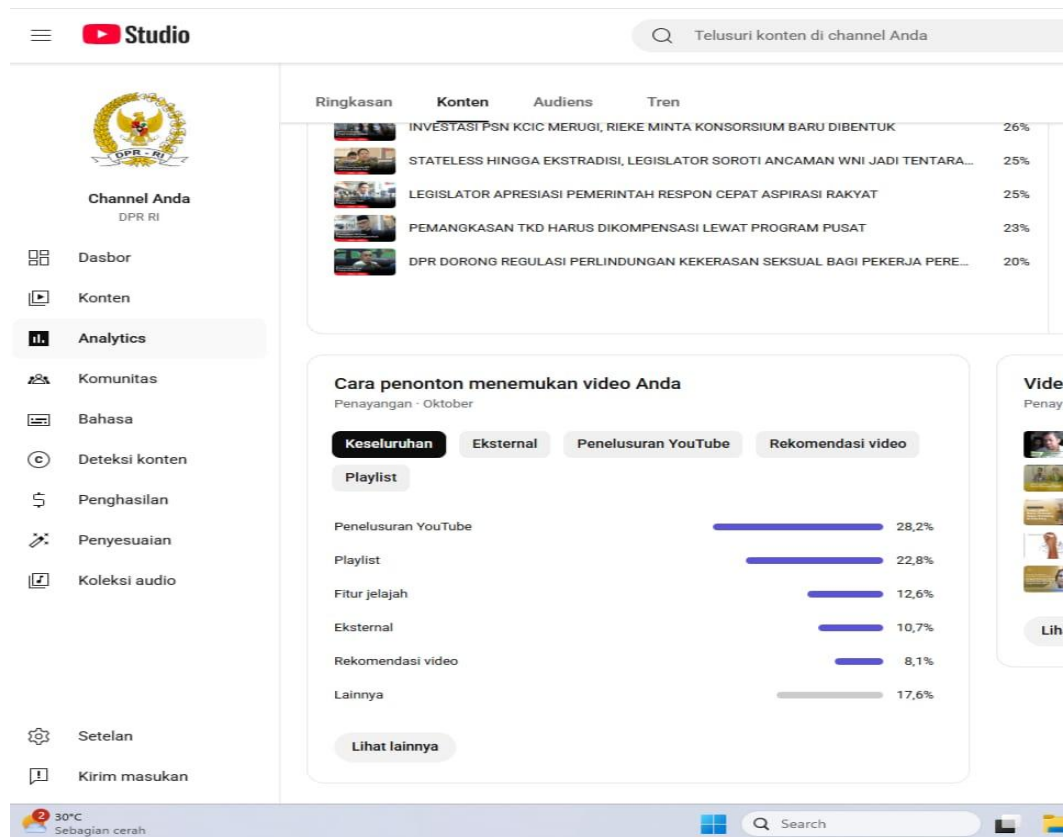
Selain itu berdasarkan hasil data yang sama, playlist juga memiliki rasio klik tayang - dari tayangan tertinggi yakni sebesar 10,3% dengan total tayangan sebanyak 30.958. Dan memiliki ratio engagement yang positif untuk beberapa sample playlist yang baru dibuat. Serta isi dari setiap playlist sudah sesuai dengan video yang diklasifikasikan.



Gambar 40. Tangkapan layar manfaat playlist terhadap rasio penayangan di kanal Youtube DPR RI

Berdasarkan data pada menu Analytics YouTube DPR RI, terlihat bahwa fitur playlist memberikan kontribusi signifikan dalam membantu penonton menemukan video di kanal tersebut, dengan persentase sebesar 22,8% dari total sumber penemuan video. Angka ini menunjukkan bahwa playlist berperan penting sebagai sarana navigasi yang memudahkan audiens mengakses konten sesuai tema atau kategori yang mereka minati. Dengan adanya pengelompokan video yang

sistematis melalui playlist, penonton dapat menemukan materi yang relevan secara lebih cepat tanpa harus melakukan pencarian manual. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemudahan akses dan pengalaman pengguna, tetapi juga mendukung efektivitas penyebaran informasi kelembagaan DPR RI melalui kanal YouTube secara lebih terarah dan profesional.



Gambar 41. Tangkapan layar manfaat playlist terhadap cara penonton menemukan video

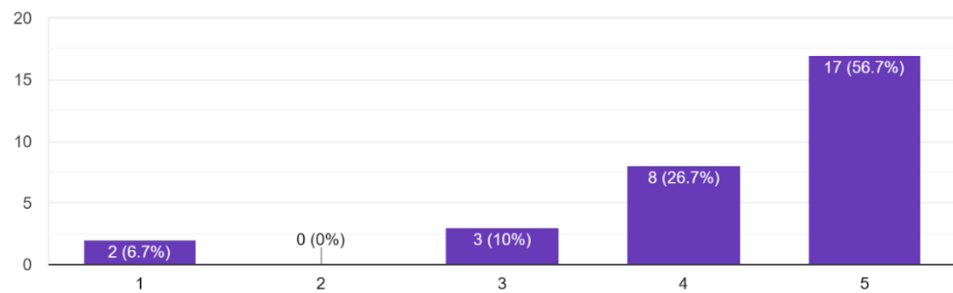
Dan yang terakhir, dalam aspek profesionalitas pengelolaan kanal YouTube juga meningkat, dengan rata-rata 4,27, menandakan dampak positif pada citra lembaga. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan konten digital DPR RI, sekaligus membuktikan bahwa inovasi yang dilakukan telah teruji dan memberi nilai tambah terhadap efektivitas penyebaran informasi lembaga serta diharapkan mampu meningkatkan citra positif dan profesionalisme DPR RI.

Kegiatan ini mencerminkan nilai dasar ASN **Akuntabel**, karena penulis menyusun laporan evaluasi secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kegiatan ini juga mencerminkan nilai **Kompeten**, karena penulis mampu menyusun laporan evaluasi yang sistematis dan berbasis data.

Dan juga memiliki keterkaitan dengan agenda III yakni menerapkan nilai **integritas dan profesionalisme** dengan menyusun laporan evaluasi secara benar, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peserta menunjukkan sikap jujur serta tanggung jawab dalam mengolah data dan hasil penilaian sehingga laporan yang dihasilkan akurat dan transparan. Kegiatan ini mencerminkan prinsip **Smart ASN** yang menuntut akuntabilitas dan kualitas dalam setiap hasil kerja, serta sejalan dengan **manajemen ASN** dalam aspek **pengawasan dan pelaporan kinerja**, di mana setiap evaluasi menjadi dasar untuk peningkatan efektivitas kerja dan pengambilan keputusan yang lebih baik di masa mendatang.

Menurut Anda, apakah pembuatan playlist terbaru ini dapat meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan kanal YouTube DPR RI?

30 responses



Gambar 42. Hasil survey mengenai profesionalitas dalam pengelolaan kanal Youtube lembaga

C. Stakeholder

Program aktualisasi dengan judul “**Optimalisasi Pembuatan Judul dan Klasifikasi Playlist pada Youtube DPR RI**” melibatkan sejumlah pihak di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen. Pihak-pihak yang berperan antara lain:

1. Kepala Sub bagian Media Sosial, Bapak Wiryawan Narendro Putro, S.Sos.,M.A.
2. Mentor, Mbak Siti Nadiah
3. Admin *Youtube* dan Redaktur tim media sosial, Mas Singgih Kinanti R
4. Rekan-rekan ASN, dilingkungan sub bagian media sosial

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Dalam pelaksanaan aktualisasi ini, muncul berbagai hambatan saat penerapan kegiatan. Oleh karena itu, berikut dipaparkan beberapa potensi kendala serta strategi penanganannya agar tujuan aktualisasi tetap dapat tercapai.

No.	Kendala Yang Terjadi	Strategi Untuk Mengatasi Kendala Tersebut
1	Keterbatasan waktu dan sumber daya dalam penataan ulang <i>Playlist</i> lama (jumlah konten sudah banyak).	Membuat skala prioritas dengan membuat playlist khusus untuk video yang belum masuk kedalam playlist lama dan tidak melakukan perombakan total terhadap playlist yang sudah ada
2	Inkonsistensi dalam penamaan judul <i>Playlist</i>	• Berdiskusi dengan redaktur sebelum melakukan pembuatan playlist baru • Penulisan judul yang sederhana, jelas dan mengikuti format lama
3	Keterbatasan Akses ke akun Youtube DPR RI	Melakukan pembuatan klasifikasi dan judul playlist selama jam kerja demi

	menjaga keamanan akun lembaga
--	-------------------------------

Tabel 17. Kendala dan Strategi Penyelesaian

E. Analisis Dampak

Dengan penerapan rancangan aktualisasi berjudul ‘Optimalisasi Pembuatan Judul dan Klasifikasi *Playlist* pada *Youtube* DPR RI’ diharapkan membawa perubahan yang bermanfaat bagi Biro Pemberitaan Parlemen sebagai berikut:

1. Sub bagian Media sosial dan DPR RI: Dengan tersusunnya *Playlist Youtube* secara lebih sistematis, publik dapat lebih mudah mengakses konten, Dan kanal *Youtube* resmi DPR menjadi lebih profesional dan kredibel sebagai sumber informasi DPR RI serta ada nya peningkatan baik dari segi tata kelola konten maupun kualitas pelayanan informasi.
2. Bagi audiens atau publik eksternal: Akan lebih mudah menemukan konten yang dicari dan dibutuhkan, khususnya untuk para *subscriber Youtube* DPR RI baik di Indonesia ataupun pengguna internet secara umum di seluruh Dunia.
3. Bagi publik internal (Anggota Dewan): Penyusunan playlist ini akan membantu pesan kelembagaan dapat tersalurkan secara spesifik kepada Masyarakat.
4. Dampak Jangka Pendek: Optimalisasi playlist YouTube DPR RI menghasilkan kanal yang lebih teratur dan mudah diakses oleh publik. Penonton dapat dengan cepat menemukan video sesuai kebutuhan, baik itu sidang paripurna, rapat komisi, maupun podcast. Hal ini secara langsung meningkatkan pengalaman pengguna, karena navigasi konten menjadi lebih jelas dan sistematis.
5. Dampak Jangka Menengah: Penataan playlist ini membentuk pola klasifikasi konten yang konsisten sehingga dapat dijadikan standar internal bagi tim media sosial DPR RI. Konsistensi tersebut berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan publik terhadap keterbukaan informasi dan kinerja DPR RI. Selain itu, playlist yang tertata rapi mempermudah proses monitoring dan evaluasi internal, karena dapat dimanfaatkan sebagai dasar analisis untuk menilai efektivitas dan kualitas konten secara berkelanjutan.
6. Dampak Jangka Panjang : Membantu algoritma *Youtube* merekomendasikan konten dari DPR RI ke audiens lebih luas sehingga akan ada peningkatan *SEO*, memperluas jangkauan informasi, dan menjaga keberlanjutan pengelolaan konten digital.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Program aktualisasi berjudul ‘Optimalisasi Pembuatan Judul dan Klasifikasi *Playlist* pada *Youtube* DPR RI’ disusun berdasarkan hasil pembelajaran selama Pelatihan Dasar CPNS, yang mencakup agenda I hingga agenda IV. Dengan demikian, laporan rancangan aktualisasi ini telah sesuai dengan capaian pembelajaran pada setiap agenda pembelajaran sebagai berikut:

1. Agenda I

Pelaksanaan program aktualisasi ini sejalan dengan semangat wawasan kebangsaan, karena meneguhkan fungsi DPR RI sebagai lembaga representasi rakyat yang terbuka terhadap publik. Dengan penyusunan *Playlist* yang lebih sistematis, masyarakat dapat lebih mudah memahami kerja-kerja DPR RI dalam kerangka demokrasi, sehingga menumbuhkan rasa percaya dan keterikatan antara lembaga negara dengan rakyat. Hal ini turut memperkuat nilai kebangsaan berupa persatuan dan kesatuan bangsa melalui keterbukaan informasi.

Selain itu, langkah ini juga mencerminkan nilai bela negara, di mana aparatur sipil negara mengambil peran aktif dalam menjaga keutuhan bangsa melalui penyediaan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses. Dengan menghadirkan kanal informasi yang tertata, ASN berkontribusi dalam memperkuat kesadaran publik tentang peran DPR RI sebagai pilar demokrasi dan penyangga konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa bela negara tidak hanya melalui pertahanan fisik, tetapi juga melalui penyebaran informasi yang benar untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.

2. Agenda II

Aktualisasi ini telah mencerminkan implementasi nyata dari core values ASN BerAKHLAK. Nilai BerOrientasi pelayanan merupakan yang paling menonjol, karena berdasarkan aktualisasi ini, penulis memberikan pelayanan kepada publik internal (Anggota Dewan) dan publik eksternal (audiens/netizen), dari aspek anggota Dewan diharapkan meningkatkan paparan kinerja dan fungsi DPR, agar pesan strategis Lembaga dapat tersampaikan sementara dari aspek publik eksternal, aktualisasi ini memberikan manfaat kepada seluruh *subscriber* dan pengguna internet baik di Indonesia ataupun seluruh Dunia dengan membantu melakukan pengklasifikasian dari konten di kanal *Youtube* DPR RI. Nilai Akuntabel terlihat dari penataan *Playlist* yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional, sedangkan nilai Kompeten tercermin dalam

peningkatan kemampuan mengelola media digital dengan standar yang lebih baik. Nilai Harmonis dan Kolaboratif juga terwujud melalui koordinasi dengan rekan kerja dalam memastikan judul *Playlist* sesuai kebutuhan publik.

Lebih jauh, nilai Adaptif ditunjukkan dengan kemampuan menyesuaikan pengelolaan konten dengan perkembangan tren digital, sementara Loyal dan Berorientasi Pelayanan tercermin dari dedikasi untuk menghadirkan layanan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan aktualisasi ini bukan hanya memenuhi kebutuhan teknis, melainkan juga memperkuat integritas ASN yang berlandaskan nilai BerAKHLAK sebagai pedoman kerja sehari-hari.

3. Agenda III

Program ini menegaskan bahwa ASN memiliki peran strategis sebagai penyambung informasi antara lembaga negara dan masyarakat. Dengan menyusun *Playlist* yang lebih terstruktur, ASN turut melaksanakan peran sebagai pelayan publik, pengelola komunikasi digital, sekaligus agen perubahan yang mampu meningkatkan citra kelembagaan DPR RI. Peran ini sesuai dengan amanah Undang-Undang ASN yang menekankan pentingnya profesionalitas dan integritas dalam setiap kinerja.

Selain itu, aktualisasi ini juga mencerminkan karakter Smart ASN, yakni ASN yang mampu menguasai teknologi, berpikir kritis, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dengan mengelola media sosial secara profesional, ASN tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga memperkuat kapasitas lembaga dalam menghadapi tantangan era digital. Hal ini menjadi langkah penting dalam mendukung transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang lebih modern dan berdaya saing.

B. Saran

Sebagai peserta Latsar CPNS Gelombang XVII, penulis menyampaikan beberapa saran kepada instansi dan unit kerja terkait pelaksanaan program aktualisasi ini, yaitu:

- Melakukan evaluasi dan penataan ulang konten maupun *Playlist Youtube* secara berkala, setidaknya setiap 2 -3 bulan sekali, agar susunan konten senantiasa relevan serta mudah dijangkau oleh masyarakat, serta mencegah terjadinya konten yang menumpuk tanpa pengelolaan.
- Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi internal sehingga setiap tayangan yang dipublikasikan dapat diukur efektivitas serta dampaknya terhadap tingkat keterlibatan publik.

- Terus mendorong inovasi dalam pengembangan konten kreatif yang mampu memperkuat citra positif DPR RI sekaligus meningkatkan minat dan ketertarikan masyarakat pada kanal *Youtube* resmi DPR RI.
- Tambahkan thumbnail konsisten dan relevan untuk memperkuat identitas visual playlist
- Membuat playlist cuplikan livestreaming rapat dengan durasi yang ideal guna meningkatkan waktu tonton di kanal Youtube DPR RI
- Konsisten melakukan pembuatan playlist yang akan datang ditahun-tahun berikutnya dengan format yang sama dan hanya berbeda penamaan dalam periodikal tahun

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Diambil dari <https://jdih.ombudsman.go.id/>

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara. Diambil dari <https://peraturan.bpk.go.id/>

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Diambil dari <https://makassar.lan.go.id/perlan/>

Lembaga Administrasi Negara. (2024). *Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 580/K. 1/PDP.07/2024 tentang Kurikulum Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS)*. Jakarta: LAN RI. Diambil dari <https://bkpsdm.purworejokab.go.id/>

Lembaga Administrasi Negara. (2024). *Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 581/K. 1/PDP.07/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS)*. Jakarta: LAN RI.

Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diambil dari <https://berkas.dpr.go.id/jdih/>

Keputusan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2394 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Beban Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Diambil dari <https://berkas.dpr.go.id/jdih/>

Laporan Kinerja Biro Pemberitaan Parlemen Tahun 2024. Diambil dari <https://berkas.dpr.go.id/setjen/>

Lampiran



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Perkembangan Aktualisasi Minggu Ke- 1 *

Nama : Riski As Swarra Saputra
NIP : 199301132025061001
Unit Kerja : Biro Pemberitaan Parlemen
Isu : Belum optimalnya klasifikasi produk tayangan video pada Playlist Youtube DPR RI
Gagasan : Optimalisasi Pembuatan Judul dan Klasifikasi Playlist pada Youtube DPR RI

No.	Kegiatan	Bukti Dukung**
1.	Persiapan Awal a) Diskusi Dengan Mentor	https://drive.google.com/drive/folders/1WQJBVuDn0sSgdgkkgg-IQLWSaPDvvrT63
2.	Menyusun hasil diskusi dengan mentor	https://docs.google.com/document/d/1xTWB5NZrPZF0S2QWJkMQsHF2LH5MJz46O0vYyTVdCkw/edit?tab=t.0
3.	Mempelajari dan mencatat data yang relevan dengan isu	https://docs.google.com/document/d/1xTWB5NZrPZF0S2QWJkMQsHF2LH5MJz46O0vYyTVdCkw/edit?usp=drivesdk

Jakarta, 1 Oktober 2025

Mengetahui,

Mentor

Coach

Izzaty, S.T., M.E.

Siti Nadiah



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Perkembangan Aktualisasi Minggu Ke- 2 *

Nama : Riski As Swarra Saputra
NIP : 199301132025061001
Unit Kerja : Biro Pemberitaan Parlemen
Isu : Belum optimalnya klasifikasi produk tayangan video pada Playlist Youtube DPR RI
Gagasan : Optimalisasi Pembuatan Judul dan Klasifikasi Playlist pada Youtube DPR RI

No.	Kegiatan	Bukti Dukung**
1.	Week 2 a) Diskusi dengan admin/redaktur Youtube DPR terkait list program dan jenis video	https://drive.google.com/drive/folders/1hj3c0w7mV70ikcgHmUQJWGfaIA9PVFH0
2.	Week 2 b) Mengumpulkan data dan indikator <i>Playlist</i>	https://docs.google.com/document/d/1ViDgDsPTLkVOzSx8LNFN9XBlypZ9T5-1qAf0127tN-A/edit?tab=t.0
3.	Week 2 c) Diskusi bersama mentor untuk menentukan kebutuhan perbaikan klasifikasi	https://docs.google.com/document/d/1ViDgDsPTLkVOzSx8LNFN9XBlypZ9T5-1qAf0127tN-A/edit?tab=t.0

Jakarta, 8 Oktober 2025

Mengetahui,

Mentor

Coach

Izzaty, S.T., M.E.

Siti Nadiah



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925 LAMAN : www.dpr.go.id

Laporan Perkembangan Aktualisasi Minggu Ke- 3 *

Nama : Riski As Swarra Saputra
NIP : 199301132025061001
Unit Kerja : Biro Pemberitaan Parlemen
Isu : Belum optimalnya klasifikasi produk tayangan video pada Playlist Youtube DPR RI
Gagasan : Optimalisasi Pembuatan Judul dan Klasifikasi Playlist pada Youtube DPR RI

No.	Kegiatan	Bukti Dukung**
1.	Week 3 a) Benchmarking dengan media/channel eksternal	 Kegiatan Laporan Perkemb...
2.	Week 3 b) Membuat draft standar klasifikasi	 Kegiatan Laporan Perkemb...
3.	Week 3 c) Diskusi bersama mentor terkait draft standar	 Kegiatan Laporan Perkemb...
4	Week 3 d) Menyusun standar final klasifikasi <i>Playlist</i>	 Kegiatan Laporan Perkemb...

Jakarta, 15 Oktober 2025

Mengetahui,

Coach

Mentor

Izzaty, S.T., M.E.

Siti Nadiah



**Laporan Perkembangan Aktualisasi Minggu Ke- 4, Ke-5 &
Ke-6**

Nama : Riski As Swarna Saputra
NIP : 199301132025061001
Unit Kerja : Biro Pemberitaan Parlemen
Isu : Belum optimalnya klasifikasi produk tayangan video pada Playlist Youtube DPR RI
Gagasan : Optimalisasi Pembuatan Judul dan Klasifikasi Playlist pada Youtube DPR RI

No.	Kegiatan	Bukti Dukung**
1.	Week 4 a) Membuat <i>Playlist-Playlist</i> terhana	☒ Kegiatan Laporan Perkembanga... & https://www.youtube.com/@DPRRIOficial/playlists
2.	Week 4 b) Pengelompokan video berdasarkan jenis <i>Playlist</i>	☒ Kegiatan Laporan Perkembanga... & https://www.youtube.com/@DPRRIOficial/playlists
3.	Week 5 c) Diskusi bersama mentor terkait draft standar	☒ Kegiatan Laporan Perkembanga...
4.	Week 5 d) Menyusun standar final klasifikasi <i>Playlist</i>	☒ Kegiatan Laporan Perkembanga...
5.	Week 6 e) Evaluasi bersama mentor terkait hasil implementasi	☒ Kegiatan Laporan Perkembanga...
6.	Week 6 f) Menyiapkan draft format evaluasi	☒ Kegiatan Laporan Perkembanga...
7.	Week 6 g) Menyusun hasil evaluasi penyusunan klasifikasi pembuatan judul <i>Playlist</i>	☒ Kegiatan Laporan Perkembanga...



Jakarta, 29 Oktober 2025

Mengetahui,

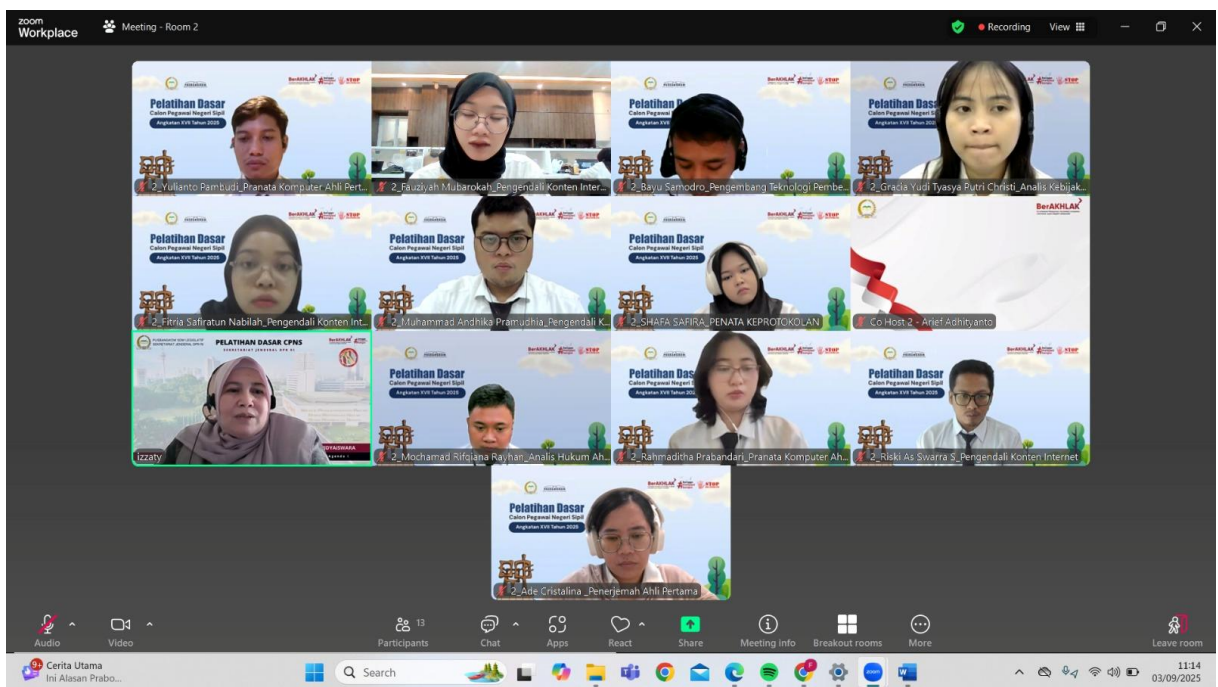
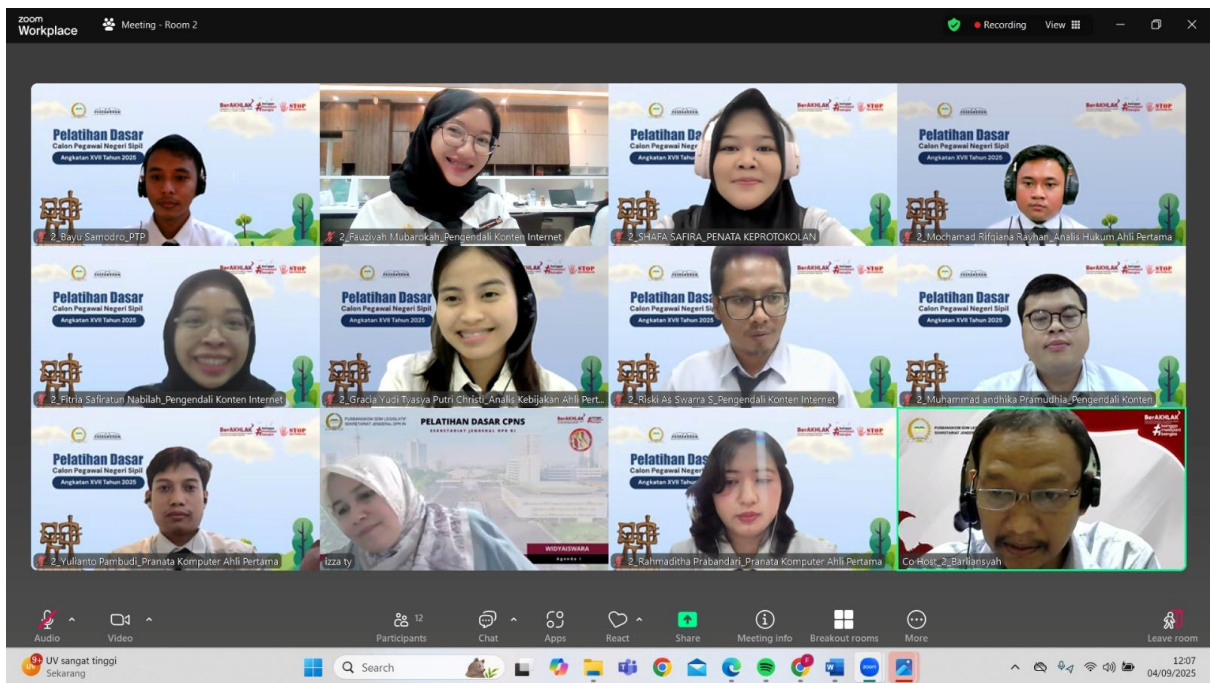
Coach

Izzaty, S.T., M.E.

Mentor

Siti Nadiyah





Kegiatan Coaching Agenda 4 bersama Coach Ibu Izzaty



Diskusi bersama mentor Mbak nadya

Formulir Alat Bantu Mentoring Rancangan Aktualisasi

Nama : Riski As Swarra Saputra
NIP : 199301132025061001
Unit Kerja : Biro Pemberitaan Parlemen
Jabatan : Pengendali Konten Internet
Isu Kegiatan : Belum optimalnya klasifikasi produk tayangan video pada Playlist Youtube DPR RI

Kegiatan 1 : Persiapan Awal Untuk Penyusunan Perencanaan Kegiatan

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Diskusi dengan mentor pasca pelaksanaan sidang rancangan aktualisasi. Menyusun hasil diskusi dengan mentor terkait isu yang dipilih Mempelajari dan mencatat data yang relevan dengan isu hasil diskusi	Memberikan arahan kepada <i>mentee</i> agar fokus menambah playlist berdasarkan jenis konten dan pentingnya konsistensi penamaan playlist yang akan disesuaikan dengan gaya redaksional tim Media Sosial DPR RI dan dikonsultasikan lebih lanjut dengan redaktur	

Kegiatan 2 : Identifikasi kebutuhan klasifikasi Pembuatan Playlist

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Diskusi dengan admin Youtube DPR/Redaktur tim media sosial terkait list program dan jenis video Mengumpulkan data dan indikator Playlist Diskusi bersama mentor untuk menentukan kebutuhan perbaikan klasifikasi	Mengarahkan <i>mentee</i> untuk berdiskusi lebih lanjut dengan redaktur, agar <i>mentee</i> memiliki Gambaran teknis sebelum membuat playlist-playlist terbaru dan mengarahkan <i>mentee</i> mendata video yang belum memiliki playlist	

Kegiatan 3 : Penyusunan Klasifikasi Pembuatan Judul Playlist

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Benchmarking dengan media/channel eksternal Membuat draft standar klasifikasi Diskusi bersama mentor terkait draft standar yang sudah dibuat Menyusun standar final klasifikasi playlist	Mengarahkan <i>mentee</i> untuk mengubah draft yang telah dibuat sebelumnya agar playlist komisi dan alat kelengkapan dewan tetap dipertahankan berdasarkan pembagian tahun untuk memudahkan penelusuran kegiatan kedewanan. Penamaan playlist disarankan mengikuti format yang ada, menggunakan huruf kapital dan mencantumkan tahun secara spesifik dan mengubah beberapa draft playlist	

Kegiatan 4 : Implementasi Klasifikasi Playlist YouTube

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Membuat Playlist-Playlist terbaru Pengelompokan video berdasarkan jenis Playlist Diskusi bersama mentor terkait perbaikan klasifikasi Memperbaiki klasifikasi pada Playlist	Memberikan arahan kepada <i>mentee</i> untuk tetap memantau dan membuatkan playlist terbaru yang mungkin ada di kemudian hari serta memasukkan video yang diunggah kedalam playlist terbaru	

Kegiatan 5 : Evaluasi Hasil Penyusunan Klasifikasi Pembuatan Judul

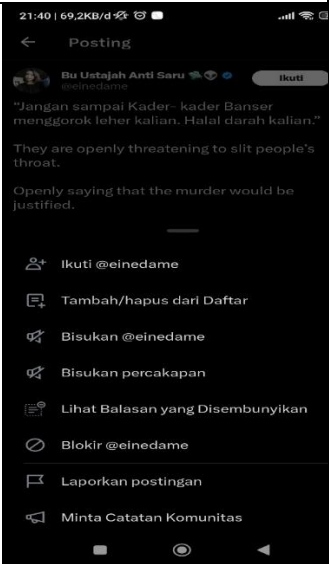
Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Evaluasi bersama mentor terkait hasil implementasi Menyiapkan draft format evaluasi Menyusun hasil evaluasi penyusunan klasifikasi pembuatan judul Playlist	Mengarahkan <i>mentee</i> untuk membuat kueisoner, agar keberhasilan dari aktualisasi dapat diukur dengan baik, serta dapat mendapatkan <i>feedback</i> dari publik. Dan juga sesuai dengan arahan penguji dalam aspek 3T(Terukur, Teruji dan Terbukti Manfaat)	

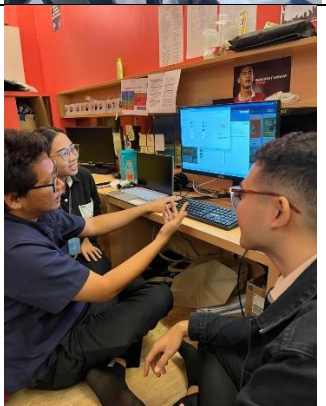
*) dilaporkan *Mentee* (peserta) kepada Mentor sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu yang ditentukan

**RENCANA AKSI BELA NEGARA PESERTA PELATIHAN DASAR CPNS TAHUN
2025**

ANGKATAN : XVII
NAMA : RISKI AS SWARRA SAPUTRA
NOMOR DAFTAR HADIR : 6
INSTANSI : SETJEN DPR RI
NAMA MENTOR : SITI NADIAH
JABATAN MENTOR : OPERATOR LAYANAN OPERATIONAL
NILAI DARI MENTOR : SANGAT BAIK

No	Nilai Bela Negara	Indikator Sikap dan Perilaku	Aksi	Tempat	Waktu	Bukti	Paraf Mentor
1	Cinta Tanah Air	Menjaga lingkungan	Membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan kategori sampah	Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Setiap Hari		
			Menggunakan tissue seperlunya	Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Setiap Hari		
		Bangga menggunakan hasil produk asli Indonesia	Memakai kemeja batik sebagai bentuk identitas budaya Indonesia	Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Saat dibutuhkan		
			Memakan makanan khas salah satu daerah asli Indonesia	Lingkungan Rumah	Saat dibutuhkan		

2	Sadar Berbangsa dan Bernegara	Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Mengikuti Upacara Hari Besar Negara	Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Saat dibutuhkan		
			Bekerja dengan profesional dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya sebagai seorang ASN	Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Setiap Hari		
		Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara	Melaporkan akun-akun di media sosial yang mengandung unsur radikalisme dan menyebarkan hoax	Media Sosial	Saat dibutuhkan		
			Rutin mendengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Setiap Hari		

3	Setia Pada Pancasila Sebagai Ideologi Negara	Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari	Melaksanakan Ibadah sesuai dengan Agama.	Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Setiap Hari		
			Membantu membersihkan lingkungan sekitar rumah	Lingkungan Masyarakat	Setiap Hari		
		Paham Nilai-Nilai Dalam Pancasila	Berbakti dan menghormati orang tua	Lingkungan Rumah	Setiap Hari		
			Membangun kerja sama yang harmonis dengan rekan kerja dari berbagai latar belakang dengan semangat gotong royong	Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Setiap Hari		

4	Rela Berkorban Untuk Bangsa Negara	Gemar Membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan	Bersedia mengorbankan waktu dan tenaga demi bangsa	Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Saat dibutuhkan		RT K Daerah
			Membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan.	Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Saat dibutuhkan		
		Berpartisipasi aktif dalam Pembangunan Masyarakat, bangsa,	Mendukung UMKM lokal untuk membantu peningkatan perekonomian masyarakat	Lingkungan Masyarakat	Setiap Hari		

		dan negara.	Menjunjung nilai kemanusiaan dengan bersedekah	Lingkungan Masyarakat	Saat dibutuhkan		Hmm
5	Kemampuan Awal Bela Negara	Senantiasa menjaga Kesehatan	Berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh	Lingkungan Rumah	Setiap Hari		Hmm
			Minum vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh	Lingkungan Rumah	Setiap Hari		Hmm
		Senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan	Mengikuti kegiatan keagamaan atau khutbah jumat	Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI	Setiap Jumat		Hmm

		yang Maha Esa	Berdoa Kepada Tuhan Yang Maha Kuasa	Lingkun gan Rumah	Setiap Hari		
--	--	------------------	---	-------------------------	----------------	---	---

Formulir Alat Bantu *Coaching*

FORMULIR ALAT BANTU

PENGENDALIAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTUALISASI PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN XVII TAHUN 2025

Nama : Riski As Swarra Saputra

Nama *Coach*: Izzaty, S.T., M.E.

Instansi : Setjen DPR RI

NIP : 199301132025061001

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu atau Hal Yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach
1	12 September 2025	Bimbingan Bab III sebelum Seminar Rancangan Aktualisasi	WhatsApp (Online)	Memperbaiki teknis penulisan termasuk bahasa Asing	
2	18 September 2025	Memberikan catatan revisi setelah Seminar Rancangan Aktualisasi	WhatsApp (Online)	Mengikuti arahan dan masukan dari Penguji	
3	29 September 2025	Revisi Seminar Rancangan Aktualisasi	WhatsApp (Online)	Sudah cukup baik	
4	2 Oktober 2025	Review laporan Minggu ke-1	WhatsApp (Online)	Menuliskan secara keseluruhan kegiatan minggu ke-1	
5	10 Oktober 2025	Review laporan Minggu ke-2	WhatsApp (Online)	Sudah cukup baik	
6	17 Oktober 2025	Review laporan Minggu ke-3	WhatsApp (Online)	Penambahan deskripsi playlist	
7	23 Oktober 2025	Bimbingan untuk Laporan Mingguan ke-4	WhatsApp (Online)	Penambahan aspek evaluasi 3T	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14	Dst..				

*) Pembimbingan yang sah adalah yang
Ditandatangani oleh Coach